

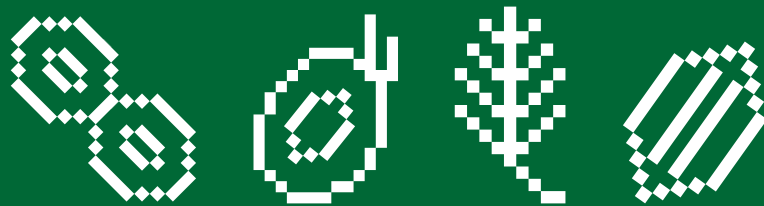


**Satu Dekade**

# Kontribusi Nyata, untuk Keberlanjutan

A Decade of Meaningful Contributions to Sustainability

ANNUAL REPORT 2025  
LAPORAN TAHUNAN 2025



## Tim Penyusun Annual Report BPDP 2025 Annual Report 2025 Preparation Team

Pembina | Advisor:

**Eddy Abdurrachman**

Pengarah | Steering Committee:

**Zaid Burhan Ibrahim**

Penanggung Jawab | Person in Charge:

**Mushlih**

Ketua | Chairperson:

**Adi Sucipto**

Koordinator | Coordinator:

**Kandha Aditya Sandjoyo**

Anggota | Members:

**Taufiqurrokhman**

**Fiqih Yogantara**

**Annisa Kartika Garini**

**Gulfi Oktariani**

**Hero Dwi Afrisal**

**Aditya Pambudi Putranto**

**Adi Prasetya**

**Muhammad Rizki**

**Rangga Pradipta**

**Muhamad Rahmat**

**Adriansyah**

**Deny Alvar**

**Decta Pitron**





**Satu Dekade**

# Kontribusi Nyata, untuk Keberlanjutan

A Decade of Meaningful Contributions to Sustainability

Selama satu dekade, BPDP terus hadir membantu pekebun melalui berbagai program unggulan guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan sektor perkebunan.

For a decade, BPDP has continued to support smallholders through various flagship programs aimed at improving productivity, welfare, and sustainability in the plantation sector.

BPDP hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membentuk lembaga khusus yang mampu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan secara terarah untuk mendukung keberlanjutan sektor perkebunan nasional. Pembentukan BPDP berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengamanatkan pengembangan pembiayaan usaha perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan pekebun, produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan sektor perkebunan. Amanat tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi dasar pembentukan BPDPKS sebagai pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

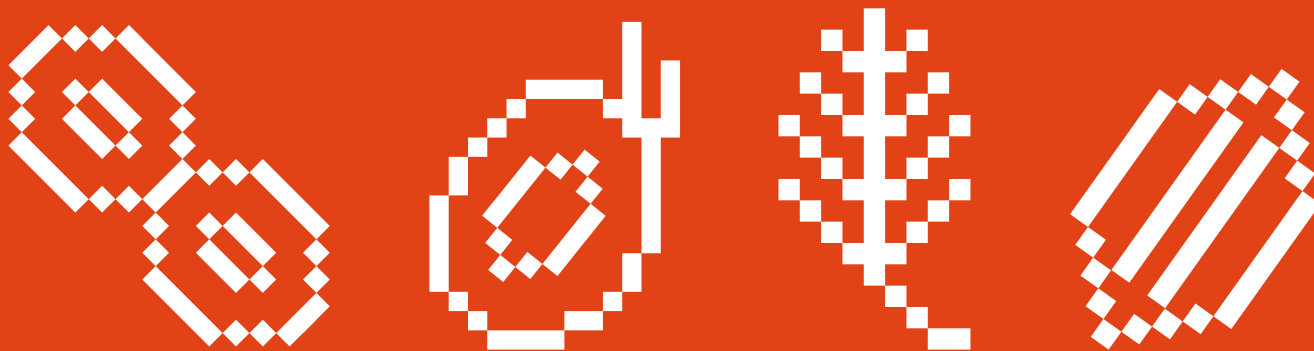
Dalam perkembangannya, peran BPDP terus mengalami perkembangan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan dana kelapa sawit, tetapi juga mendapat amanat untuk mendukung pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Perluasan mandat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat dukungan kepada pekebun melalui berbagai program, seperti pengembangan sumber daya manusia, peremajaan perkebunan, penelitian dan pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan daya saing komoditas perkebunan Indonesia.

BPDP was established as part of the government's commitment to creating a dedicated institution capable of collecting, managing, and distributing plantation funds in a more focused and accountable manner to support the sustainability of Indonesia's plantation sector. Its establishment was rooted in Law Number 39 of 2014 on Plantations, which mandates the development of plantation financing to improve farmers' welfare, productivity, competitiveness, and the long-term sustainability of the plantation industry. This mandate was further strengthened through Presidential Regulation Number 61 of 2015 on the Collection and Utilization of Oil Palm Plantation Funds, which became the legal foundation for the establishment of BPDPKS as the managing agency for oil palm plantation funds.

In its development, the role of BPDP has continued to evolve. Through Presidential Regulation Number 132 of 2024, BPDP is no longer solely focused on managing palm oil funds, but has also been mandated to support the development of cocoa and coconut commodities. This expanded mandate represents a strategic step toward strengthening support for smallholders through various programs, including human resource development, replanting, research and development, provision of facilities and infrastructure, and enhancement of the competitiveness of Indonesia's plantation commodities.

# Pengenalan

Dimulai dari langkah kecil untuk mendukung keberlanjutan sektor perkebunan, berbagai program terus dikembangkan guna membantu pekebun, industri, dan generasi muda.



## Introduction

Starting from small steps to support the sustainability of the plantation sector, various programs have continued to be developed to assist smallholders, industries, and the younger generation.

00

00

## A. Perjalanan Satu Dekade

Tidak terasa, perjalanan BPDP telah menapaki satu dekade pengabdian. Sepuluh tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan rangkaian langkah, kerja nyata, dan komitmen yang terus tumbuh untuk menghadirkan manfaat bagi pekebun, industri, dan masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu, berbagai program yang dijalankan BPDP menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perkebunan nasional, meningkatkan taraf kesejahteraan pekebun, serta mendorong terciptanya sektor perkebunan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Di usia yang ke sepuluh ini, BPDP tidak hanya merayakan perjalanan panjang yang telah dilalui, tetapi juga meneguhkan semangat untuk terus bertransformasi. Momentum ini menjadi titik penting bagi BPDP untuk menghadirkan pelayanan yang semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Seiring dengan perluasan mandat kelembagaan, BPDP kini melangkah lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada kelapa sawit, tetapi juga turut mengemban amanah pengembangan komoditas kelapa dan kakao sebagai bagian dari kekuatan perkebunan strategis nasional.

Perjalanan baru ini menjadi simbol bahwa pertumbuhan tidak pernah berhenti. BPDP terus bergerak, bertumbuh, dan bertransformasi, layaknya akar yang semakin kuat menopang pohon besar bernama perkebunan Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, BPDP berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra pembangunan, menanam harapan, merawat kemajuan, dan memetik manfaat bagi generasi hari ini maupun masa depan.

## A. A Decade Journey

The journey of BPDP has now quietly reached a decade of dedication and service. Ten years are not merely a measure of time, but a reflection of continuous progress, commitment, and meaningful contributions devoted to farmers, industry players, and the people of Indonesia. Throughout these years, the programs implemented by BPDP have become part of a broader effort to strengthen the quality of the national plantation sector, improve the welfare of smallholders, and foster a plantation industry that is more competitive, resilient, and sustainable.

At its tenth anniversary, BPDP not only celebrates the milestones it has achieved, but also reaffirms its commitment to continuous transformation. This moment serves as an important turning point for BPDP to further enhance its services, becoming more adaptive, professional, and responsive to evolving challenges and opportunities. Alongside the expansion of its institutional mandate, BPDP now embraces a broader responsibility, extending beyond oil palm to also support the development of coconut and cocoa as strategic national plantation commodities.

This new chapter symbolizes that growth is a continuous journey. BPDP continues to move forward, evolve, and transform, much like deep roots that steadily strengthen and sustain the great tree of Indonesia's plantation sector. Guided by the spirit of collaboration and sustainability, BPDP remains committed to serving as a partner in national development by nurturing progress, cultivating opportunities, and delivering lasting benefits for both present and future generations.



## B. Tema Visual

Tema visual Annual Report BPDP 2025 hadir sebagai gambaran perjalanan panjang, pertumbuhan, dan transformasi yang terus bergerak maju. Mengusung pendekatan line art modern dengan dominasi warna hijau dan oranye, desain ini tidak hanya ingin tampil elegan secara visual, tetapi juga membawa cerita tentang semangat baru BPDP dalam menatap masa depan perkebunan Indonesia.

Warna hijau menjadi simbol kehidupan, keberlanjutan, dan harapan yang terus tumbuh dari tanah perkebunan Indonesia. Sementara warna oranye menghadirkan energi, optimisme, dan keberanian untuk terus bertransformasi. Perpaduan keduanya menggambarkan BPDP yang hari ini tidak lagi hanya bicara tentang pengelolaan dana, tetapi juga tentang membangun masa depan, menjaga keberlanjutan, dan menumbuhkan manfaat yang dapat dirasakan banyak orang.

Pada bagian cover, berdiri sebuah pohon kelapa sawit yang kokoh, sehat, dan dipenuhi buah matang. Pohon ini menjadi simbol perjalanan BPDP selama satu dekade terakhir. Tumbuh kuat menghadapi berbagai tantangan, berakar dalam pada komitmen pelayanan, dan terus menghasilkan manfaat bagi pekebun, industri, hingga masyarakat luas. Buah yang lebat menjadi representasi dari hasil kerja, kolaborasi, dan keberlanjutan yang selama ini dibangun bersama.

Sentuhan line art dipilih untuk menghadirkan kesan modern namun tetap hangat dan dekat. Garis-garis yang mengalir membentuk visual yang dinamis, menggambarkan bahwa BPDP terus bergerak, beradaptasi, dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Di saat yang sama, gaya visual ini juga memberi ruang bagi cerita besar tentang transformasi BPDP, dari lembaga yang selama ini dikenal fokus pada sawit, menjadi institusi yang kini melangkah lebih luas dengan mendukung pengembangan kelapa dan kakao sebagai bagian dari masa depan perkebunan Indonesia.

Secara keseluruhan, tema visual ini ingin menghadirkan satu pesan sederhana namun kuat: bahwa pertumbuhan tidak pernah berhenti. Seperti pohon yang terus bertumbuh dan berbuah, BPDP akan terus melangkah, bertransformasi, dan menanam manfaat bagi generasi hari ini maupun masa depan



## B. Visual Theme

The visual theme of BPDP Annual Report 2025 is designed to reflect a journey of growth, transformation, and continuous progress. Through a modern line art approach dominated by green and orange tones, the design not only aims to create an elegant visual identity, but also to tell a story about the renewed spirit of BPDP in shaping the future of Indonesia's plantation sector.

Green symbolizes life, sustainability, and the hope that continues to grow from the rich lands of Indonesia's plantations. Meanwhile, orange represents energy, optimism, and the courage to keep transforming. Together, these colors portray BPDP as an institution that today is not only focused on fund management, but also on building the future, nurturing sustainability, and creating meaningful impact for farmers, industries, and society.

At the center of the cover stands a strong and healthy oil palm tree filled with ripe fruit. This tree symbolizes the ten-year journey of BPDP, growing stronger through challenges, deeply rooted in commitment and service, and continuously delivering value for smallholders, industries, and the nation. The abundant fruit reflects the results of collaboration, resilience, and sustainable growth that have been cultivated over the years.

The use of line art brings a modern yet warm visual character. The flowing lines create a dynamic impression, representing how BPDP continues to move forward, adapt, and evolve with the changing times. At the same time, this visual style also tells a bigger story about BPDP transformation, from an institution primarily focused on palm oil into one that now embraces a broader mandate by supporting the development of coconut and cocoa as part of the future of Indonesia's plantation sector.

Overall, the visual theme conveys one simple yet powerful message: growth never stops. Like a tree that continues to grow and bear fruit, BPDP will continue to move forward, transform, and cultivate lasting benefits for both present and future generations.



## C. Tema Laporan



Tema Satu Dekade Kontribusi Nyata untuk Keberlanjutan merepresentasikan perjalanan BPDP selama sepuluh tahun dalam menghadirkan manfaat nyata bagi sektor perkebunan Indonesia. Tema ini tidak hanya menggambarkan pencapaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi refleksi atas komitmen BPDP dalam membangun ekosistem perkebunan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Selama satu dekade, BPDP terus bertumbuh bersama pekebun, industri, pemerintah, dan masyarakat melalui berbagai program strategis yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan nasional.

Kontribusi nyata menegaskan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan BPDP berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung, mulai dari penguatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas perkebunan, dukungan terhadap energi terbarukan, hingga pengembangan riset dan inovasi. Sementara itu, keberlanjutan menjadi landasan utama yang mencerminkan komitmen BPDP untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Tema ini juga menjadi simbol transformasi BPDP dalam memasuki babak baru kelembagaan. Setelah satu dekade dikenal melalui pengelolaan dana kelapa sawit, BPDP kini melangkah lebih luas dengan mendukung pengembangan komoditas strategis lainnya seperti kelapa dan kakao. Perluasan mandat tersebut mencerminkan semangat BPDP untuk terus beradaptasi, berkembang, dan memperkuat kontribusinya bagi masa depan perkebunan Indonesia.

Melalui tema ini, BPDP ingin menyampaikan bahwa perjalanan sepuluh tahun bukanlah garis akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, BPDP akan terus hadir sebagai mitra pembangunan yang menanam harapan, menumbuhkan kemajuan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi generasi hari ini maupun masa depan.

## C. Report Theme

The theme One Decade of Real Contribution for Sustainability reflects the ten-year journey of BPDP in delivering meaningful impact to Indonesia's plantation sector. This theme not only represents the achievements that have been accomplished, but also serves as a reflection of BPDP's commitment to building a more productive, inclusive, and sustainable plantation ecosystem. Over the past decade, BPDP has continued to grow alongside smallholders, industries, government institutions, and communities through various strategic programs that have contributed directly to national development.

Real contribution emphasizes that every program and policy implemented by BPDP is designed to create tangible impact, ranging from human resource development and increased plantation productivity to support for renewable energy, research, and innovation. Meanwhile, sustainability serves as the core foundation that reflects BPDP's commitment to maintaining a balance between economic growth, social welfare, and environmental preservation.

This theme also symbolizes the transformation of BPDP as it enters a new institutional chapter. After a decade of being widely recognized for managing palm oil plantation funds, BPDP is now expanding its role to support other strategic plantation commodities, including coconut and cocoa. This expanded mandate reflects the spirit of BPDP to continuously adapt, evolve, and strengthen its contribution to the future of Indonesia's plantation sector.

Through this theme, BPDP aims to convey that ten years is not the finish line, but rather a strong foundation for the journey ahead. Guided by the spirit of collaboration, innovation, and sustainability, BPDP will continue to serve as a partner in national development by nurturing progress, cultivating opportunities, and delivering meaningful benefits for both present and future generations.



## D. Kestinambungan Tema | Theme Continuity



Selepas masa pandemi Covid-19, pada tahun 2022 sektor kelapa sawit kembali membuktikan perannya sebagai salah satu penopang penting pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk kelapa sawit menjadi bukti nyata bahwa komoditas ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi Indonesia.

Menghadapi peluang tersebut, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit menjadi hal yang sangat penting. Melalui penerapan praktik perkebunan yang baik, penguatan ISPO, serta dukungan riset dan inovasi, kelapa sawit Indonesia diharapkan mampu terus meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam hal ini, BPDP turut berperan aktif melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat, pengembangan SDM, hingga dukungan riset dan penguatan keberlanjutan industri sawit nasional. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mendorong produktivitas perkebunan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Tahun 2022 menjadi momentum awal penguatan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Following the Covid-19 pandemic period, in 2022 the palm oil sector once again demonstrated its role as one of the key drivers of Indonesia's economic recovery. The increasing demand for palm oil-based products became clear evidence that this commodity holds a strategic role in maintaining the stability and resilience of the national economy.

In response to these opportunities, improving productivity and ensuring the sustainability of palm oil plantations became increasingly important. Through the implementation of good agricultural practices, the strengthening of ISPO, and support for research and innovation, Indonesian palm oil is expected to continue enhancing its competitiveness in the global market.

In this regard, BPDP played an active role through various strategic programs, ranging from smallholder replanting and human resource development to support for research and the strengthening of sustainability within the national palm oil industry. Collaboration among all stakeholders became an important foundation in driving stronger and more sustainable plantation productivity.

The year 2022 marked an important momentum in strengthening the productivity of Indonesia's palm oil plantations toward a more competitive and sustainable future.

Tahun 2023 menjadi momentum penting bagi industri kelapa sawit Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kelapa sawit kembali membuktikan perannya sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Namun di balik kontribusi ekonomi tersebut, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan juga semakin menguat, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan.

Dalam semangat tersebut, BDPKKS mengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri kelapa sawit melalui penguatan kolaborasi dan kemitraan. Salah satu fokus utama dilakukan melalui pemberdayaan pekebun sawit melalui akses terhadap teknologi, peningkatan kapasitas, pelatihan, hingga dukungan pendanaan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.

Di sisi lain, BDPKKS juga terus mendorong terciptanya kemitraan yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, lembaga riset, akademisi, hingga masyarakat. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem sawit yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing, sekaligus tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Melalui berbagai langkah transformasi dan kolaborasi yang dijalankan secara konsisten, industri kelapa sawit Indonesia terus bergerak menuju arah yang lebih berkelanjutan. Tahun 2023 menjadi titik awal bagi penguatan peran kelapa sawit tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masa depan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.



The year 2023 marked an important milestone for the Indonesian palm oil industry. Amid increasingly complex global economic dynamics, palm oil once again demonstrated its role as one of the key pillars of the national economy. Beyond its economic contribution, however, awareness of the importance of sustainability continued to grow, encouraging all stakeholders to create broader and more sustainable impacts for both society and the environment.

In this spirit, BDPKKS took a strategic role in strengthening the palm oil industry ecosystem through stronger collaboration and partnerships. One of its primary focuses was the empowerment of smallholders through greater access to technology, capacity building, training programs, and financial support. These efforts were aimed at improving productivity while also enhancing the welfare of smallholders in a sustainable manner.

At the same time, BDPKKS continued to promote stronger partnerships among stakeholders, including government institutions, industry players, research institutions, academics, and local communities. This synergy became an important foundation in building a more inclusive, productive, and competitive palm oil ecosystem while maintaining strong attention to social and environmental aspects.

Through various transformation initiatives and collaborative efforts carried out consistently, the Indonesian palm oil industry continued to move toward a more sustainable future. The year 2023 became an important starting point in strengthening the role of palm oil not only as a driver of economic growth, but also as part of a more inclusive and sustainable development future for Indonesia.



Sektor perkebunan telah lama menjadi salah satu penyokong penting devisa negara. Namun, di tengah tantangan global yang semakin kompleks, penguatan tata kelola, data ekspor, dan keberlanjutan menjadi hal yang semakin penting untuk dipersiapkan, termasuk dalam menghadapi kebutuhan pasar internasional seperti Uni Eropa.

Ke depan, pengembangan sektor perkebunan tidak hanya berfokus pada kelapa sawit, tetapi juga mencakup komoditas strategis lain seperti kakao dan kelapa yang memiliki potensi besar bagi perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan strategi yang terarah, pemetaan yang tepat, serta pengelolaan yang berkelanjutan agar setiap komoditas dapat berkembang sesuai karakteristik dan tantangannya masing-masing.

Di tahun 2024, BPDP terus bertransformasi memperluas perannya. Tidak hanya mendukung pengembangan sawit berkelanjutan, BPDP kini juga diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pengembangan komoditas kakao dan kelapa, sehingga dapat menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi bangsa dan negara.

The plantation sector has long served as one of the key contributors to national foreign exchange earnings. However, amid increasingly complex global challenges, strengthening governance, export data management, and sustainability has become increasingly important, particularly in responding to international market requirements such as those of the European Union.

Going forward, the development of the plantation sector will no longer focus solely on palm oil, but will also encompass other strategic commodities such as cocoa and coconut, which hold significant potential for the national economy. Therefore, well-directed strategies, proper mapping, and sustainable management are essential to ensure that each commodity can grow according to its own characteristics and challenges.

In 2024, the institution continues to transform and expand its role. Beyond supporting sustainable palm oil development, BPDP is now also expected to become a driving force in the development of cocoa and coconut commodities, creating broader economic benefits for the nation and the people of Indonesia.

## E. Jejak Langkah

### 2014

Ketergantungan terhadap BBM impor membuat neraca perdagangan migas defisit.

## E. Milestones

Dependence on imported fuel has created a deficit in the oil and gas trade balance.

### 2015

Momentum awal terbentuknya BPDPKS di tengah tantangan industri sawit akibat penurunan harga CPO, di mana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai langkah strategis mulai dari menjaga stabilitas harga, finalisasi regulasi pembentukan BPDPKS, peluncuran program biodiesel B-15, hingga penyaluran subsidi biodiesel pertama sebagai upaya memperkuat keberlanjutan dan pemulihan industri kelapa sawit nasional.

The year 2015 marked the beginning of BPDPKS establishment amid challenges in the palm oil industry caused by declining CPO prices, during which the Government and all stakeholders undertook various strategic measures, including maintaining price stability, finalizing the regulatory framework for BPDPKS, launching the B-15 biodiesel program, and distributing the first biodiesel subsidy as part of efforts to strengthen the sustainability and recovery of the national palm oil industry.

### 2016

Penyaluran dan pemanfaatan dana dilakukan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, hingga peremajaan sawit rakyat.

Fund distribution and utilization were carried out to support various strategic programs, including research and development, plantation promotion, smallholder replanting, and the development of plantation facilities and infrastructure.

Selain itu, dukungan juga diberikan bagi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan biofuel, pemenuhan kebutuhan pangan berbasis sawit, serta pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan kajian untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional.

In addition, support was also directed toward the development of downstream palm oil industries and biofuel, the fulfillment of palm oil-based food needs, as well as outreach, capacity-building programs, and various studies aimed at strengthening the development of the national plantation sector.

### 2017

Penguatan program BPDPKS melalui peluncuran program sarana dan prasarana perkebunan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan, sekaligus memperkuat berbagai program strategis yang telah berjalan sebelumnya dalam mendukung pengembangan sawit Indonesia yang berkelanjutan.

The year 2017 marked an important milestone in strengthening BPDPKS programs through the launch of the plantation facilities and infrastructure program aimed at improving plantation productivity and quality, while also reinforcing various existing strategic programs in support of sustainable Indonesian palm oil development.

## E. Jejak Langkah

## E. Milestones

### 2018

Pelaksanaan implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20) pada seluruh sektor

Implementation of mandatory 20% biodiesel (B20) program implementation in all sectors

### 2019

BPDP turut berpartisipasi dalam pengembangan dan peluncuran Road Test B30, serta implementasi sistem teknologi informasi penyaluran biodiesel melalui Aplikasi Biodiesel guna mendukung efektivitas dan optimalisasi proses distribusi biodiesel.

BPDP participated in the development and launching of the B30 Road Test, as well as the implementation of the Biodiesel Application as an information technology system to support and improve the biodiesel distribution process.

### 2020

BPDPKS memperkuat dukungannya terhadap riset dan pengembangan sawit melalui penandatanganan kerja sama penelitian bahan bakar nabati bersama berbagai institusi strategis, pendanaan 14 program riset sawit senilai Rp27,5 miliar, pelaksanaan seminar nasional riset sawit, serta seleksi beasiswa sawit bagi mahasiswa untuk mendukung pengembangan SDM perkebunan yang unggul dan berkelanjutan.

BPDPKS strengthened its support for palm oil research and development through the signing of biofuel research cooperation agreements with various strategic institutions, funding 14 palm oil research programs worth Rp27.5 billion, organizing a national palm oil research seminar, and conducting the selection process for palm oil scholarship recipients to support the development of high-quality and sustainable plantation human resources.

### 2021

BPDPKS bersama para pemangku kepentingan memperkuat percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pola kemitraan antara perusahaan dan petani sawit, sekaligus mendorong pengembangan riset dan inovasi melalui pendanaan program Grant Riset Sawit serta kolaborasi pengembangan bioavtur dan pengelolaan sawit rakyat berkelanjutan.

BPDPKS together with stakeholders strengthened the acceleration of the Smallholder Replanting Program (PSR) through partnership schemes between companies and smallholders, while also promoting research and innovation through the Palm Oil Research Grant program, bioavtur development collaboration, and sustainable smallholder palm oil management initiatives.

## E. Jejak Langkah

### 2022

BPDPKS memperkuat peran strategisnya melalui dukungan program stabilisasi harga minyak goreng, kerja sama integrasi data sawit nasional bersama Badan Pusat Statistik (BPS), serta percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui kemitraan strategis antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan pekebun di berbagai daerah di Indonesia.

### 2023

BPDPKS memperkuat kontribusinya melalui peluncuran program Biodiesel B35, penguatan dukungan pendidikan dan pelatihan SDM sawit, promosi UMKM sawit, serta berbagai kolaborasi riset dan inovasi, sekaligus meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

### 2024

BPDPKS memperkuat transformasi melalui penguatan tata kelola dana perkebunan, dukungan energi terbarukan seperti biodiesel B40 dan bioavtur, serta percepatan hilirisasi sawit termasuk minyak makan merah dan produk turunan lainnya. Program Peremajaan Sawit Rakyat dan penguatan inovasi juga terus didorong untuk meningkatkan keberlanjutan industri.

Tahun ini menjadi momentum penting dengan terbitnya Perpres Nomor 132 Tahun 2024 yang mentransformasi BPDPKS menjadi BPDP, dengan perluasan mandat pengelolaan dana perkebunan mencakup tidak hanya sawit, tetapi juga kakao dan kelapa.

## E. Milestones

BPDPKS strengthened its strategic role through support for the cooking oil price stabilization program, collaboration on national palm oil data integration with Statistics Indonesia (BPS), and the acceleration of the Smallholder Replanting Program (PSR) through strategic partnerships involving government institutions, financial institutions, companies, and smallholders across various regions in Indonesia.

BPDPKS strengthened its contribution through the launch of the B35 Biodiesel program, expanded support for palm oil human resource education and training, promotion of palm oil MSMEs, as well as various research and innovation collaborations, while also receiving several national and international awards for its contribution to supporting a sustainable and globally competitive Indonesian palm oil industry.

BPDPKS strengthened its transformation through improved governance of plantation funds, support for renewable energy such as B40 biodiesel and bio-jet fuel, and the acceleration of palm oil downstreaming, including red cooking oil and other derivative products. The Smallholder Oil Palm Replanting Program and innovation initiatives were also reinforced to enhance sustainability across the industry.

This year also marked a key milestone with the issuance of Presidential Regulation No. 132 of 2024, transforming BPDPKS into BPDP and expanding its mandate to manage plantation funds not only for palm oil but also for cocoa and coconut.

## F. Pernyataan Keabsahan Data

Laporan Tahunan BPDP 2025 menggunakan terminologi BPDP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang mengatur transformasi dari BPDPKS menjadi BPDP yang efektif berlaku mulai Januari 2025. BPDP merupakan unit non-eselon yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari Laporan Keuangan Tahun 2025, Laporan Kinerja Tahun 2025, serta sumber informasi resmi lainnya untuk memastikan akurasi konsistensi dan akuntabilitas.

## F. Disclaimer & Limitations of Responsibility

The BPDP Annual Report 2025 uses the terminology BPDP in accordance with Presidential Regulation No. 132 of 2024, which mandates the transformation from BPDPKS to BPDP, effective as of January 2025. BPDP is a non-echelon unit directly under and accountable to the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, in accordance with applicable regulations. The data presented in this report are sourced from the 2025 Financial Report, the 2025 Performance Report, and other official institutional sources to ensure accuracy, consistency, and accountability.



# Daftar Isi Table of Content

## 00

Tim Penyusun Annual Report (02)

- a. Satu Dekade (07)
- b. Tema Visual (09)
- c. Tema Laporan (11)
- d. Kestinambungan Tema (13)
- e. Jejak Langkah (16)
- f. Pernyataan Keabsahan Data (19)

Annual Report 2025 Preparation Team (02)

- a. A Decade (07)
- b. Design Theme (09)
- c. Theme Report (11)
- d. Theme Community (13)
- e. Milestones (16)
- f. Disclaimer & Limitations of Responsibility (19)

## 01

- 1.1 Kinerja BPDP (31)
- 1.2 Gambaran Keuangan (35)
- 1.3 Peristiwa Penting (33)
- 1.4 Penghargaan (44)

- 1.1 BPDP Performance (21)
- 1.2 Financial Overview (30)
- 1.3 Significant Events (37)
- 1.4 Award (48)

## 02

- 2.1 Laporan Ketua Dewan Pengawas (51)
- 2.2 Laporan Direktur Utama (59)

- 2.1 Management Report (51)
- 2.2 President Director's Report (59)

# 03

- 3.1 Sejarah BPDP (66)
- 3.2 Logo BPDP (68)
- 3.3 Visi dan Misi (69)
- 3.4 Tugas dan Fungsi (70)
- 3.5 Layanan (71)
- 3.6 Struktur Organisasi (73)
- 3.7 Komite Pengarah (74)
- 3.8 Dewan Pengawas (78)
- 3.9 Komite Audit (88)
- 3.10 Direksi (91)
- 3.11 Kepala Satuan dan Kepala Divisi (98)
- 3.12 Pegawai (102)

- 3.1 History of BPDP (66)
- 3.2 BPDP Logo (68)
- 3.3 Vision and Mission (69)
- 3.4 Duties and Functions (70)
- 3.5 Service (71)
- 3.6 Organizational Structure (73)
- 3.7 Steering Committee (74)
- 3.8 Board of Supervisors (78)
- 3.9 Audit Committee (88)
- 3.10 Board of Directors (91)
- 3.11 Heads of Units and Heads of Divisions (99)
- 3.12 Employee (102)

# 04

- 4.1 Sekilas Perkebunan Indonesia 2025 (108)
- 4.2 Satu Dekade BPDP (112)
- 4.3 Kinerja Program Tahun 2025 (115)
- 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis (133)

- 4.1 Overview of Indonesian Plantations 2025 (108)
- 4.2 A Decade of BPDP (112)
- 4.3 Program Performance in 2025 (115)
- 4.4 Key Performance Indicators and Work Plan (133)

# 05

- 5.1 Sumber Daya Manusia (144)
- 5.2 Manajemen Risiko (154)
- 5.3 Satuan Pemeriksa Intern (163)
- 5.4 Teknologi dan Informasi (166)
- 5.5 Unit Pengadaan (171)
- 5.6 Keterbukaan Informasi (177)
- 5.7 Survei Kepuasan Pengguna Layanan (181)
- 5.8 Pengarusutamaan Gender (PUG) (184)

- 5.1 Human Resources (144)
- 5.2 Risk Management (154)
- 5.3 Internal Audit Unit (163)
- 5.4 Technology and Information (166)
- 5.5 Procurement Unit (171)
- 5.6 Information Disclosure (177)
- 5.7 Service User Satisfaction Survey (181)
- 5.8 Gender Mainstreaming (184)

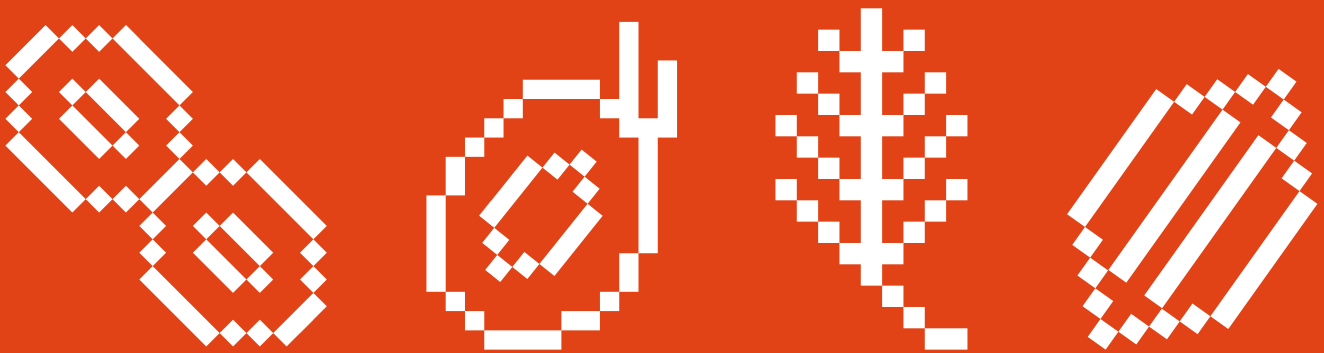
# 06

- 6.1 Laporan Realisasi Anggaran (190)
- 6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (192)
- 6.3 Neraca (194)
- 6.4 Laporan Operasional (196)
- 6.5 Laporan Arus Kas (198)
- 6.6 Laporan Perubahan Ekuitas (200)
- 6.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (202)

- 6.1 Budget Realization Report (190)
- 6.2 Statement of Changes in Budget Surplus Balance (192)
- 6.3 Balance Sheet (194)
- 6.4 Statement of Operations (196)
- 6.5 Statement of Cash Flows (198)
- 6.6 Statement of Changes in Equity (200)
- 6.7 Notes to the Financial Statements (202)

# Kinerja BPDP

BPDP terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional melalui berbagai program strategis. Fokus BPDP tidak hanya pada pembiayaan, tetapi juga pada penguatan ekosistem perkebunan secara menyeluruh.



## BPDP Performance

BPDP continues to strengthen its role in supporting the development of the national plantation sector through various strategic programs. Its focus extends beyond financing to fostering a more integrated and sustainable plantation ecosystem.

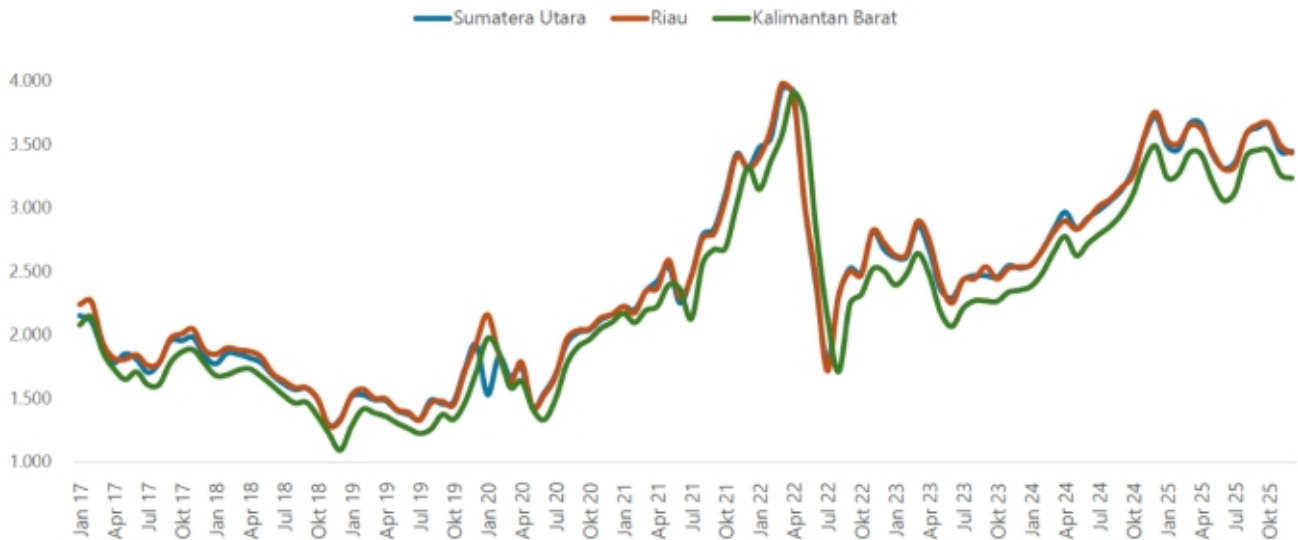
01

01

## KINERJA BPDP

# Harga Terjaga, Pekebun Sejahtera

## Stable Prices, Improved Smallholder Welfare



Rata-rata harga TBS dari 3 provinsi pada tahun 2017 sebesar Rp1.886/Kg, tumbuh sebesar 83% atau Rp3.442/Kg pada tahun 2025.

Sumber : Berdasarkan Penetapan Gubernur masing-masing provinsi (data diolah)

Sebelum implementasi program biodiesel yang didukung BPDP, harga TBS pekebun sawit cenderung rendah dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar ekspor. Pada tahun 2015, harga TBS di sejumlah sentra produksi tercatat hanya mencapai sekitar Rp1.700 per kilogram.

Seiring berkembangnya program biodiesel yang meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri, harga TBS menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Dalam periode 2021–2025, harga TBS di berbagai wilayah sentra produksi, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat, berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, bahkan beberapa kali mencapai kisaran Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram.

Perkembangan tersebut mencerminkan kontribusi program biodiesel dalam memperkuat permintaan domestik minyak sawit, menjaga stabilitas harga, serta mendukung peningkatan kesejahteraan pekebun sawit Indonesia.

The average FFB price across the three provinces was IDR 1,886 per kilogram in 2017 and increased by 83% to IDR 3,442 per kilogram in 2025.

Source : Based on Governor Decrees of the respective provinces (processed data).

Prior to the implementation of the biodiesel program supported by BPDP, Fresh Fruit Bunches (FFB) prices received by oil palm smallholders were relatively low and highly dependent on export market conditions. In 2015, FFB prices in several major production areas reached only around IDR 1,700 per kilogram.

As the biodiesel program expanded and increased domestic demand for palm oil, FFB prices demonstrated a significant upward trend. During the 2021–2025 period, FFB prices in key production regions, including North Sumatra, Riau, and West Kalimantan, remained substantially higher than in 2015, with prices on several occasions reaching approximately IDR 3,500 to IDR 4,000 per kilogram.

This development reflects the contribution of the biodiesel program in strengthening domestic palm oil demand, supporting price stability, and enhancing the welfare of Indonesian oil palm smallholders.

## KINERJA BPDP

# Membangun Ketahanan Energi, Menciptakan Nilai bagi Negeri

STRENGTHENING ENERGY SECURITY, CREATING VALUE FOR THE NATION



## Penghematan Devisa

# Rp722,9 T

mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat stabilitas neraca perdagangan nasional.

reducing reliance on imported fossil fuels while strengthening the stability of the national trade balance.



## Peningkatan Nilai Tambah

# Rp114,7 T

meningkatkan nilai tambah ekonomi dan industri sawit nasional serta memperkuat rantai pasok dalam negeri

increasing economic value-added in the national palm oil industry while strengthening domestic supply chains.



## Penyerapan Tenaga Kerja

# 10,9 juta orang

membuka lapangan kerja luas di sektor hulu, hilir, dan pendukung industri sawit nasional

creating employment opportunities across the upstream, downstream, and supporting sectors of the national palm oil industry.



## Pengurangan Emisi GRK

# 228,41 juta ton CO2

mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan transisi menuju energi yang lebih bersih

supporting emissions reduction targets and the transition toward cleaner energy.

## KINERJA BPDP

# Membangun Sumber Daya Manusia, Menguatkan Perkebunan

DEVELOPING HUMAN CAPITAL, STRENGTHENING THE PLANTATION SECTOR

## Penerima Beasiswa

# 13.265

mahasiswa  
(2015-2025)

Melalui Beasiswa SDM Perkebunan, ribuan generasi muda telah dipersiapkan menjadi talenta unggul yang siap mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing perkebunan Indonesia.

Through the Plantation Human Resources Scholarship Program, thousands of young Indonesians are being prepared to drive innovation, productivity, and sustainable growth in the plantation sector.

## Manfaat Penerima Beasiswa

Beasiswa mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, bantuan buku, dan dukungan akademik lainnya untuk menunjang keberhasilan studi penerima ditanggung BPDP.

BPDP covers tuition fees, living allowances, book assistance, and other academic support to help scholarship recipients succeed in their studies.

## Jenjang Pendidikan

# D1-D2-D3-S1

Berbagai jenjang pendidikan disediakan untuk menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di seluruh rantai nilai industri perkebunan.

Various levels of education are offered to develop human resources with the competencies required across the plantation industry value chain.

## Lembaga Pendidikan

# 42 kampus

Lembaga pendidikan penyelenggara Beasiswa SDM Perkebunan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda dari berbagai daerah.

Partner educational institutions are located across Indonesia, expanding access to education for young talents nationwide.

## Dana yang Tersalur

# Rp1,34 T

(2015-2025)

Total dana yang disalurkan untuk Program Beasiswa Perkebunan telah mendukung akses pendidikan tinggi dan pengembangan kompetensi generasi muda guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan.

Scholarship funding has expanded access to higher education and supported the development of young talent, strengthening human capital in Indonesia's plantation sector.



## KINERJA BPDP

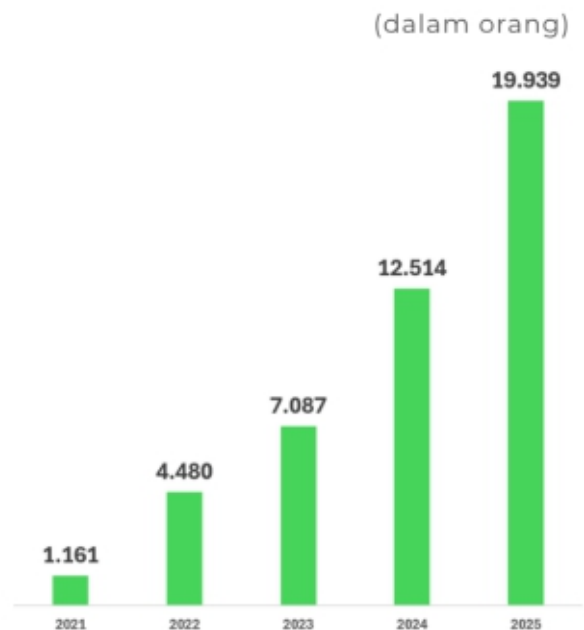
# Dampak yang Dihasilkan, Nilai yang Diciptakan

BPDP PERFORMANCE: IMPACT DELIVERED, VALUE CREATED

## PENGEMBANGAN SDM HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkebunan tercermin dari lonjakan jumlah peserta program pengembangan SDM yang mencapai **1.617 persen dalam lima tahun terakhir**.

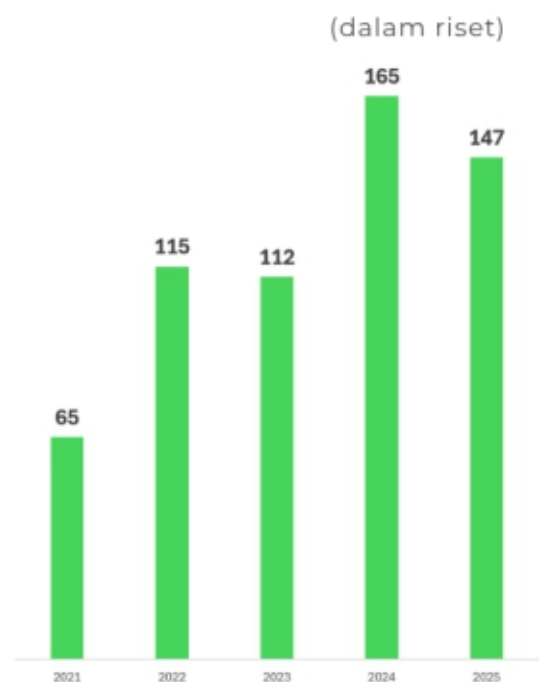
A strong commitment to developing a skilled and competitive plantation workforce is **reflected in the 1,617 percent increase** in participation in human resource development programs over the past five years.



## PENELITIAN & PENGEMBANGAN RESEARCH AND DEVELOPMENT

Riset menjadi salah satu motor utama transformasi sektor perkebunan. Melalui program ini, pengembangan riset terus didorong secara berkelanjutan, yang tercermin dari pertumbuhan dukungan program sebesar **126 persen dalam lima tahun terakhir**.

Research serves as a key driver of transformation in the plantation sector. Through this program, research and innovation have been continuously promoted, as reflected in the **126 percent growth in program support over the past five years**.



## KINERJA BPDP

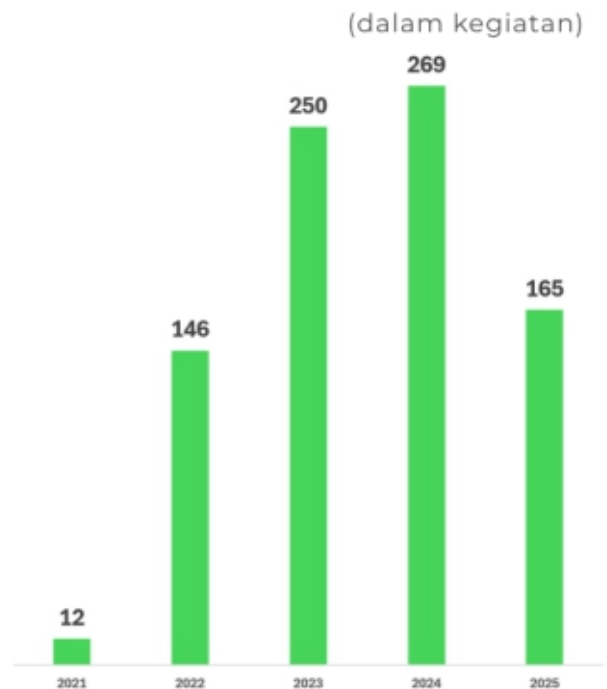
# Dampak yang Dihasilkan, Nilai yang Diciptakan

BPDP PERFORMANCE: IMPACT DELIVERED, VALUE CREATED

## PROMOSI PROMOTION

Jumlah kegiatan promosi meningkat **1.275 persen** dalam lima tahun terakhir, dari 12 menjadi 165 kegiatan, sebagai upaya memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

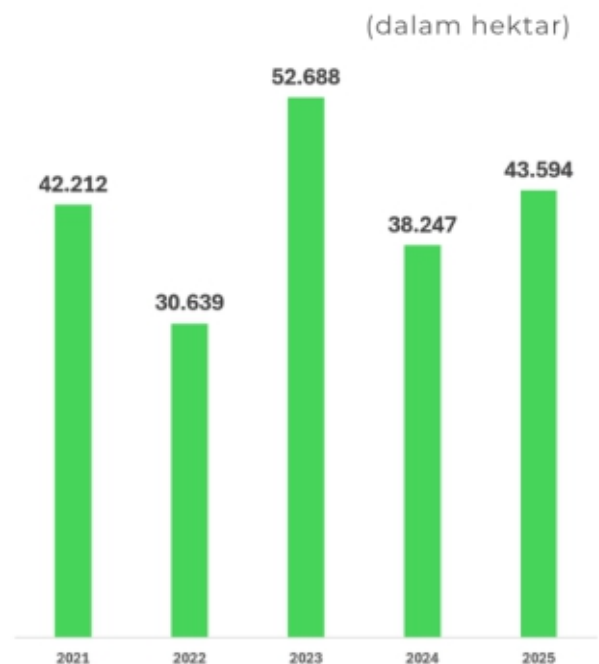
The number of promotional activities increased by **1,275 percent over the past five years, from 12 to 165 activities**, reflecting efforts to expand information dissemination and outreach to the public and key stakeholders.



## PEREMAJAN REPLANTING

Dalam periode 2021–2025, realisasi peremajaan sawit rakyat **terus meningkat sebagai hasil penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan**. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan petani, proses administrasi yang harus dipenuhi, serta kondisi perkebunan yang beragam di setiap wilayah

During the 2021–2025 period, the realization of the Smallholder Replanting Program **continued to increase, driven by stronger collaboration among stakeholders**. Nevertheless, program implementation continued to face several challenges, including smallholder readiness, administrative requirements, and varying plantation conditions across regions.



## KINERJA BPDP

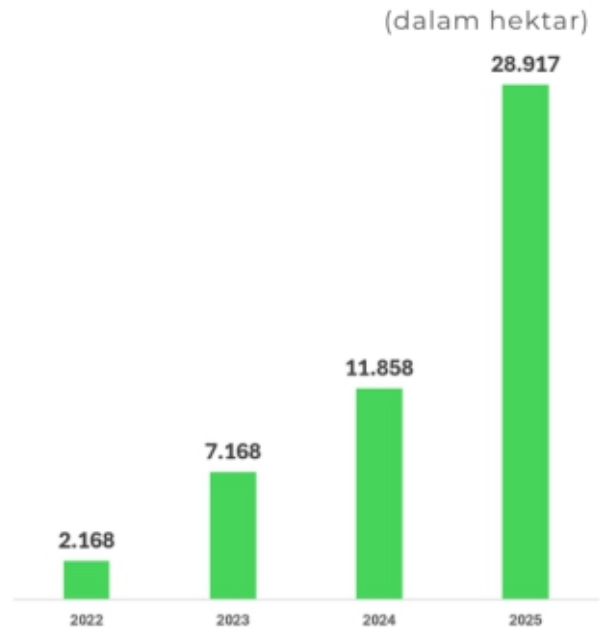
# Dampak yang Dihasilkan, Nilai yang Diciptakan

BPDP PERFORMANCE: IMPACT DELIVERED, VALUE CREATED

### SARANA DAN PRASARANA FACILITIES AND INFRASTRUCTURE

Dukungan sarana dan prasarana perkebunan terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan. Dalam lima tahun terakhir, realisasi program penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung **meningkat sebesar 1.234 persen.**

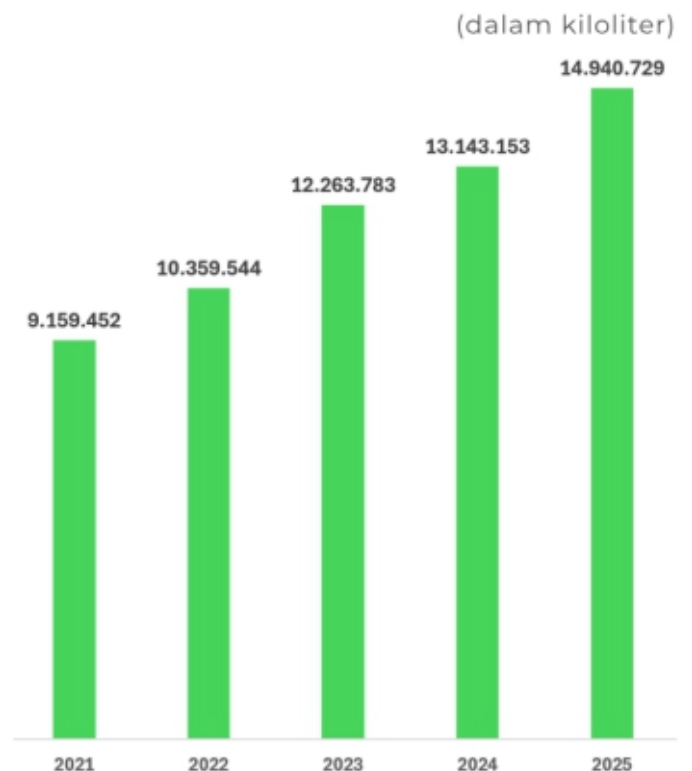
Support for plantation facilities and infrastructure has continued to be strengthened to improve productivity and operational efficiency. Over the past five years, the realization of programs providing facilities and supporting infrastructure **increased by 1,234 percent.**



### INSENTIF BIODIESEL BIODIESEL INCENTIVES

Realisasi program insentif biodiesel **pada tahun 2025 meningkat sekitar 63 persen dibandingkan tahun 2021.** Peningkatan ini mencerminkan komitmen dalam mendukung pengembangan energi terbarukan serta memperkuat ketahanan energi nasional.

The realization of the biodiesel incentive program in 2025 **increased by approximately 63 percent compared to 2021.** This growth reflects a strong commitment to advancing renewable energy development and strengthening national energy security.



## 1.1 Kinerja BPDP

Periode 2021–2025 menunjukkan semakin kuatnya peran BPDP dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional. Melalui berbagai program strategis, BPDP tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada penguatan ekosistem perkebunan secara menyeluruh.

Upaya tersebut tercermin dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan riset dan inovasi, serta perluasan promosi komoditas perkebunan di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, BPDP juga konsisten mendukung program peremajaan perkebunan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penyaluran insentif biodiesel sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan.

Secara umum, berbagai program yang dijalankan menunjukkan capaian yang terus meningkat, bahkan pada sejumlah aspek telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen BPDP dalam memperluas manfaat program secara lebih inklusif, sekaligus memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor perkebunan nasional.

### 1.1.2 Pengembangan SDM

Program Pengembangan SDM mencatat peningkatan realisasi yang sangat signifikan selama periode 2021–2025. Jumlah peserta meningkat dari 1.161 orang pada tahun 2021 menjadi 19.939 orang pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 1.617 persen.

## 1.1 BPDP Performance

The 2021–2025 period reflects BPDP’s increasingly strategic role in supporting the development of Indonesia’s plantation sector. Through a range of key programs, BPDP has expanded its focus beyond financing, toward strengthening the overall plantation ecosystem.

These efforts are reflected in the enhancement of human resource capacity, the strengthening of research and innovation, and the broader promotion of plantation commodities in both domestic and global markets. At the same time, BPDP has consistently supported smallholder plantation replanting programs, the provision of supporting infrastructure and facilities, and the distribution of biodiesel incentives as part of a broader agenda for sustainable energy transition.

Overall, program implementation during this period has shown continuously improving performance, with several initiatives exceeding their planned targets. This demonstrates BPDP’s commitment to expanding program benefits in a more inclusive manner, while strengthening the competitiveness and sustainability of the national plantation sector.

### 1.1.2 Human Resource Development

The Human Resource Development Program recorded a significant increase in realization over the 2021–2025 period. The number of participants rose from 1161 in 2021 to 19939 in 2025, representing an increase of approximately 1617 percent.

### 1.1.3 Pengembangan SDM

Peningkatan ini mencerminkan komitmen BPDP dalam memperluas jangkauan program pengembangan kapasitas secara lebih inklusif di sektor perkebunan. Tidak hanya dari sisi jumlah, tren tersebut juga menunjukkan semakin luasnya dampak program dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga kerja di sektor perkebunan.

Secara keseluruhan, perluasan partisipasi ini menegaskan peran BPDP dalam membangun sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing, yang pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas serta keberlanjutan sektor perkebunan nasional.

### 1.1.4 Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan mencatat peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2021–2025. Jumlah kegiatan riset meningkat dari 65 penelitian pada tahun 2021 menjadi 147 penelitian pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 126 persen.

Tren peningkatan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperkuat peran riset dan inovasi sebagai salah satu pendorong utama pengembangan sektor perkebunan. Peningkatan jumlah riset juga menunjukkan semakin luasnya keterlibatan peneliti dan lembaga dalam menghasilkan solusi berbasis pengetahuan di berbagai bidang, baik hulu maupun hilir perkebunan.

### 1.1.3 Human Resource Development

This achievement reflects a commitment to expanding the reach of capacity building programs in a more inclusive and equitable manner within the plantation sector. Beyond quantitative growth, this trend also demonstrates the broader impact of the program in strengthening skills, knowledge, and competencies of the workforce in the plantation industry.

Overall, the increasing participation underscores the role in developing a more capable and competitive human resource base, which serves as a key foundation for improving productivity and ensuring the long term sustainability of the national plantation sector.

### 1.1.4 Research and Development

The Research and Development Program recorded a consistent and substantial increase in realization during the 2021–2025 period. The number of research activities grew from 65 studies in 2021 to 147 studies in 2025, representing an increase of approximately 126 percent.

This upward trend reflects a strong institutional commitment to strengthening the role of research and innovation as a key driver of plantation sector development. The expansion of funded research also indicates broader engagement of researchers and institutions in generating knowledge-based solutions across various thematic areas, including upstream and downstream plantation activities.

Overall, this increase demonstrates a sustained effort to ensure that research outputs are not only expanded in number, but also increasingly relevant and applicable in supporting innovation, productivity enhancement, and the long-term development of the plantation sector.

### 1.1.5 Promosi

Program Promosi menunjukkan pertumbuhan realisasi yang signifikan selama periode 2021–2025. Jumlah kegiatan promosi meningkat dari 12 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 165 kegiatan pada tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan semakin intensifnya pelaksanaan berbagai aktivitas promosi yang mencakup partisipasi dalam pameran, kampanye publik, diseminasi informasi, serta berbagai forum promosi komoditas perkebunan. Perluasan kegiatan tersebut juga menunjukkan meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan branding dan *positioning* komoditas perkebunan di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, ekspansi kegiatan promosi turut memperluas jangkauan komunikasi dan edukasi kepada berbagai target *audiens*, termasuk pelaku industri, masyarakat, dan mitra strategis, melalui berbagai kanal dan *platform* yang semakin beragam.

### 1.1.6 Peremajaan

Program Peremajaan menunjukkan kinerja yang dinamis selama periode 2021–2025. Realisasi meningkat dari 42.212 hektare pada tahun 2021 menjadi 43.594 hektare pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 3,3 persen.

Peningkatan yang relatif terbatas ini juga mencerminkan bahwa pelaksanaan program dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional di lapangan, termasuk kesiapan petani, proses administrasi, serta persyaratan teknis dalam kegiatan peremajaan perkebunan. Meskipun demikian, program tetap berjalan secara berkelanjutan di berbagai wilayah penerima manfaat.

Dari sisi pelaksanaan, program secara konsisten difokuskan pada keberlanjutan pembaruan kebun rakyat, terutama pada area dengan tanaman yang sudah tidak produktif. Kegiatan implementasi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan dan standar teknis peremajaan.

### 1.1.5 Promotion

The Promotion Program recorded strong growth in realization over the 2021–2025 period. The number of promotional activities increased from 12 activities in 2021 to 165 activities in 2025.

This increase reflects the more intensive implementation of various promotional initiatives, including participation in exhibitions, public campaigns, information dissemination, and a range of forums supporting plantation commodities. The expansion of activities also indicates broader stakeholder involvement in strengthening the branding and positioning of plantation commodities in both domestic and international markets.

In addition, the growth in promotional activities has expanded the reach of communication and outreach efforts to various target audiences, including industry players, the public, and strategic partners, through increasingly diverse channels and platforms.

### 1.1.6 Replanting

The Replanting Program showed dynamic performance over the 2021–2025 period. Realization increased from 42,212 hectares in 2021 to 43,594 hectares in 2025, reflecting a growth of approximately 3.3 percent.

The relatively moderate increase in realization indicates that program implementation was influenced by various operational and field-level considerations, including readiness of smallholder participants, administrative processes, and technical requirements in plantation rejuvenation activities. Despite this, the program continued to be implemented in a structured manner across supported regions.

In terms of scope, the program consistently focused on maintaining continuity in plantation renewal efforts, particularly among smallholders, where aging plantation areas remain a key challenge. Implementation activities also involved coordination with relevant stakeholders to ensure alignment with field conditions and technical standards in replanting execution.

### 1.1.7 Sarana dan Prasarana

Program Sarana dan Prasarana menunjukkan peningkatan realisasi yang sangat signifikan sepanjang periode 2022–2025. Realisasi dukungan meningkat dari 2.168 hektar pada 2022 menjadi 7.168 hektare pada 2023, kemudian naik menjadi 11.858 hektare pada 2024, dan mencapai 28.917 hektare pada 2025.

Secara keseluruhan, realisasi program ini tumbuh sekitar 1.234 persen dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya dukungan BPDP dalam penyediaan sarana, prasarana, serta infrastruktur pendukung untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.

### 1.1.8 Insentif Biodiesel

Program Insentif Biodiesel menunjukkan tren peningkatan realisasi yang konsisten sepanjang periode 2021–2025. Realisasi penyaluran biodiesel meningkat dari 9.159.452 kiloliter (kL) pada tahun 2021 menjadi 10.359.544 kL pada 2022, kemudian naik menjadi 12.263.783 kL pada 2023 dan 13.143.153 kL pada 2024. Pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat hingga mencapai 14.940.729 kL. Secara keseluruhan, realisasi program ini tumbuh sekitar 63 persen dibandingkan tahun 2021.

Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya pelaksanaan kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Selain itu, tren pertumbuhan yang konsisten menunjukkan meningkatnya skala implementasi program seiring dengan kebutuhan energi dan penguatan ekosistem biodiesel di tingkat nasional.

### 1.1.7 Facilities and Infrastructure

The Infrastructure and Facilities Program recorded a highly significant increase in realization over the 2022–2025 period. Support realization rose from 2,168 hectares in 2022 to 7,168 hectares in 2023, further increased to 11,858 hectares in 2024, and reached 28,917 hectares in 2025. Overall, the program grew by approximately 1,234 percent compared to 2022.

This achievement reflects the strengthening support in the provision of facilities, infrastructure, and enabling assets aimed at enhancing plantation productivity. The continuous increase in realization also indicates expanded implementation scale and broader coverage of supported areas over the period.

### 1.1.8 Biodiesel Incentives

The Biodiesel Incentive Program recorded a consistent upward trend in realization over the 2021–2025 period. Biodiesel distribution increased from 9,159,452 kL in 2021 to 10,359,544 kL in 2022, rose further to 12,263,783 kL in 2023 and 13,143,153 kL in 2024. In 2025, realization continued to increase, reaching 14,940,729 kL. Overall, the program grew by approximately 63 percent compared to 2021.

This increase reflects the strengthening implementation of policies supporting the utilization of palm-based biofuel in advancing the national energy transition agenda. In addition, the sustained growth trend indicates expanding program scale in line with rising energy demand and the continued development of the national biodiesel ecosystem.

## 1.2 Gambaran Keuangan

## 1.2 Financial Overview

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase	Jumlah
<b>A Saldo Awal 2025</b>					<b>36.127.929.909.763</b>
<b>B Penerimaan</b>		<b>25.148.875.848.000</b>	<b>33.237.094.153.759</b>	<b>132,16%</b>	<b>33.237.094.153.759</b>
1	Pungutan Ekspor	22.818.319.774.000	31.505.165.045.225	138,07%	
2	Pengelolaan Dana	2.330.556.074.000	1.620.692.017.397	69,54%	
	- Bunga Deposito		1.160.238.011.429		
	- Jasa Giro		68.955.765.005		
	- Bunga SUN		391.498.240.963		
3	Pengembalian Belanja TAYL	-	93.876.574.443	0,00%	
4	Pendapatan Lain-lain	-	17.360.516.693	0,00%	
<b>C Belanja</b>		<b>55.392.103.313.000</b>	<b>49.822.564.405.090</b>	<b>89,95%</b>	<b>(49.822.564.405.090)</b>
1	Insentif Biodiesel dan Hilirisasi Perkebunan	50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78%	
2	Peremajaan	3.424.254.795.000	1.475.206.079.815	43,08%	
3	Riset	213.814.987.000	115.353.063.261	53,95%	
4	Sarana & Prasarana	422.319.019.000	297.565.342.763	70,46%	
5	Promosi dan Kemitraan & Peraturan Hukum	181.340.401.000	78.592.279.721	43,34%	
6	Pengembangan SDM	623.980.611.000	524.480.206.783	84,05%	
7	Penghimpunan dan Pengelolaan Dana	8.018.710.000	4.596.629.726	57,32%	
8	Dukungan Manajemen	218.374.790.000	153.550.085.347	38,45%	
<b>D Penyetoran Ke Kas Negara untuk DBH Sawit</b>			<b>1.030.201.031.120</b>		<b>(1.030.201.031.120)</b>
<b>E Saldo per 31 Desember 2025</b>					<b>18.512.258.627.311</b>

Pada tahun 2025, kinerja keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja yang tetap solid dan terjaga.

Dari sisi pendapatan, yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, realisasi pendapatan mencapai Rp33,23 triliun atau 132,16 persen dari target sebesar Rp25,15 triliun. Pendapatan ini terdiri dari pungutan ekspor, hasil pengelolaan dana, pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya, serta penerimaan lainnya.

Sementara itu, total belanja terealisasi sebesar Rp49,82 triliun atau 89,95 persen dari pagu anggaran Rp55,39 triliun. Belanja tersebut didominasi oleh program layanan sebesar Rp49,66 triliun, sedangkan belanja dukungan manajemen tercatat sebesar Rp158,14 miliar.

In 2025, the financial performance of the Plantation Fund Management Agency reflects sound and well-managed revenue and expenditure realization.

On the revenue side, which consists of Non-Tax State Revenue, realization reached IDR 33.23 trillion or 132.16 percent of the target of IDR 25.15 trillion. This revenue comprises export levy receipts, returns from fund management, prior-year budget refunds, and other income sources.

Meanwhile, total expenditure amounted to IDR 49.82 trillion or 89.95 percent of the allocated budget of IDR 55.39 trillion. The expenditure was primarily driven by program services at IDR 49.66 trillion, while management support expenditures accounted for IDR 158.14 billion.

Pada tahun yang sama terdapat setoran ke kas negara sebesar Rp1,03 triliun yang berasal dari skema bagi hasil pungutan ekspor komoditas kelapa sawit dan turunannya, sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023.

Dari sisi posisi keuangan, saldo awal tahun 2025 tercatat sebesar Rp36,12 triliun. Setelah memperhitungkan penggunaan saldo anggaran lebih, SiLPA, serta penyesuaian terkait setoran bagi hasil, posisi akhir Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp18,51 triliun.

In the same year a state revenue transfer of IDR 1.03 trillion was recorded, derived from the palm oil export levy revenue-sharing scheme, in accordance with Minister of Finance Regulation No. 91 of 2023.

From a financial position perspective, the opening balance in 2025 stood at IDR 36.12 trillion. After accounting for the use of budget surplus balance (SAL), the budget financing surplus (SiLPA), and related adjustments, the year-end budget balance as of 31 December 2025 was recorded at IDR 18.51 trillion.



## 1.3 Peristiwa Penting | Significant Events

### Januari | January

Pembukaan *Grant Riset Sawit 2025*, Program Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa aktif tingkat Sarjana atau Diploma dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh menjadi lebih aplikatif dalam bentuk penelitian untuk mewujudkan sawit Indonesia yang berkelanjutan.

The opening of the Palm Oil Research Grant 2025, a student-level palm oil research competition program, aims to provide opportunities for active undergraduate and diploma students from various universities across Indonesia to apply the knowledge they have gained into more practical research, contributing to the realization of a sustainable Indonesian palm oil industry.



### Februari | February

Penandatanganan Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Batch I, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak untuk PSR & Sarana Prasarana (Sarpras) Gelombang I Tahun 2025 pada 5-7 Februari 2025 di Jakarta.

The signing of PSR Batch I refers to the signing of a three-party Cooperation Agreement (PKS) for the distribution of Smallholder Oil Palm Replanting (PSR) funds and Infrastructure and Facilities (Sarpras) Batch I of 2025, held on 5-7 February 2025 in Jakarta.



19 Februari 2025, BDPKS mengadakan rapat monitoring dan evaluasi program insentif biodiesel di Jakarta. Acara ini membahas pencapaian 2024 dan target 2025 dalam mendukung energi berkelanjutan berbasis sawit.

On 19 February 2025, BDPKS held a monitoring and evaluation meeting of the biodiesel incentive program in Jakarta, which discussed the 2024 achievements and the 2025 targets in supporting sustainable palm oil-based energy.



## Maret | March

Peluncuran Aplikasi Kemitraan dan Promosi Perkebunan Punya Kita (AKSI NYATA) sebagai pemanfaatan aplikasi sebagai pintu penerimaan kegiatan kemitraan dan promosi secara digital di tahun 2025.

The launch of the Aplikasi Kemitraan dan Promosi Perkebunan Punya Kita (AKSI NYATA), serves as a digital platform for the submission and management of partnership and promotional activities in 2025.



Showcase & Outlook UMKM Sawit 2025 diselenggarakan pada 12 Maret 2025 di Jakarta sebagai bagian dari upaya tidak hanya melahirkan pelaku usaha berbasis kelapa sawit, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar bagi UMKM sawit.

Showcase & Outlook UMKM Sawit 2025 was held on 12 March 2025 in Jakarta as part of efforts not only to foster palm oil-based entrepreneurs, but also to strengthen the sustainable development of MSMEs through training, mentoring, and facilitation of promotion and market expansion for palm oil MSMEs.



## April | April

Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk Gelombang IV Tahun 2025 di Jakarta.

The signing of the Tripartite Cooperation Agreement (PKS) for the distribution of Smallholder Oil Palm Replanting (PSR) funds Batch IV of 2025 was held in Jakarta.



BPDP bekerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) melaksanakan pelepasan ekspor produk Lidi Sawit yang diproduksi alumni Inkubasi Bisnis UMKM Sawit BPDP. Kegiatan ini digelar di halaman Istana Bung Hatta Bukittinggi pada Jumat, 25 April 2025.

BPDP in collaboration with Universitas Andalas (Unand) facilitated the export of palm frond stick products produced by alumni of the BPDP Palm Oil MSME Business Incubation Program, with the event held at the Bung Hatta Palace courtyard in Bukittinggi on Friday, 25 April 2025.



## Mei | May

BPDP bersama Asosiasi Inventor Indonesia (All) mempromosikan hasil riset dari Program Grant Riset Sawit (GRS) BPDP yang bersifat aplikatif untuk mendukung peningkatan produktivitas petani. Inisiatif ini bertujuan agar hasil riset tersebut dapat diimplementasikan secara langsung oleh para pengguna, khususnya petani dan pelaku UMKM kelapa sawit.

BPDP in collaboration with the Indonesian Inventors Association (All) promoted the research outputs of the BPDP Palm Oil Research Grant Program (GRS), which are designed to be applicable in supporting increased farmer productivity. This initiative aims to ensure that the research results can be directly implemented by end users, particularly farmers and palm oil MSME actors.



Program Beasiswa Sawit dibuka dengan kuota sebanyak 4.000 mahasiswa. Para penerima beasiswa akan ditempatkan di berbagai perguruan tinggi yang telah bermitra dengan BPDP di seluruh Indonesia.

The Palm Oil Scholarship Program was opened with a quota of 4,000 students. Scholarship recipients are placed in various universities that have partnered with BPDP across Indonesia.



Penandatanganan perjanjian kerjasama program pelatihan pengembangan SDM PKS Tahun 2025. Program ini akan menyasar 10.786 peserta dari 17 provinsi dan 40 kabupaten, bekerja sama dengan 18 lembaga pelatihan terpilih.

The signing of the cooperation agreement for the Palm Oil Human Resource Development Training Program 2025 targets 10,786 participants from 17 provinces and 40 regencies, in collaboration with 18 selected training institutions.



## Juni | June

Tanggal 10 Juni 2025 dirayakan sebagai satu dekade perjalanan BPDP. Sebagai pengelola dana yang tepercaya, BPDP berperan penting dalam mendorong pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Di ulang tahun ini mengusung tema Kontribusi Nyata untuk Keberlanjutan.

10 June 2025 marked a decade of BPDP's journey as a trusted fund manager, playing a key role in driving the sustainable development of palm oil as one of Indonesia's strategic commodities, with the anniversary carrying the theme Real Contribution for Sustainability.



## Juni | June

Sesuai dengan arahan PP 132 Tahun 2024, BPDP melakukan restrukturisasi organisasi. Pembagian yang lebih jelas antara sektor hulu dan hilir, serta penguatan fungsi strategis seperti hukum, komunikasi, dan teknologi informasi, menjadi bagian penting dari langkah perubahan struktur organisasi ini.

In accordance with Government Regulation No. 132 of 2024, BPDP undertook an organizational restructuring. A clearer division between upstream and downstream sectors, along with the strengthening of strategic functions such as legal affairs, communications, and information technology, forms an integral part of this organizational transformation.



Peluncuran Katalog 100 Produk UKM Sawit dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) kelapa sawit, BPDP menyelenggarakan kegiatan Launching dan Diseminasi Katalog 100 Produk UKM Sawit Tahun 2025 di Aula BPDP, Gedung Surachman Tjokrodisurjo pada tanggal 19 Juni 2025.

The launch of the 100 Palm Oil MSME Products Catalogue was organized as part of efforts to support the development and empowerment of palm oil-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs), through the Launching and Dissemination of the 2025 Palm Oil MSME Products Catalogue held at the BPDP Hall, Surachman Tjokrodisurjo Building on 19 June 2025.



## Juli | July

Seiring perubahan nama lembaga dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sesuai amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2024, akun media sosial BPDP turut bertransformasi untuk mencerminkan mandat baru dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan kakao, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkini terkait ketiga komoditas unggulan tersebut.

In line with the institutional name change from the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPD PKS) to the Plantation Fund Management Agency (BPDP), as mandated by Presidential Regulation No. 132 of 2024, BPDP's social media accounts have also been transformed to reflect its expanded mandate in managing plantation funds for palm oil, coconut, and cocoa, enabling the public to access the latest information on these three key commodities.



## Juli | July

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman memimpin pertemuan untuk membahas hasil kajian yang mendukung persiapan implementasi pencampuran Bahan Bakar Nabati sebanyak 50% kedalam Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (B50). Pertemuan ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk membahas dinamika pasokan dan permintaan minyak kelapa sawit di Indonesia dalam konteks rencana implementasi kebijakan biodiesel B50.

The President Director of BPDP, Eddy Abdurrachman, chaired a meeting to discuss study results supporting the preparation for the implementation of a 50 percent blending of biofuel into diesel fuel (B50). The meeting was held as a strategic forum to address the dynamics of palm oil supply and demand in Indonesia in the context of the planned implementation of the B50 biodiesel policy.



BPDP menyelenggarakan lomba foto untuk meningkatkan minat dan partisipasi para pegiat fotografi dan dokumentasi dalam mengangkat komoditas sawit, kakao, dan kelapa.

BPDP organized a photo competition to enhance interest and participation among photography and documentation enthusiasts in highlighting palm oil, cocoa, and coconut commodities.



BPDP berpartisipasi dalam Festival Cokelat 2025, di mana para pelaku perkebunan kakao menyampaikan harapan terhadap keberlanjutan berbagai program penyaluran dana di sektor hulu, khususnya dukungan sarana dan prasarana perkebunan kakao yang dibutuhkan oleh para pekebun, termasuk di wilayah Gunungkidul.

BPDP participated in the Chocolate Festival 2025, where cocoa sector stakeholders expressed expectations for the continuity of various funding distribution programs in the upstream sector, particularly support for plantation infrastructure and facilities needed by cocoa farmers, including those in the Gunungkidul region.



## Agustus | August

Katalis Merah Putih dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang merupakan hasil kolaborasi riset dengan dukungan pendanaan BPDP. Riset ini bertajuk Inovasi Lanjut Katalis dan Teknologi Bensin Sawit serta Pengembangan Produksi Percontohan Mix Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit.

Katalis Merah Putih from Institut Teknologi Bandung (ITB) is a research outcome of a collaborative project supported by BPDP funding. The research is titled Advanced Catalyst Innovation and Palm-Based Gasoline Technology, as well as the Development of Pilot Production for Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) and Healthy Edible Oil from Palm Oil.



## Agustus | August

Sesuai komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG), BPDP turut mendukung kegiatan bertajuk “Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan” yang digelar oleh GAPKI Sumsel pada 30–31 Juli 2025 di Palembang.

In line with its commitment to Gender Mainstreaming (PUG), BPDP supported the event titled “Advocacy and Protection of Women Workers in the Palm Oil Plantation Sector in South Sumatra,” organized by GAPKI South Sumatra on 30–31 July 2025 in Palembang.



BPDP menggelar Workshop Penyaluran Dana Pola Kemitraan bersama para pemangku kepentingan sektor perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang berlangsung di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma (BRMP Palma) Manado ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sekaligus memperkenalkan mekanisme penyaluran dana kemitraan kepada pelaku sektor hulu perkebunan kelapa.

BPDP organized a Workshop on Partnership Scheme Fund Distribution with stakeholders in the coconut plantation sector in North Sulawesi Province. Held at the Palm Plant Breeding and Testing Center (BRMP Palma) in Manado, the event aimed to gather stakeholders' aspirations while introducing the mechanisms for partnership fund distribution to upstream coconut plantation actors.



## Agustus | August

BPDP berpartisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 pada 28–30 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang, yang dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan berperan dalam memperkenalkan program pengembangan komoditas perkebunan serta memperkuat kemitraan dan hilirisasi sawit, kelapa, dan kakao untuk mendukung penguatan ekonomi daerah.

BPDP participated in the Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 held on 28–30 August 2025 at ICE BSD, Tangerang, which was officially opened by President Prabowo Subianto, by playing an active role in introducing plantation commodity development programs and strengthening partnerships and downstreaming initiatives for palm oil, coconut, and cocoa to support regional economic development.



## September | September

BPDP mengadakan “Workshop Pengenalan Industri Sawit” bagi peserta Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang perkebunan dan industri kelapa sawit sebelum mereka melakukan riset. Workshop dihadiri oleh 114 peserta yang berasal dari 32 universitas di seluruh wilayah di Indonesia.

BPDP organized a “Palm Oil Industry Introduction Workshop” for participants of the 2025 Student Research Competition, aimed at providing foundational knowledge on the palm oil plantation and industry prior to conducting their research. The workshop was attended by 114 participants from 32 universities across Indonesia.



Sebanyak 4.000 penerima Beasiswa Sawit Nasional 2025 telah memulai pendidikan, yang ditandai dengan seremoni pembukaan melalui kuliah umum oleh Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, di Politeknik LPP.

A total of 4,000 recipients of the 2025 National Palm Oil Scholarship have commenced their studies, marked by an opening ceremony featuring a public lecture delivered by the President Director of BPDP, Eddy Abdurrachman, at Politeknik LPP.



## September | September

BPDP bekerja sama dengan LKP Garini Halim menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas selama dua hari, 14–15 September 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen BPDP dalam mendorong pemberdayaan kelompok disabilitas melalui pengembangan keterampilan berbasis komoditas perkebunan strategis Indonesia, yakni sawit, kakao, dan kelapa.

BPDP, in collaboration with LKP Garini Halim, conducted a two-day skills training program for persons with disabilities on 14–15 September 2025. This initiative reflects BPDPs commitment to empowering persons with disabilities through skills development based on Indonesias strategic plantation commodities, namely palm oil, cocoa, and coconut.



Melalui Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS), BPDP menggelar Kuliah Umum Serentak di enam kampus di Sumatera Utara, yaitu ITS, UISU, UNPRI, PTKI, POLBANGTAN Medan, dan UTND.

Through the Palm Oil Plantation Human Resource Development Program (SDM PKS), BPDP organized a simultaneous public lecture across six universities in North Sumatra, namely ITS, UISU, UNPRI, PTKI, POLBANGTAN Medan, and UTND.



## Oktober | October

BPDP menghadirkan produk-produk unggulan dari pelaku UKM sawit di acara Inacraft. Produk yang dipamerkan BPDP merupakan bagian dari Katalog 100 Produk UKM Kelapa Sawit edisi kedua. Katalog ini menampilkan hasil inovasi UMKM dan koperasi petani sawit dari berbagai daerah.

BPDP showcased superior products from palm oil MSME and cooperative actors at the Inacraft exhibition. The products presented are part of the second edition of the 100 Palm Oil MSME Products Catalogue, which features innovative products from palm oil small and medium enterprises and farmer cooperatives across various regions.

## Oktober | October

BPDP menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan industri strategis nasional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pindad dan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis, 16 Oktober 2025 di Divisi Munisi PT Pindad, Turen, Malang. Kerja sama ini berfokus pada pendanaan pembangunan fasilitas bahan baku industri pertahanan serta penguatan riset dan pengembangan teknologi manufaktur dalam negeri.

BPDP reaffirmed its commitment to supporting the development of national strategic industries through the signing of a Cooperation Agreement with PT Pindad and Institut Teknologi Bandung (ITB) on Thursday, 16 October 2025 at the PT Pindad Munitions Division in Turen, Malang. The collaboration focuses on financing the development of industrial raw material facilities for the defense sector, as well as strengthening research and development in domestic manufacturing technology.



BPDP kembali menunjukkan perannya dalam mempromosikan komoditas unggulan Indonesia di kancah global melalui partisipasinya di Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 15–19 Oktober 2025. Ajang yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ini menjadi salah satu pameran dagang terbesar di Asia, dengan fokus memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar dunia.

BPDP further demonstrated its role in promoting Indonesia's leading commodities on the global stage through its participation in Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, held at ICE BSD City, Tangerang, on 15–19 October 2025. The event, officially opened by the Coordinating Minister for Food Affairs, Zulkifli Hasan, is recognized as one of the largest trade exhibitions in Asia, with a focus on introducing Indonesian products to global markets.



## November | November

BPDP terus memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi muda Indonesia melalui Program Pendidikan Pengembangan SDM Perkebunan atau Beasiswa Sawit. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), ini juga menjadi bagian dari upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan di sektor perkebunan.

BPDP continues to expand educational opportunities for Indonesia's younger generation through the Human Resource Development Education Program or Palm Oil Scholarship Program. The socialization activity held in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT), is also part of Gender Mainstreaming (PUG) efforts to ensure equal access to education for both men and women in the plantation sector.



## November | November

Pada ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat program biodiesel sebagai strategi ketahanan energi dan stabilisasi industri sawit nasional.

At the Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) in Bali, the President Director of the Plantation Fund Management Agency (BPDP), Eddy Abdurrachman, reaffirmed the government's commitment to strengthening the biodiesel program as a strategy for energy security and the stabilization of the national palm oil industry.



Bekerjasama dengan BPDP, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan “SinaraFest 2025: Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan” di Aula Kanwil DJPb Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara sektor keuangan negara dan pelaku usaha perkebunan untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM berbasis komoditas sawit, kelapa, dan kakao.

In collaboration with BPDP, the Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) of West Java Province organized “SinaraFest 2025: Synergy of Plantation and Treasury” at the West Java DJPb Regional Office Hall. The event served as a platform for collaboration between the state financial sector and plantation business actors to enhance the capacity of MSMEs based on palm oil, coconut, and cocoa commodities.



BPDP menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan Program Pengembangan Perkebunan Kelapa di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara pada 13 November 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pekebun dalam mendukung program peremajaan kelapa rakyat serta program sarana dan prasarana kelapa.

BPDP organized an Institutional Strengthening Workshop for the Coconut Plantation Development Program at the Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) of North Maluku Province on 13 November 2025. The activity aimed to enhance coordination between the central government, regional governments, and farmers in supporting the coconut smallholder replanting program as well as the coconut infrastructure and facilities program.



## Desember | December

BPDP telah menerima penghargaan dalam 4th Sawit Indonesia Award 2025 atas dedikasinya dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan dan mengedukasi penggunaan produk turunan sawit.

BPDP received an award at the 4th Sawit Indonesia Award 2025 in recognition of its dedication to empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in promoting and educating the use of palm oil derivative products.



## 1.4 Penghargaan



### Distinguished Award on Outstanding Leadership in Sustainable Industry Transformation

BPDP menerima Distinguished Award dari IDN Times atas perannya memimpin transformasi industri sawit berkelanjutan di acara “Semangat Awal Tahun 2025”.

### Distinguished Award for Outstanding Leadership in Sustainable Industry Transformation

BPDP received the Distinguished Award from IDN Times for its leadership in driving sustainable transformation within the palm oil industry. The award was presented at the “Semangat Awal Tahun 2025” event.



### Penghargaan Inovasi dan Kreatif pada Indokraf Expo 2025

BPDP meraih Juara I kategori Inovasi dan Kreatif pada Indokraf Expo 2025 di Denpasar, sebagai apresiasi atas dukungan terhadap UMKM sawit.

### Innovation and Creativity Award at Indokraf Expo 2025

BPDP won First Place in the Innovation and Creativity category at Indokraf Expo 2025 in Denpasar, in recognition of its support for palm oil MSMEs.



### Kelembagaan dan Pelayanan Terbaik Bagi Sektor Sawit pada ajang SIEXPO 2025

BPDP mendapatkan SIEXPO Award 2025 kategori Kelembagaan dan Pelayanan Terbaik Bagi Sektor Sawit di Pekanbaru atas pelayanannya kepada industri dan perkebunan.

### Best Institutional and Service Award for the Palm Oil Sector at SIEXPO 2025

BPDP received the SIEXPO Award 2025 for Best Institutional and Service Performance for the Palm Oil Sector in Pekanbaru, in recognition of its services to the palm oil industry and plantation sector.



### Mitra Penguatan UMKM 2025 dari Politeknik LPP Yogyakarta

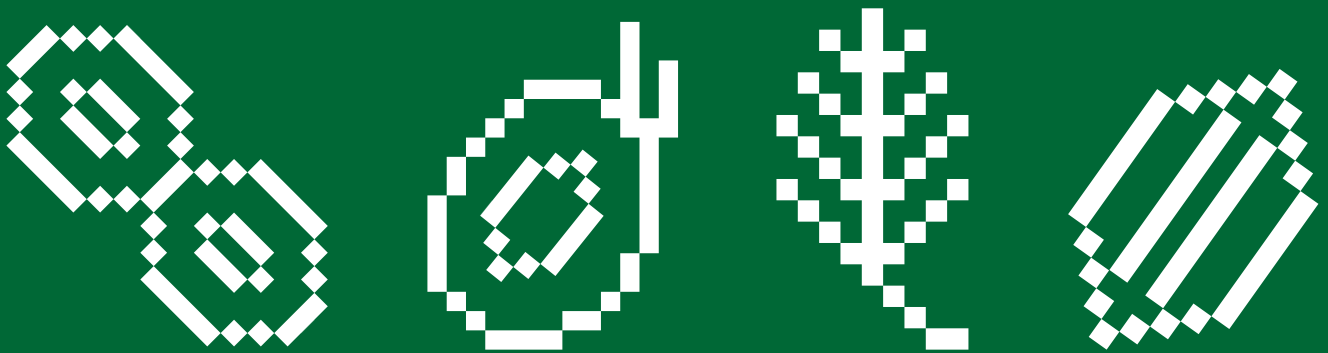
BPDP dianugerahi penghargaan Mitra Penguatan UMKM 2025 oleh Politeknik LPP Yogyakarta atas dedikasinya dalam pembangunan dan penguatan UKM di Indonesia.

### MSME Empowerment Partner 2025 Award from LPP Polytechnic Yogyakarta

BPDP received the MSME Empowerment Partner 2025 Award from LPP Polytechnic Yogyakarta in recognition of its commitment to supporting the development and empowerment of MSMEs in Indonesia.

# Laporan Manajemen

Melalui fungsi pengawasan, arahan strategis, serta kepemimpinan dalam pelaksanaan program, manajemen BPDP berkomitmen mendukung pengembangan sektor perkebunan Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



## Management Report

Through its supervisory oversight, strategic guidance, and leadership in program implementation, BPDP's management remains committed to advancing a sustainable and competitive plantation sector while delivering long-term value and tangible benefits to society.

# 02





Management Report  
Ketua Dewan Pengawas  
**Dida Gardera**

## 2.1 Laporan Ketua Dewan Pengawas

Mengawali laporan ini, izinkan kami atas nama Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Laporan Tahunan BPDP Tahun 2025. Melalui laporan ini, Dewan Pengawas menyampaikan pandangan atas kinerja pengelolaan BPDP sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemberian nasihat kepada Pejabat Pengelola.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penting bagi BPDP. Pada tahun ini, BPDP memasuki fase transformasi kelembagaan melalui perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 17 Januari 2025. Perubahan tersebut memperluas peran BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan, tidak hanya untuk komoditas kelapa sawit, tetapi juga dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis lainnya, yaitu kelapa dan kakao. Transformasi ini menjadi momentum penting bagi BPDP untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas program, serta memperluas manfaat pengelolaan dana perkebunan bagi masyarakat.

### A. Menjaga Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola

Dewan Pengawas memandang bahwa transformasi kelembagaan BPDP perlu diikuti dengan penguatan tata kelola organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan. Seiring dengan bertambahnya mandat pengelolaan komoditas kelapa dan kakao, BPDP diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan dana yang semakin adaptif, transparan, dan akuntabel.

## 2.1 Chairman of the Supervisory Board's Report

At the outset of this report, on behalf of the Supervisory Board of BPDP, we would like to express our appreciation for the completion of the 2025 BPDP Annual Report. Through this report, the Supervisory Board presents its views on BPDP's management performance as part of its supervisory, advisory, and guidance functions toward the Management Officials. The year 2025 marked an important milestone for BPDP. During this year, BPDP entered a phase of institutional transformation through organizational and governance changes based on Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025, which came into effect on 17 January 2025. These changes expanded BPDP's role in managing plantation funds, not only for palm oil commodities but also for supporting the development of other strategic plantation commodities, namely coconut and cocoa. This transformation represents an important momentum for BPDP to strengthen governance, improve program effectiveness, and expand the benefits of plantation fund management for the community.

### A. Maintaining Institutional Transformation and Governance

The Supervisory Board views that BPDP's institutional transformation must be accompanied by strengthened organizational governance, improved business processes, and enhanced service quality. Along with the expanded mandate covering coconut and cocoa commodities, BPDP is expected to develop a more adaptive, transparent, and accountable fund management system.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas secara berkala melakukan rapat bersama Pejabat Pengelola, rapat internal, rapat bersama Satuan Pemeriksaan Intern, serta kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program. Forum-forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas capaian kinerja, tindak lanjut rekomendasi, serta berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas memberikan perhatian khusus terhadap kecukupan pendanaan program, pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat, pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana, optimalisasi pungutan ekspor, serta kesiapan BPDP dalam mendukung sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit rakyat.

## B. Penilaian atas Kinerja BPDP Tahun 2025

Dewan Pengawas menilai bahwa kinerja BPDP pada tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan hasil reвью Semester II, realisasi rata-rata Indikator Kinerja Utama BPDP mencapai 115,3%, melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BPDP mampu menjaga kinerja organisasi di tengah dinamika kebijakan, kebutuhan pendanaan program, serta perluasan mandat kelembagaan.

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan BPDP tahun 2025 mencapai Rp33,24 triliun atau 119,20% dari target dalam Revisi II RBA Tahun 2025 sebesar Rp27,96 triliun. Sementara itu, realisasi belanja program mencapai Rp49,82 triliun atau 89,95% dari pagu DIPA sebesar Rp55,39 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp16,58 triliun yang ditutup melalui penggunaan saldo awal tahun 2025.

In carrying out its supervisory function, the Supervisory Board regularly conducted meetings with Management Officials, internal meetings, meetings with the Internal Audit Unit, as well as monitoring and evaluation activities on program implementation. These forums served as important platforms to discuss performance achievements, follow-up actions on recommendations, and various strategic issues requiring collective attention. Throughout 2025, the Supervisory Board paid particular attention to the adequacy of program funding, the implementation of the Mandatory Biodiesel Program, the acceleration of the Smallholder Palm Oil Replanting Program, the implementation of Facilities and Infrastructure Programs, the optimization of export levy collection, and BPDP's readiness in supporting ISPO certification for independent smallholder oil palm farmers.

## B. Assessment of BPDP's 2025 Performance

The Supervisory Board considers BPDP's overall performance in 2025 to be positive. Based on the results of the second semester review, the realization of BPDP's Key Performance Indicators reached an average of 115.3%, exceeding the targets set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This achievement demonstrates BPDP's ability to maintain organizational performance amid policy dynamics, program funding demands, and the expansion of its institutional mandate. From a financial perspective, BPDP's revenue realization in 2025 reached IDR 33.24 trillion, equivalent to 119.20% of the target set in the Second Revision of the 2025 Business and Budget Plan (RBA) amounting to IDR 27.96 trillion. Meanwhile, program expenditure realization reached IDR 49.82 trillion, or 89.95% of the allocated budget ceiling (DIPA) of IDR 55.39 trillion. As a result, BPDP recorded a budget deficit of IDR 16.58 trillion, which was covered through the utilization of the beginning balance for fiscal year 2025.

Dewan Pengawas mencermati bahwa struktur belanja program BPDP masih didominasi oleh Program Insentif Biodiesel. Pada tahun 2025, realisasi belanja terbesar berasal dari Program Insentif Biodiesel sebesar Rp47,17 triliun, diikuti oleh Program Peremajaan Sawit Rakyat sebesar Rp1,48 triliun, Pengembangan SDM sebesar Rp524,35 miliar, Sarana dan Prasarana sebesar Rp297,56 miliar, Riset sebesar Rp115,35 miliar, serta Promosi dan Kemitraan sebesar Rp78,59 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendanaan program strategis perlu terus dijaga melalui perencanaan anggaran yang cermat dan penguatan sumber penerimaan BPDP.

### C. Pengawasan atas Program Strategis

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas menaruh perhatian besar terhadap program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pekebun, industri, dan keberlanjutan sektor perkebunan. Program Peremajaan Sawit Rakyat menjadi salah satu fokus utama karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperbaiki kualitas tanaman, dan memperkuat keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Dewan Pengawas juga memberikan perhatian terhadap penggunaan benih sawit terbaik yang tersertifikasi dalam pelaksanaan Program PSR. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program peremajaan tidak hanya berjalan dari sisi administratif, tetapi juga mampu menghasilkan peningkatan produktivitas yang nyata bagi pekebun. Selain itu, Dewan Pengawas mendorong adanya pendekatan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah agar pekebun sawit rakyat semakin terdorong untuk mengusulkan lahannya sebagai peserta Program PSR.

The Supervisory Board noted that BPDP's program expenditure structure remained largely dominated by the Biodiesel Incentive Program. In 2025, the largest expenditure realization came from the Biodiesel Incentive Program amounting to IDR 47.17 trillion, followed by the Smallholder Palm Oil Replanting Program at IDR 1.48 trillion, Human Resources Development at IDR 524.35 billion, Facilities and Infrastructure at IDR 297.56 billion, Research at IDR 115.35 billion, and Promotion and Partnership at IDR 78.59 billion. This condition indicates that the sustainability of funding for strategic programs must continue to be maintained through prudent budget planning and the strengthening of BPDP's revenue sources.

### C. Oversight of Strategic Programs

In carrying out its supervisory function, the Supervisory Board placed significant attention on programs that have a direct impact on smallholders, industry players, and the sustainability of the plantation sector. The Smallholder Palm Oil Replanting Program became one of the main priorities, as it plays an important role in improving smallholder plantation productivity, enhancing crop quality, and strengthening the sustainability of the national palm oil industry. The Supervisory Board also emphasized the importance of using certified high-quality oil palm seeds in the implementation of the Replanting Program. This is essential to ensure that the replanting program not only progresses administratively but also delivers tangible productivity improvements for smallholders. In addition, the Supervisory Board encouraged stronger engagement with regional governments to motivate more independent oil palm smallholders to register their land for participation in the Replanting Program.

Pada Program Mandatori Biodiesel, Dewan Pengawas mencermati kebutuhan pendanaan yang besar, terutama seiring dengan pelaksanaan B40 dan persiapan kebijakan biodiesel tahun berikutnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas meminta Pejabat Pengelola untuk menyusun kajian yang komprehensif terkait kebutuhan dana, formula insentif, serta dampak sosial ekonomi dari keberlanjutan Program Mandatori Biodiesel.

Dewan Pengawas juga menilai bahwa program Sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit rakyat perlu menjadi perhatian khusus. Sertifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan perdagangan internasional dan tuntutan keberlanjutan.

#### **D. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas**

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat, review, pemantauan tindak lanjut, serta pemberian rekomendasi strategis kepada Pejabat Pengelola. Pada Semester I Tahun 2025, Dewan Pengawas melaksanakan rapat sebanyak 6 kali dan satu rapat khusus. Sementara itu, pada Semester II Tahun 2025, Dewan Pengawas bersama Direksi melaksanakan rapat sebanyak 4 kali pada periode Juli sampai Oktober 2025.

Kinerja Dewan Pengawas pada tahun 2025 juga menunjukkan capaian yang baik. Pada Semester I, tiga IKU Dewan Pengawas yang dievaluasi mencatat rata-rata realisasi sebesar 137% dengan rata-rata capaian sebesar 126%.

For the Mandatory Biodiesel Program, the Supervisory Board noted the significant funding requirements, particularly in line with the implementation of B40 and the preparation of future biodiesel policy. Therefore, the Supervisory Board requested the Management Officials to prepare a comprehensive study on funding needs, incentive formulas, and the socio-economic impacts of the sustainability of the Mandatory Biodiesel Program. The Supervisory Board also emphasized that the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification program for independent smallholder farmers requires special attention. This certification is not only related to compliance with sustainability standards, but also plays a crucial role in enhancing the competitiveness of Indonesian palm oil products in global markets, particularly in response to evolving international trade policies and increasing sustainability demands.

#### **D. Implementation of Supervisory Board Duties**

Throughout 2025, the Supervisory Board carried out its supervisory functions through meetings, reviews, monitoring of follow-up actions, and the provision of strategic recommendations to the Management Officials. In the first semester of 2025, the Supervisory Board held six meetings and one special meeting. Meanwhile, in the second semester of 2025, the Supervisory Board and the Board of Directors held four meetings from July to October 2025. The performance of the Supervisory Board in 2025 also showed strong results. In the first semester, the three evaluated Supervisory Board Key Performance Indicators recorded an average realization of 137%, with an average achievement level of 126%.

Pada Semester II, realisasi rata-rata IKU Dewan Pengawas mencapai 125,15%, yang mencakup pemantauan tata kelola, assessment pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas, pemberian persetujuan/tanggapan/rekomendasi atas aktivitas pengelolaan BLU, pemantauan tindak lanjut temuan auditor, evaluasi layanan BLU, serta peningkatan kompetensi Dewan Pengawas.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, baik dalam memberikan arahan strategis maupun dalam memastikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pengawasan. Dewan Pengawas juga terus mendorong penguatan peran SPI, Komite Audit, serta mekanisme pengendalian internal sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana perkebunan.

### E. Rekomendasi dan Ruang Perbaikan

Dewan Pengawas menyadari bahwa capaian positif BPDP tahun 2025 masih perlu diikuti dengan perbaikan berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu memperoleh perhatian antara lain kecukupan pendanaan program strategis, percepatan pelaksanaan PSR, penguatan sertifikasi ISPO, optimalisasi pungutan ekspor, kesiapan pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel tahun berikutnya, serta penyusunan kajian yang mendukung perluasan mandat pada komoditas kelapa dan kakao.

Pada Semester II Tahun 2025, Dewan Pengawas menyampaikan 7 rekomendasi baru kepada Pejabat Pengelola. Rekomendasi tersebut mencakup strategi percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun, pengawasan penggunaan bibit sawit tersertifikasi dalam Program PSR, pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mendorong usulan PSR, percepatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pendampingan PSR,

In the second semester, the realization of the Supervisory Board's Key Performance Indicators reached 125.15%. This achievement covered governance monitoring, assessment of the Supervisory Board's duties and functions, approval, response, and recommendations on BLU management activities, monitoring of audit findings follow-up actions, evaluation of BLU services, and capacity building of the Supervisory Board. These results demonstrate that the Supervisory Board has actively carried out its oversight function, both in providing strategic direction and ensuring follow-up actions on audit findings and supervisory recommendations. The Supervisory Board also continued to strengthen the role of the Internal Audit Unit (SPI), the Audit Committee, and internal control mechanisms as part of efforts to maintain accountability in plantation fund management.

### E. Recommendations and Areas for Improvement

The Supervisory Board recognizes that the positive achievements of BPDP in 2025 must be followed by continuous improvement. Several aspects require further attention, including the adequacy of funding for strategic programs, acceleration of the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR), strengthening of ISPO certification, optimization of export levy collection, readiness for the implementation of the Mandatory Biodiesel Program in the following year, and the preparation of studies supporting the expansion of the mandate to coconut and cocoa commodities. In the second semester of 2025, the Supervisory Board issued seven new recommendations to the Management Officials. These recommendations include strategies to accelerate ISPO certification for smallholders, supervision of certified seed usage in the PSR Program, strengthening engagement with regional governments to encourage PSR proposals, and accelerating cooperation with law enforcement agencies in supporting PSR implementation.

pelibatan Dewan Pengawas dan pemangku kepentingan dalam kuliah umum penerima beasiswa SDMP, kajian dampak kebijakan tarif dan IEU-CEPA terhadap ekspor sawit, serta kajian satuan biaya per hektare untuk peremajaan kelapa melalui pendanaan BPDP.

Dewan Pengawas memandang bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program BPDP semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pekebun serta sektor perkebunan nasional.

## F. Apresiasi

Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajaran BPDP atas kerja keras, komitmen, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika transformasi kelembagaan, tantangan pendanaan, serta perluasan mandat pengelolaan dana perkebunan, BPDP tetap mampu menunjukkan kinerja yang positif dan menjaga keberlanjutan pelaksanaan program strategis.

Dewan Pengawas juga menyampaikan terima kasih kepada Komite Pengarah, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas BPDP. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus mendorong BPDP untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan pengelolaan dana perkebunan memberikan manfaat yang nyata bagi produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor perkebunan Indonesia.

**Ketua Dewan Pengawas**  
**Dida Gardera**

including the involvement of the Supervisory Board and stakeholders in the public lecture for SDMP scholarship recipients, the study on the impact of tariff policy and the IEU CEPA on palm oil exports, as well as the study on unit cost per hectare for coconut replanting financed by BPDP. The Supervisory Board considers that the follow-up of these recommendations is essential to ensure that BPDP programs are implemented more effectively, are well targeted, and deliver broader impacts for smallholders and the national plantation sector.

## F. Appreciation

The Supervisory Board expresses its appreciation to the Board of Directors and all BPDP personnel for their hard work, commitment, and professionalism in carrying out their duties throughout 2025. Amid institutional transformation, funding challenges, and the expansion of the plantation fund management mandate, BPDP has continued to demonstrate positive performance and maintain the sustainability of strategic program implementation. The Supervisory Board also extends its gratitude to the Steering Committee, relevant ministries and agencies, local governments, business actors, smallholders, academics, partners, and all stakeholders who have supported BPDP's work. Going forward, the Supervisory Board will continue to encourage BPDP to strengthen governance, improve service quality, accelerate program implementation, and ensure that plantation fund management delivers tangible benefits for productivity, competitiveness, and the sustainability of Indonesia's plantation sector.

**Chairman of the Supervisory Board**  
**Dida Gardera**





President Director's  
Direktur Utama  
**Eddy Abdurrachman**

## 2.2 Laporan Direktur Utama

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pengelola dana perkebunan yang adaptif, profesional, dan terpercaya. Pada tahun ini, BPDP memasuki babak baru melalui transformasi kelembagaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025. Perubahan ini menandai perluasan mandat BPDP, yang kini tidak hanya mengelola dana untuk komoditas kelapa sawit, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas strategis lainnya seperti kakao dan kelapa.

Transformasi tersebut sejalan dengan visi BPDP untuk menjadi badan pengelola dana yang dinamis dan terpercaya dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan mandat tersebut, BPDP terus memperkuat fungsi penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana secara profesional, transparan, akuntabel, serta berlandaskan tata kelola yang baik.

Sepanjang tahun 2025, BPDP berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP mencapai 112,67, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 112,10. Peningkatan ini mencerminkan komitmen seluruh insan BPDP dalam menghadirkan layanan yang semakin baik serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi petani, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan.

## 2.2 President Director's Report

The year 2025 marked a significant milestone for the Indonesian Plantation Fund (BPDP) in strengthening its role as a professional, adaptive, and trusted institution in managing plantation funds. During the year, BPDP entered a new phase of institutional transformation through its transition from the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) into the Indonesian Plantation Fund (BPDP), pursuant to Presidential Regulation Number 132 of 2024 and Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025. This transformation constituted a strategic step toward expanding the scope of fund management, encompassing not only oil palm commodities but also other strategic plantation commodities, namely cocoa and coconut.

The institutional transformation is aligned with the vision of BPDP to become a dynamic and trusted fund management institution in supporting the development of strategic national plantation commodities that are value-added, competitive, and sustainable. In carrying out this mandate, BPDP continuously strengthened its functions in fund collection, development, and distribution in a professional, transparent, accountable manner and in accordance with the principles of good governance.

Throughout 2025, BPDP recorded positive organizational performance. The Organization Performance Score (NKO) reached 112.67, an increase compared to 112.10 in the previous year. This achievement reflects the commitment of BPDP in implementing its regulatory mandate, improving service quality, and delivering broader benefits to farmers, business actors, and stakeholders within the plantation sector.

Pada program strategis, BPDP mencatat sejumlah capaian penting. Program mandatori biodiesel memberikan kontribusi terhadap penghematan devisa sebesar US\$8,21 miliar, melampaui target sebesar US\$8,00 miliar atau mencapai 102,6 persen. Sementara itu, volume penyaluran biodiesel terealisasi sebesar 14,94 juta kiloliter, melampaui target yang ditetapkan dan memperkuat implementasi kebijakan energi nasional berbasis bahan bakar nabati dari kelapa sawit.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, BPDP juga mencatat capaian yang sangat baik. Program Pengembangan SDM Perkebunan berhasil menjangkau 19.932 peserta dari target 11.000 peserta atau mencapai 181,34 persen. Jumlah tersebut terdiri atas 9.146 peserta program pendidikan dan 10.786 peserta program pelatihan. Capaian ini menunjukkan komitmen BPDP dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing SDM perkebunan agar mampu mendukung pengelolaan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Pada program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PSR), BPDP menerima 275 rekomendasi teknis, dengan 224 rekomendasi telah tersalurkan dan 51 lainnya masih dalam proses penyaluran dana. Dari sisi luasan, realisasi program mencapai 43.594 hektare dari target 70.000 hektare, dengan capaian indikator sebesar 84,91 persen. Hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi BPDP untuk terus memperkuat koordinasi, menyederhanakan proses layanan, dan mempercepat pemenuhan dokumen pendukung pada tahun-tahun berikutnya. Selain kelapa sawit, program pengembangan perkebunan rakyat di komoditas kelapa dan kakao juga sedang dipersiapkan untuk dapat dijalankan di tahun berikutnya.

In the implementation of strategic programs, BPDP achieved several notable accomplishments. The mandatory biodiesel program contributed to foreign exchange savings amounting to US\$8.21 billion, exceeding the target of US\$8.00 billion, or achieving 102.6 percent of the target. Biodiesel distribution volume also reached 14.94 million kiloliters, surpassing the established target and further supporting the implementation of the national energy policy through the utilization of palm oil-based biofuel.

In the area of plantation human resource development, BPDP recorded significant achievements. The Plantation Human Resources Development Program reached 19,932 participants against a target of 11,000 participants, equivalent to 181.34 percent of the target. This achievement consisted of 9,146 participants in educational programs and 10,786 participants in training programs. The program represents an integral part of the efforts of BPDP to enhance the capacity, competence, and competitiveness of plantation human resources in support of productive and sustainable plantation management.

Under the Smallholder Replanting Program (PSR), BPDP received 275 technical recommendations, of which 224 recommendations had been disbursed, while 51 recommendations remained in the fund disbursement process. In terms of plantation area, realization reached 43,594 hectares out of the target of 70,000 hectares, resulting in an achievement rate of 84.91 percent. This outcome serves as an important evaluation point for BPDP in strengthening coordination, simplifying service processes, and accelerating the completion of supporting documentation in the coming years.

Sementara itu, Program Sarana dan Prasarana Perkebunan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2025, BPDP menerima 78 rekomendasi teknis dan sebanyak 73 rekomendasi telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama. Selain itu, 30 dokumen kontrak pengadaan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan dari total 36 dokumen SK Dirut dalam bentuk barang. Secara keseluruhan, capaian indikator program ini mencapai 141,67 persen, yang menunjukkan efektivitas BPDP dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, BPDP mengelola 147 riset dari target 100 riset. Sementara itu, kualitas luaran dan kebermanfaatan riset mencapai 173,5 poin dari target 150 poin. Capaian ini menegaskan komitmen BPDP dalam mendorong inovasi, memperkuat riset terapan, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan nasional.

Dari sisi pengelolaan keuangan, hingga 31 Desember 2025 realisasi pendapatan BPDP mencapai Rp33,24 triliun atau 132,16 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp25,15 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp49,82 triliun atau 89,95 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp55,39 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BPDP dilakukan secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan program strategis.

BPDP juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan. Pada tahun 2025, tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan mencapai 107,58 persen.

Meanwhile, the Plantation Facilities and Infrastructure Program demonstrated strong performance. During 2025, BPDP received 78 technical recommendations, with 73 recommendations having been approved through the issuance of the President Director Decree. Furthermore, 30 procurement contract documents were completed within less than three months out of a total of 36 procurement decrees involving goods procurement. Overall, the achievement rate for this program reached 141.67 percent, reflecting the effectiveness of BPDP in supporting improvements in plantation production, productivity, and product quality.

In the field of research and development, BPDP managed 147 research projects against a target of 100 projects. In addition, the quality and utilization of research outputs reached 173.5 points, exceeding the target of 150 points. These achievements demonstrate the commitment of BPDP to promoting innovation, strengthening applied research, and enhancing the added value and competitiveness of national plantation commodities.

From the financial management perspective, as of December 31, 2025, BPDP revenue realization amounted to IDR33.24 trillion, or 132.16 percent of the estimated revenue target of IDR25.15 trillion. Meanwhile, expenditure realization reached IDR49.82 trillion, equivalent to 89.95 percent of the total expenditure budget of IDR55.39 trillion. These results indicate that BPDP fund management was conducted in a measurable and accountable manner, aligned with the requirements of strategic program implementation.

BPDP also continued to strengthen the quality of services provided to stakeholders and service users. In 2025, the stakeholder and service user satisfaction index reached 107.58 percent, reflecting the effective delivery of BPDP services.

Meski demikian, peningkatan kualitas layanan tetap menjadi fokus utama, antara lain melalui penguatan sistem informasi, percepatan proses layanan, peningkatan responsivitas, dan penyempurnaan tata kelola internal.

Secara keseluruhan, kinerja BPDP tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. Transformasi kelembagaan, perluasan mandat, dan berbagai capaian program strategis menjadi fondasi penting bagi BPDP untuk terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung sektor perkebunan yang produktif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ke depan, BPDP akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat Indonesia.

**Direktur Utama**  
**Eddy Abdurrachman**

Nevertheless, continuous improvement in service quality remains a priority, particularly through strengthening information systems, accelerating service processes, enhancing responsiveness, and improving internal governance.

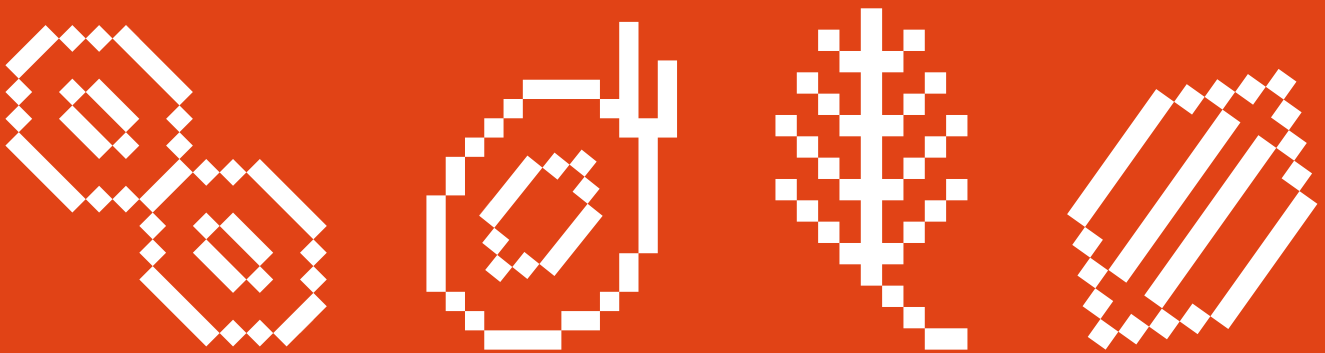
Overall, BPDP performance in 2025 reflected positive achievements and demonstrated the success of the organization in fulfilling its mandate as a plantation fund management institution. Institutional transformation, expansion of mandates, and the achievements of various strategic programs have established a strong foundation for BPDP to further strengthen its contribution toward a productive, inclusive, competitive, and sustainable plantation sector. Going forward, BPDP will continue to strengthen synergies with ministries/agencies, regional governments, business actors, smallholders, and all stakeholders to ensure broader and more tangible benefits for national plantation development and the welfare of the Indonesian people.

**President Director's Report**  
**Eddy Abdurrachman**



## Profil Organisasi

Badan Pengelola Dana Perkebunan merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan guna mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional secara berkelanjutan.



## Organization Profile

Indonesia Plantation Fund is a public service agency under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia mandated to collect, manage, and distribute plantation funds to support the sustainable development of Indonesia's plantation sector.

# 03



### 3.1 Sejarah BPDP

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebelumnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, merupakan unit kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan Dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas dana yang dikelola. Sejak Juni 2015, BPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dibentuk Komite Pengarah yang beranggotakan dari 8 (delapan) Kementerian/Lembaga antara lain: 1 (satu) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua) dan 7 (tujuh) Anggota yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) Kementerian yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian perindustrian, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### 3.1 History of BPDP

The Indonesian Estate Crop Fund for Plantation (BPDP), formerly known as the Indonesian Oil Palm Plantation Fund Management Agency, is a working unit operating under the Public Service Agency (Badan Layanan Umum/BLU) scheme within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. BPDP is mandated to carry out planning and budgeting, fund collection, fund management and disbursement, administration and accountability, as well as supervision of the managed funds. Since June 2015, BPDP has been officially designated as a government institution implementing the full financial management pattern of a Public Service Agency pursuant to Minister of Finance Decree Number 650/KMK.05/2015 concerning the Designation of the Indonesian Oil Palm Plantation Fund Management Agency within the Ministry of Finance as a Government Institution Implementing the Financial Management Pattern of a Public Service Agency, as amended by Minister of Finance Decree Number 46 of 2025 concerning the Designation of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation within the Ministry of Finance as a Government Institution Implementing the Financial Management Pattern of a Public Service Agency. In providing policy direction for the implementation of BPDP's duties and functions, and in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 132 of 2024, a Steering Committee was established. The Steering Committee consists of representatives from eight ministries/agencies, comprising one Coordinating Ministry for Economic Affairs serving as Chair and seven member ministries, namely the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of State-Owned Enterprises, and the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas).

Komite Pengarah bertugas menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan pengelolaan Dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana.

Landasan hukum pendirian BPDP adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

The Steering Committee is responsible for formulating policies related to the collection and utilization of Funds, including policies governing fund management to generate sustainable added value, as well as overseeing the implementation of policies concerning the collection and utilization of Funds. The establishment of BPDP is based on the following legal foundations:

1. Law Number 17 of 2003 dated 5 April 2003 concerning State Finance;
2. Law Number 1 of 2004 dated 1 January 2004 concerning State Treasury;
3. Law Number 39 of 2014 dated 17 October 2014 concerning Plantations;
4. Government Regulation Number 23 of 2005 in conjunction with Government Regulation Number 74 of 2012 dated 28 August 2012 concerning Financial Management of Public Service Agencies (BLU);
5. Government Regulation Number 24 of 2015 dated 25 May 2015 concerning the Collection of Plantation Funds;
6. Presidential Regulation Number 132 of 2024 concerning Plantation Fund Management;
7. Minister of Finance Regulation Number 129/PMK.05/2020 of 2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies;
8. Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation;
9. Minister of Finance Regulation Number 30 of 2025 concerning Service Tariffs of the Public Service Agency of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation under the Ministry of Finance;
10. Minister of Finance Decree Number 46 of 2025 concerning the Designation of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation within the Ministry of Finance as a Government Institution Implementing the Financial Management Pattern of a Public Service Agency;
11. Director General of Treasury Regulation Number PER-2/PB/2022 concerning Technical Guidelines for the Preparation of Business Plans and Budgets for Public Service Agencies.

### 3.2 Logo BPDP

Bentuk Logo Badan Pengelola Dana Perkebunan berbentuk persegi empat yang menggambarkan kestabilan, ketegasan, dan kesinambungan dalam menjalankan tugas pengelolaan dana perkebunan secara profesional dan berkelanjutan. Perpaduan warna hijau, merah, jingga, dan coklat merepresentasikan nilai-nilai utama yang menjadi landasan organisasi. Warna hijau melambangkan kelestarian, keberlanjutan (*sustainability*), serta komitmen terhadap lingkungan. Warna merah mencerminkan energi, semangat, dan peran organisasi sebagai pemberdaya (*enabler*) bagi sektor perkebunan. Warna jingga menggambarkan profesionalisme dan orientasi bisnis yang adaptif serta inovatif. Sementara warna coklat melambangkan lahan, rakyat, dan petani sebagai elemen utama dalam pembangunan sektor perkebunan nasional.

### 3.2 BPDP Logo

The logo of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation is designed in a rectangular shape, symbolizing stability, firmness, and continuity in carrying out its mandate of managing plantation funds in a professional and sustainable manner. The combination of green, red, orange, and brown reflects the organization's core values. Green represents environmental stewardship, sustainability, and commitment to sustainable development. Red symbolizes energy, enthusiasm, and the organization's role as an enabler for the plantation sector. Orange reflects professionalism and a business-oriented approach that is adaptive and innovative. Meanwhile, brown represents the land, the people, and farmers as the key pillars in the development of Indonesia's national plantation sector.

### Arti Logo | Logo Meaning



### 3.3 Visi dan Misi

Guna mendukung prioritas pemerintah jangka menengah serta diselaraskan dengan arahan dari Komite Pengarah BPDP, maka BPDP menetapkan visi organisasi di tahun 2025-2029 yaitu:

“Menjadi badan pengelola dana yang dinamis dan terpercaya dalam pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan rakyat”

Dengan visi tersebut, BPDP diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor perkebunan nasional. Visi ini mencerminkan orientasi BPDP untuk tidak hanya menjadi lembaga pengelola dana semata, tetapi juga sebagai katalisator utama dalam transformasi sektor perkebunan menjadi lebih produktif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan global dan mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Adapun untuk mencapai visi BPDP tersebut, BPDP menetapkan misi yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengembangkan dan menyalurkan dana perkebunan secara transparan, akuntabel, dan efisien;
2. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri hulu dan hilir yang berkelanjutan, penerapan praktik *green economy*, dan prinsip ekonomi sirkular;
3. Melaksanakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkebunan untuk mendukung pengembangan industri hulu dan hilir yang berkelanjutan;
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan komoditas perkebunan;

### 3.3 Vision and Mission

In support of the Government’s medium-term priorities and in alignment with the directives of the BPDP Steering Committee, BPDP has established its organizational vision for the 2025–2029 period as follows:

“To become a dynamic and trusted fund management agency in the development of strategic national plantation commodities that are value-added, competitive, and sustainable for the advancement, self-reliance, and prosperity of the people.”

Through this vision, BPDP is expected to play a strategic role in advancing the national plantation sector. The vision reflects BPDP’s aspiration not only to serve as a fund management institution, but also to act as a key catalyst in transforming the plantation sector into one that is more productive, innovative, and responsive to global challenges, while supporting the improvement of the welfare of the Indonesian people.

To achieve this vision, BPDP has established the following missions for the 2025–2029 period:

1. To collect, develop, and distribute plantation funds in a transparent, accountable, and efficient manner;
2. To enhance the quality of human resources in support of the sustainable development of upstream and downstream industries, the implementation of green economy practices, and circular economy principles;
3. To improve the quality of plantation facilities and infrastructure to support the sustainable development of upstream and downstream industries;
4. To conduct research and development initiatives aimed at increasing the added value, competitiveness, and sustainability of plantation commodities;

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan kegiatan promosi hulu dan hilir perkebunan;</li> <li>6. Melaksanakan kegiatan peremajaan tanaman perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;</li> <li>7. Melaksanakan pembiayaan dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. To carry out promotional activities for the upstream and downstream plantation industries;</li> <li>6. To implement plantation crop replanting programs aimed at improving farmers' welfare;</li> <li>7. To provide financing in support of fulfilling plantation commodity outputs for food security, biofuel development, and industrial downstreaming initiatives.</li> </ol> |
|---|--|

### 3.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan, tugas BPDP adalah melaksanakan

perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan Dana, serta penatausahaan, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPDP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran;
2. Pelaksanaan penghimpunan Dana;
3. Pelaksanaan pengembangan Dana;
4. Pelaksanaan penyaluran Dana sektor hulu dan hilir;
5. Pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana;
6. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana;
7. Penyusunan peraturan dan perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum;
8. Pelaksanaan kerja sama kelembagaan dan masyarakat;
9. Pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana;
10. Pengelolaan keuangan, umum, sumber daya manusia, kepatuhan internal, manajemen kinerja dan risiko, komunikasi, serta sistem informasi dan basis data; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komite Pengarah.

### 3.4 Duties and Functions

Based on Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025 concerning the Organizational Structure and Working Procedures of the Indonesian Estate Crop Fund for Plantation, BPDP is tasked with carrying out planning and budgeting, fund collection, fund management and distribution, as well as administration and accountability in accordance with prevailing laws and regulations. In carrying out these duties, BPDP performs the following functions:

1. Planning and budgeting;
2. Implementation of fund collection activities;
3. Implementation of fund development activities;
4. Implementation of fund disbursement for the upstream and downstream sectors;
5. Administration and accountability of Funds;
6. Supervision of fund management activities;
7. Formulation of regulations and agreements, as well as implementation of legal advocacy;
8. Implementation of institutional and public relations cooperation;
9. Internal supervision over the implementation of the duties of the Fund Management Agency;
10. Management of finance, general affairs, human resources, internal compliance, performance and risk management, communications, as well as information systems and databases; and
11. Performance of other functions assigned by the Steering Committee.

### 3.5 Layanan

Badan Pengelola Dana Perkebunan menyelenggarakan layanan pengelolaan dana perkebunan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah di sektor perkebunan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Dana memberikan layanan pendanaan dan fasilitasi program sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, antara lain:

1. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
2. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
3. promosi Perkebunan;
4. peremajaan Perkebunan;
5. sarana dan prasarana Perkebunan;
6. Program lain terkait dengan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.

#### **Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan**

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing, dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui penyuluhan, Pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan formal maupun non-formal.

#### **Penelitian dan Pengembangan Perkebunan**

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budi daya, pascapanen dan pengolahan hasil, industry, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan Usaha Perkebunan.

### 3.5 Service

The Indonesian Plantations Fund for Plantation provides plantation fund management services in a professional, accountable, and sustainable manner to support the implementation of Government policies in the plantation sector. In carrying out its mandate, BPDP delivers funding services and facilitates programs in accordance with Presidential Regulation Number 132 of 2024, including the following:

1. Plantation human resources development;
2. Plantation research and development;
3. Plantation promotion;
4. Plantation replanting;
5. Plantation facilities and infrastructure; and
6. Other programs related to food security, biofuels, and the downstreaming of the plantation industry.

#### **Plantation Human Resources Development**

Plantation Human Resources Development is carried out to enhance knowledge, skills, professionalism, self-reliance, and competitiveness, as well as to strengthen technical, managerial, and entrepreneurial capabilities. These activities may be implemented through extension services, education, training, mentoring, and facilitation programs conducted by both formal and non-formal educational institutions.

#### **Plantation Research and Development**

Plantation Research and Development is undertaken to enhance knowledge related to breeding, cultivation, post-harvest handling and processing, industry, markets, product value chains from upstream to downstream sectors, as well as the potential development of plantation businesses.

## Promosi Perkebunan

Promosi Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis, yaitu meningkatkan citra nilai produk Perkebunan, informasi pasar Perkebunan, memperluas pasar Perkebunan, meningkatkan investasi Perkebunan dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan.

## Peremajaan Perkebunan

Peremajaan Perkebunan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk tanaman yang sudah tua atau tidak produktif dapat dilakukan peremajaan Perkebunan.

## Sarana dan Prasarana Perkebunan

Sarana dan Prasarana Perkebunan dimaksudkan untuk peningkatan produksi, Produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan, bentuk sarana dan prasarana dimaksud terdiri atas:

- a. Benih;
- b. Pupuk;
- c. Pestisida;
- d. Alat pascapanen dan pengolahan hasil;
- e. Jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke Pelabuhan
- f. Alat transportasi hasil Perkebunan
- g. Mesin pertanian
- h. Pembentukan infrastruktur pasar
- l. Verifikasi atau penelusuran teknis

## Program lain terkait dengan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.

Layanan untuk program ini diantaranya mandatory biodiesel dengan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati berasal dari kelapa sawit (untuk saat ini kandungan campuran dari bahan bakar nabati sebesar 40% atau yang dikenal dengan B40), dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel.

## Plantation Promotion

Plantation Promotion is intended to enhance awareness of the strategic significance of plantation commodities by strengthening the image and value of plantation products, providing plantation market information, expanding market access, increasing plantation investment, and fostering the development of plantation commodity marketing centers.

## Plantation Replanting

Plantation Replanting is aimed at improving the productivity of plantation crops and maintaining plantation land areas to ensure their optimal utilization. Accordingly, replanting activities may be carried out for aging or unproductive plantation crops.

## Plantation Facilities and Infrastructure

Plantation Facilities and Infrastructure programs are intended to improve production, productivity, and the quality of plantation outputs. The facilities and infrastructure provided include the following:

- a. Seeds;
- b. Fertilizers;
- c. Pesticides;
- d. Post-harvest and processing equipment;
- e. Plantation roads and access roads connecting to public roads and/or ports;
- f. Transportation equipment for plantation products;
- g. Agricultural machinery;
- h. Development of market infrastructure; and
- l. Technical verification or traceability systems.

## Other programs related to food security, biofuels, and downstream plantation industries.

One of the key programs is the mandatory biodiesel program, which supports the provision and utilization of palm oil-based biofuel. Currently, the biodiesel blending mandate is set at 40% (B40). The program is intended to cover the price gap between diesel fuel and biodiesel market prices.

### 3.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, BPDP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun struktur organisasi BPDP terdiri dari:

1. Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum;
2. Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana;
3. Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu;
4. Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir;
5. Direktorat Hukum dan Kerja Sama; dan;
6. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

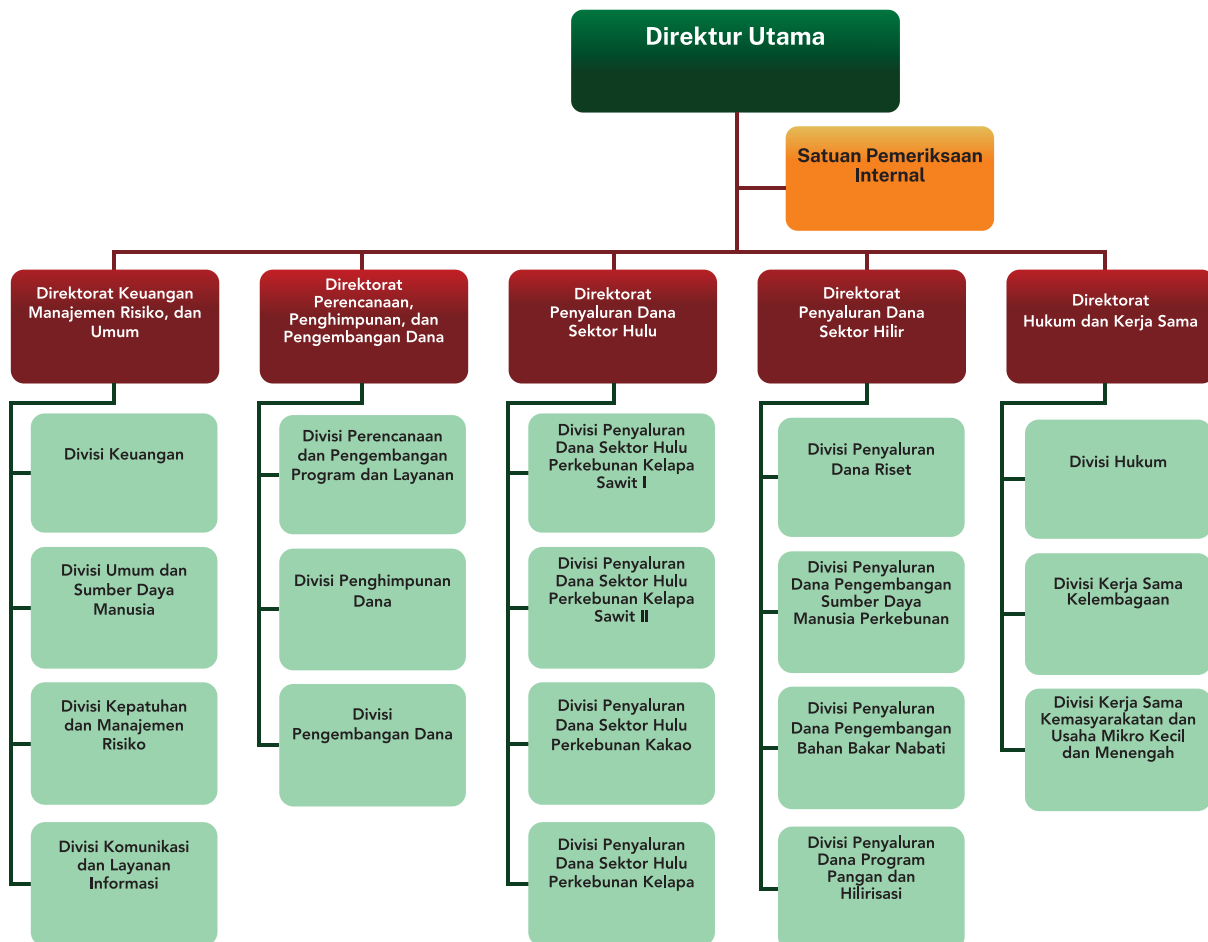
Sebagai gambaran struktur organisasi BPDP sebagaimana began berikut:

### 3.6 Organizational Structure

Based on Minister of Finance Regulation Number 6 of 2026, BPDP operates under and is accountable to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury. The organizational structure of BPDP consists of the following:

1. Directorate of Finance, Risk Management, and General Affairs;
2. Directorate of Planning, Fund Collection, and Fund Development;
3. Directorate of Upstream Sector Fund Distribution;
4. Directorate of Downstream Sector Fund Distribution;
5. Directorate of Legal Affairs and Cooperation;
6. Internal Audit Unit; and
7. Functional Position Group.

An overview of BPDP’s organizational structure is presented in the following chart:



### 3.7 Komite Pengarah

#### Tugas dan Fungsi Komite Pengarah

Komite Pengarah bertugas:

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah dapat:

1. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu.
2. Menunjuk narasumber utama (prominent) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, Kakao dan Kelapa pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan Kelapa Sawit, Kakao dan Kelapa dan eksportir atas komoditas perkebunan Kelapa Sawit, Kakao dan Kelapa.

Pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibantu oleh sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah. Komite Pengarah berfungsi:

1. Mengarahkan strategi kebijakan umum penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana BPDP.
2. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan BPDP.
3. Menyetujui rencana umum target pemungutan, biaya, penyaluran dana, dan cadangan BPDP.
4. Menetapkan alokasi dana program/ kegiatan BPDP.
5. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja BPDP.

### 3.7 Steering Committee

#### Duties and Functions of the Steering Committee

The Steering Committee is assigned to:

1. Formulate policies on the collection and utilization of funds, including fund management policies aimed at generating sustainable added value.
2. Supervise the implementation of policies related to the collection and utilization of funds.

In carrying out its duties, the Steering Committee may:

1. Involve ministries, institutions, regional governments, and other parties deemed necessary.
2. Appoint prominent resource persons from palm oil, cocoa, and coconut plantation business actors, industries utilizing palm oil, cocoa, and coconut plantation products as raw materials, as well as exporters of palm oil, cocoa, and coconut commodities.

The implementation of the duties of the Steering Committee is supported by a Secretariat, the composition and duties of which are determined by the Minister responsible for coordinating, synchronizing, and controlling ministerial affairs in the administration of government in the economic sector, in his or her capacity as the Chairperson of the Steering Committee. The Steering Committee functions to:

1. Direct the general policy strategy for the collection, management, and distribution of BPDP funds.
2. Establish the long-term planning and objectives of BPDP.
3. Approve the general plan for levy collection targets, operational costs, fund distribution, and BPDP reserves.
4. Determine the allocation of funds for BPDP programs and activities.
5. Supervise and evaluate the achievement of BPDP's performance.

## Sekretariat Komite Pengarah

Tugas dari Sekretariat Komite Pengarah:

1. Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kantor Menteri yang menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
2. Sekretariat Komite Pengarah menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan untuk yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Komite Pengarah dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Komite Pengarah.
3. Sekretariat Komite Pengarah terdiri dari Ketua Sekretariat Komite Pengarah dan didukung oleh staf pendukung sesuai dengan kebutuhan.
4. Sekretariat Komite Pengarah dipimpin oleh Ketua Sekretariat Komite Pengarah yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Komite Pengarah.
5. Seluruh Rapat Komite Pengarah dihadiri oleh Ketua Sekretariat Komite Pengarah, kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Komite Pengarah sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan Rapat Komite Pengarah.
6. Ketua Sekretariat Komite Pengarah bertanggung jawab atas terdistribusinya bahan dan informasi yang terkait dengan agenda Rapat Komite Pengarah.
7. Ketua Sekretariat Komite Pengarah bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Pengawas.
8. Biaya operasional Sekretariat Komite Pengarah tersebut diatas dibebankan kepada BPDP.

## Steering Committee Secretariat

Duties of the Steering Committee Secretariat:

1. The implementation of the duties of the Steering Committee is supported by a Secretariat, which is functionally carried out by the work unit within the Office of the Coordinating Minister responsible for the coordination, synchronization, and control of ministerial affairs in the administration of government in the economic sector.
2. The Steering Committee Secretariat performs administrative and secretarial functions related to all activities of the Steering Committee in carrying out its duties and functions as the Steering Committee.
3. The Steering Committee Secretariat consists of the Head of the Steering Committee Secretariat and is supported by supporting staff as required.
4. The Steering Committee Secretariat is led by the Head of the Steering Committee Secretariat, who is appointed and designated by the Chairperson of the Steering Committee.
5. All Steering Committee Meetings are attended by the Head of the Steering Committee Secretariat, except for Special Meetings which may only be attended by members of the Steering Committee as determined by the Chairperson of the Steering Committee Meeting.
6. The Head of the Steering Committee Secretariat is responsible for ensuring the distribution of materials and information related to the agenda of the Steering Committee Meetings.
7. The Head of the Steering Committee Secretariat is also responsible for the preparation, administration, and distribution of the Minutes of the Board of Supervisors Meetings.
8. The operational expenses of the Steering Committee Secretariat are charged to BPDP.

Sesuai dengan Amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana, maka dibentuk Komite Pengarah yang terdiri atas:

In accordance with Presidential Regulation Number 132 of 2024 concerning Plantation Fund Management, a Steering Committee was established to provide policy direction for the implementation of the duties of the Fund Management Agency. The Steering Committee consists of the following:

<b>Ketua</b> :	menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian	<b>Menko Perekonomian</b>
<b>Anggota</b> :	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;	<b>Menteri Keuangan</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;	<b>Menteri Pertanian</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;	<b>Menteri Perindustrian</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;	<b>Menteri Perdagangan</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi;	<b>Menteri ESDM</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;	<b>Menteri BUMN</b>
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan nasional;	<b>Menteri PPN/Bappenas</b>

### 3.7 Logo Komite Pengarah

### 3.7 Steering Committee Logo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN  
ESDM**



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

### 3.8 Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BPDP bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola/ Direksi dalam menjalankan pengelolaan BPDP dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit.

#### Tugas Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola.
2. Menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat Pengelola kepada Komite Pengarah; dan
3. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang:

1. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur.
2. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja.
3. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU.
4. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU.
5. Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, dan/ atau anggota Sekretariat Dewan Pengawas.

### 3.8 Board of Supervisors

The Board of Supervisors of BPDP is responsible for overseeing and providing advice to the Management Officials or Board of Directors in carrying out BPDP management, supported by the Secretariat of the Board of Supervisors. In performing its duties and functions, the Board of Supervisors may establish an Audit Committee.

#### Duties of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors has the following duties:

1. Supervising and providing guidance on the implementation of the duties of the Management Officials.
2. Submitting recommendations on the implementation of fund collection and fund utilization policies by the Management Officials to the Steering Committee.
3. Performing other related duties assigned by the Steering Committee.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Supervisors is authorized to:

1. Obtain complete, timely, and measurable information regarding the Public Service Agency (BLU).
2. Receive periodic reports on BLU management, at a minimum consisting of financial reports and performance reports.
3. Receive reports on supervision and audit results conducted by the BLU Internal Audit Unit (SPI), government internal auditors, external auditors, and the BLU supervisory authority.
4. Be informed of policies and actions implemented by the BLU Management Officials in the execution of BLU activities.
5. Obtain explanations and or data from BLU Management Officials and or employees regarding policies and the implementation of BLU activities.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Supervisors, the Audit Committee, and or members of the Secretariat of the Board of Supervisors.

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI.</li> <li>8. Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas.</li> <li>9. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI.</li> <li>10. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas.</li> <li>11. Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.</li> <li>12. Menunjuk kantor akuntan publik; dan</li> <li>13. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Approving the appointment of the Head of Internal Audit Unit (SPI).</li> <li>8. Inviting management officials to attend meetings of the Board of Supervisors.</li> <li>9. Communicating directly with the Internal Audit Unit (SPI).</li> <li>10. Requesting BLU management officials to present professional experts in meetings of the Board of Supervisors.</li> <li>11. Requesting special audits from government internal supervisory apparatus and reporting them to the Minister or Head of the Institution and the Minister of Finance.</li> <li>12. Appointing a public accounting firm.</li> <li>13. Exercising other authorities in accordance with applicable laws and regulations.</li> </ol> |
|---|--|

Adapun susunan Dewan Pengawas tahun 2025 sebagai berikut:

The composition of the Board of Supervisors for 2025 is as follows:

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Periode	Position
Dida Gardera	Ketua Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tommy Andana	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar, Kementerian Perdagangan
Djaka Budi Utama	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Direktur Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
Abdul Roni Angkat	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Direktur Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian
DR. Eng. Eniya Listiani Dewi	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Putu Juli Ardika	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian
Evita H Legowo	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Profesional
Taufik Mappaenre	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Ahli Hukum dan Audit (Tim Asistensi Menko Bidang Perekonomian)
Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono	Anggota Dewan Pengawas	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025	2025 – sekarang	Sekretaris Jenderal GAPKI

## Organ Pendukung Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh organ pendukung, yaitu: Sekretaris Dewan Pengawas dan, Komite Audit, yang diuraikan sebagai berikut:

### Tugas dari Sekretariat Dewan Pengawas:

1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretariat Dewan Pengawas.
2. Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari Sekretaris Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
3. Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
4. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BPDP dan beban tugas Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/Pegawai BPDP, Pejabat/Pegawai Kementerian Anggota Komite Pengarah, maupun profesional. Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direktur Utama BPDP dengan persetujuan Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama BPDP dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas.
- b. Membuat dan mendokumentasikan risalah Rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan.
- c. Membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas.

## Supporting Organs of the Board of Supervisors

In carrying out its duties, the Board of Supervisors is supported by supporting organs, namely the Secretariat of the Board of Supervisors and the Audit Committee, as described below:

### Duties of the Secretariat of the Board of Supervisors:

1. To support the duties of the Board of Supervisors, a Secretariat of the Board of Supervisors may be established.
2. The Secretariat consists of the Secretary of the Board of Supervisors and supporting staff, based on needs and appointed through a decision of the Chair of the Board of Supervisors.
3. The Secretariat is led by the Secretary of the Board of Supervisors.
4. The appointment of the Secretary considers BPDP's financial capacity and the workload of the Board of Supervisors. The Secretary may come from BPDP employees, government officials, members of the Steering Committee, or professionals. The term of office is determined by the President Director of BPDP with the approval of the Board of Supervisors.
5. The Secretary is appointed and dismissed by the President Director of BPDP with the approval of the Board of Supervisors.

The Secretary of the Board of Supervisors is responsible for assisting the Board of Supervisors in:

- a. Carrying out the secretarial functions of the Board of Supervisors.
- b. Preparing and documenting the minutes of meetings of the Board of Supervisors, including recording all decisions made in decision making forums.
- c. Assisting in the preparation of work plans, reports, opinions, studies, and recommendations of the Board of Supervisors.

- a. Menyiapkan penyelenggaraan Rapat Dewan pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat.
  - b. Mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
  - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
7. Seluruh Rapat Dewan Pengawas, baik rapat Internal Dewan Pengawas maupun Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dengan Direksi dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pengawas, kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
  8. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab atas terdistribusinya berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas. Sekretaris Dewan Pengawas juga bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Pengawas.
  9. Sekretaris Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Pengawas mendapatkan remunerasi atas beban BPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Preparing and organizing Board of Supervisors meetings, including coordinating participants' attendance and preparing attendance lists as well as meeting materials.
  - b. Collecting data or information relevant to the implementation of the duties of the Board of Supervisors.
  - c. Carrying out other activities that support the implementation of the duties of the Board of Supervisors.
7. All meetings of the Board of Supervisors, including internal meetings of the Board of Supervisors and coordination meetings between the Board of Supervisors and the Board of Directors, are attended by the Secretary of the Board of Supervisors, except for special meetings that are attended exclusively by members of the Board of Supervisors and or the Board of Directors, as determined by the Chair of the meeting.
  8. The Secretary of the Board of Supervisors is responsible for ensuring the distribution of all information related to the agenda items to be discussed. The Secretary is also responsible for the preparation, administration, and distribution of the minutes of meetings of the Board of Supervisors.
  9. The Secretary of the Board of Supervisors and the supporting Secretariat staff receive remuneration funded by BPDP in accordance with applicable regulations.



### 3.8.1 Profil Dewan Pengawas

### 3.8.1 Board of Supervisors Profile

Ketua Dewan Pengawas  
Chairman of the Board of Supervisors

## Dida Gardera

Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Senior Advisor for Connectivity and Services Development, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia



Dida Gardera memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang pengelolaan kebijakan pangan, agribisnis, dan lingkungan. Ia saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis serta Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Gardera pernah menjadi Asisten Deputy untuk berbagai bidang strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara, riset, inovasi agro, farmasi, pariwisata, serta pelestarian lingkungan hidup.

Pendidikan formal Gardera mencakup S1 Teknik Lingkungan dari ITB dan MSc Social Policy and Planning in Developing Countries dari LSE, London. Ia juga menempuh berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen lingkungan, serta aktif sebagai narasumber di forum internasional, termasuk World Bank, UNFCCC, dan Global Green Growth Institute. Prestasinya mencakup kontributor buku “State and Trends of Carbon Pricing 2020” serta peran dalam berbagai program pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di Indonesia.

Dida Gardera has more than two decades of experience in food policy, agribusiness, and environmental management. He currently serves as Deputy for Food and Agribusiness Coordination and Senior Advisor for Connectivity and Services Development at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. He previously held several positions as Assistant Deputy in strategic sectors, including state-owned enterprises, research and agro innovation, pharmaceuticals, tourism, and environmental conservation. He earned a Bachelor’s degree in Environmental Engineering from Bandung Institute of Technology and an MSc in Social Policy and Planning in Developing Countries from London School of Economics and Political Science. He has also completed various leadership and environmental management training programs and has actively participated as a speaker in international forums, including the World Bank, United Nations Framework Convention on Climate Change, and Global Green Growth Institute. His contributions include serving as a contributor to the book State and Trends of Carbon Pricing 2020 and supporting various sustainable development and green economy programs in Indonesia.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Djaka Budi Utama

Direktur Jendral Bea dan Cukai,  
Kementerian Keuangan

Director General of Customs and  
Excise, Ministry of Finance of the  
Republic of Indonesia

Djaka Budhi Utama adalah pejabat senior Kementerian Keuangan dengan karir panjang di TNI sebelum menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia memiliki pengalaman strategis di bidang intelijen, koordinasi politik, dan kepemimpinan operasional. Sebelumnya ia menjabat berbagai posisi militer termasuk Asintel Panglima TNI, Inspektur Jenderal Kemhan, dan Deputi di Kemenko Polhukam.

Pendidikan formalnya mencakup S1 Sarjana Sosial (2012), serta pendidikan militer dan kepemimpinan strategis di AKMIL, SESKOAD, SESKO TNI, dan LEMHANAS. Djaka Budhi Utama dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan integritas dalam pengelolaan bea dan cukai serta penguatan tata kelola internal.

Djaka Budhi Utama is a senior official at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia with an extensive career background in the Indonesian National Armed Forces before serving at the Directorate General of Customs and Excise. He has broad strategic experience in intelligence, political coordination, and operational leadership. Previously, he held several senior military positions, including Assistant for Intelligence to the Commander of the Indonesian National Armed Forces, Inspector General of the Ministry of Defense, and Deputy at the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs. He earned a Bachelor's degree in Social Sciences in 2012 and completed various military and strategic leadership programs at Military Academy, Army Command and Staff College, Indonesian National Armed Forces Command and Staff College, and National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. Djaka Budhi Utama is recognized for his strong leadership and integrity in customs and excise administration, as well as in strengthening internal governance systems.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Tommy Andana

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan  
Pengamanan Pasar, Kementerian  
Perdagangan.

Senior Advisor for Business Climate  
and Market Safeguarding, Ministry  
of Trade of the Republic of Indonesia

Tommy Andana adalah pejabat senior Kementerian Perdagangan yang memegang berbagai posisi strategis sejak menjadi CPNS pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Direktur Tertib Niaga. Ia memiliki pengalaman luas di bidang administrasi publik, pengawasan, dan audit kepatuhan. Sebelumnya, Andana juga menjabat Plt. Kepala Bappebti dan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, serta pernah menjadi staf ahli bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar.

Andana menempuh pendidikan di STPMD "APMD" Yogyakarta (S1 Ilmu Pemerintahan) dan STIA LAN Jakarta (S2 Administrasi Publik). Ia telah mengikuti berbagai diklat kepemimpinan, audit, dan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk Diklatpim Tingkat III dan IV, serta pelatihan fraud auditing. Andana menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden RI sebagai pengakuan atas dedikasi dan integritasnya dalam pelayanan publik.

Tommy Andana is a senior official at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia who has held various strategic positions since joining the ministry as a civil servant candidate in 2000. He currently serves as Director of Trade Order. He has extensive experience in public administration, supervision, and compliance auditing. Previously, he served as Acting Head of Commodity Futures Trading Regulatory Agency, Acting Director General of Foreign Trade, and Senior Advisor for Business Climate and Market Safeguarding. He earned a Bachelor's degree in Government Science from STPMD APMD Yogyakarta and a Master's degree in Public Administration from National Institute of Public Administration. He has also completed various leadership, auditing, and government procurement management training programs, including Leadership Training Level III and IV, as well as fraud auditing training. For his dedication and integrity in public service, he received the Satyalancana Karya Satya 10-year and 20-year awards from the President of the Republic of Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

**DR. Eng. Eniya Listiani Dewi**

Direktur Jendral Energi Baru  
Terbarukan, dan Konservasi Energi,  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral

Director General of New, Renewable  
Energy and Energy Conservation,  
Ministry of Energy and Mineral  
Resources of the Republic of  
Indonesia



Eniya Listiani Dewi merupakan akademisi dan pejabat senior di bidang energi baru terbarukan, bioteknologi, dan teknologi fuel cell. Ia menempuh pendidikan di Waseda University hingga jenjang doktoral di bidang Applied Chemistry, serta pernah belajar Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Kariernya berkembang di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan berbagai posisi strategis, mulai dari Direktur Pusat Teknologi Material hingga Profesor Riset. Sejak Maret 2024, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal EBTKE di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Eniya dikenal aktif dalam pengembangan teknologi hydrogen, fuel cell, biofuel, dan kendaraan listrik. Ia juga menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kontribusinya di bidang inovasi energi dan teknologi.

Eniya Listiani Dewi is an academic and senior official specializing in renewable energy, biotechnology, and fuel cell technology. She pursued her doctoral studies in Applied Chemistry at Waseda University and also studied Architecture Engineering at Gadjah Mada University. Her career developed through the Agency for the Assessment and Application of Technology and the National Research and Innovation Agency, where she held various strategic positions, ranging from Director of the Center for Material Technology to Research Professor. Since March 2024, she has served as Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. She is widely recognized for her contributions to hydrogen, fuel cell, biofuel, and electric vehicle technologies. She has also received various national and international awards for her contributions to energy innovation and technology.

Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

**Abdul Roni Angkat**

Direktur Jendral Perkebunan,  
Kementerian Pertanian

Director General of Plantations,  
Ministry of Agriculture of the  
Republic of Indonesia



Abdul Roni Angkat merupakan profesional di bidang pertanian dan perkebunan dengan latar belakang pendidikan dari Institut Pertanian Bogor, mulai dari S1 Teknik Pertanian hingga S3 Ilmu Keteknikan Pertanian. Kariernya banyak berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sektor pertanian. Ia pernah menjabat sebagai Widyaiswara, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, hingga Direktur Serealia di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sejak Juli 2025, Abdul Roni dipercaya sebagai Plt. Direktur Jenderal Perkebunan dengan fokus pada hilirisasi, penguatan petani, dan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. Ia juga dikenal melalui pengembangan berbagai inovasi pertanian, termasuk sistem rekomendasi pemupukan kelapa sawit dan teknologi pertanian berbasis IoT.

Abdul Roni Angkat is a professional in the agriculture and plantation sectors with an academic background from IPB University, where he completed undergraduate, master's, and doctoral studies in Agricultural Engineering. His career has largely focused on agricultural education, training, and sector development. He previously served as Lecturer and Trainer, Head of the Lampung Agricultural Training Center, and Director of Cereals at the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Since July 2025, he has served as Acting Director General of Plantations, focusing on downstream development, farmer empowerment, and increasing the added value of plantation commodities. He is also recognized for developing various agricultural innovations, including oil palm fertilization recommendation systems and IoT-based agricultural technologies.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Evita H Legowo

Profesional  
Profesional

Evita H. Legowo adalah pakar energi dengan pendidikan S1 Sarjana Kimia dari ITB (1974) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Teknik dari Technical University of Clausthal, Jerman (1991). Rekam jejak kariernya panjang di sektor energi, ia pernah menjabat Kepala Puslitbang LEMIGAS (2002–2006), Staf Ahli Menteri ESDM bidang SDM dan Teknologi (2006–2008), dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2008–2012). Selain birokrasi, Evita juga berperan di dunia usaha dan organisasi profesional, termasuk Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) 2010–2013 dan anggota Supervisory Board Indonesian Petroleum Association 2016–2019. Berbekal pengalaman ini, ia memiliki keahlian kuat dalam jaringan kerja sama energi nasional dan internasional.

Evita H. Legowo is an energy expert who earned a Bachelor's degree in Chemistry from Bandung Institute of Technology in 1974 and a Doctoral degree in Engineering Science from Clausthal University of Technology in 1991. She has extensive experience in the energy sector, having served as Head of the LEMIGAS Research and Development Center from 2002 to 2006, Senior Advisor to the Minister of Energy and Mineral Resources for Human Resources and Technology from 2006 to 2008, and Director General of Oil and Gas from 2008 to 2012 at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Beyond public service, she has also been active in the corporate and professional sectors, including serving as Member of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) from 2010 to 2013 and as a member of the Supervisory Board of the Indonesian Petroleum Association from 2016 to 2019. Her experience has provided her with strong expertise in national and international energy cooperation networks.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Putu Juli Ardika

Direktur Jenderal Industri Agro,  
Kementerian Perindustrian

Director General of Agro Industry,  
Ministry of Industry of the Republic  
of Indonesia

Putu Juli Ardika merupakan Pegawai Negeri Sipil berpengalaman di sektor industri dan kebijakan publik. Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Industri Agro di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Plt. Direktur Jenderal ILMATE dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Ia juga memiliki pengalaman internasional sebagai Atase Perindustrian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel serta Direktur Akses Pasar Industri Internasional. Dalam kariernya, Putu Juli Ardika dikenal melalui pengembangan sistem digital SIMIRAH dan SIPROSATU untuk sektor minyak goreng dan sawit. Ia juga berperan dalam pengembangan kendaraan pedesaan AMMDes dan investasi kendaraan listrik melalui kebijakan industri nasional. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya.

Putu Juli Ardika is a senior civil servant with extensive experience in the industrial sector and public policy. He currently serves as Director General of Agro Industry at the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, after previously serving as Acting Director General of ILMATE and Acting Secretary General of the Ministry. He also has international experience as Industrial Attaché at the Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels and as Director of International Industrial Market Access. Throughout his career, he has been recognized for developing the SIMIRAH and SIPROSATU digital systems for the cooking oil and palm oil sectors. He also contributed to the development of the AMMDes rural vehicle program and electric vehicle investment through national industrial policies. For his contributions, he received the Satyalancana Wira Karya and Satyalancana Karya Satya awards.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono

Sekretaris Jenderal GAPKI  
Secretary General of GAPKI

Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono merupakan profesional di sektor agribisnis dan kelapa sawit dengan keahlian di bidang agronomi dan keberlanjutan. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Tanah dari Universitas Jember. Kariernya dimulai sebagai staf operasional di anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk pada 1994–2001. Ia kemudian menjabat sebagai Manager Operasional (2001–2008) dan General Manager Operasional (2008–2017) di berbagai wilayah operasional perusahaan, meliputi Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, dan Aceh. Sejak 2017, ia dipercaya sebagai Direktur Agronomy, Research & Sustainability, dan sejak 2025 juga menjabat sebagai Advisor/Komisaris PT AAL. Di tingkat organisasi industri, ia aktif di GAPKI sebagai Sekretaris Jenderal periode 2023–2028, setelah sebelumnya menjabat Ketua Bidang ISPO dan anggota Kompartemen Implementasi ISPO. Pengalamannya menjadikan Hadi Sugeng Wahyudiono sebagai salah satu figur strategis dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono is an agribusiness and palm oil professional with expertise in agronomy and sustainability. He earned a Bachelor's degree in Soil Science from University of Jember. He began his career at a subsidiary of PT Astra Agro Lestari Tbk as operational staff from 1994 to 2001. He later served as Operational Manager and General Manager across several regions, including Central Kalimantan, Riau, East Kalimantan, Jambi, and Aceh. Since 2017, he has served as Director of Agronomy, Research & Sustainability, and since 2025 has also been appointed as Advisor/Commissioner at PT Astra Agro Lestari Tbk. He is also active in Indonesian Palm Oil Association, where he serves as Secretary General for the 2023–2028 period. Previously, he held roles related to ISPO implementation within the organization. His experience has made him one of the prominent figures in sustainable palm oil development in Indonesia.



Anggota Dewan Pengawas  
Members of the Board of Supervisors

## Taufik Mappaenre

Ahli Hukum dan Audit (Tim Asistensi Menko Bidang Perekonomian)

Legal and Audit Expert (Assistance Team to the Coordinating Minister for Economic Affairs)

Taufik Mappaenre adalah profesional hukum dengan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, LL.M dari Harvard Law School, dan Juridical Doctor dari Leiden University. Ia memiliki rekam jejak panjang di sektor publik dan swasta, mengemban berbagai posisi strategis mulai dari Kepala Bagian di Setkab/Setneg, Deputy Ketua BPPN, hingga staf khusus dan tenaga ahli hukum di berbagai kementerian seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenparekraf, dan Kementerian Perindustrian. Sejak 2018, Taufik juga memperkuat Tim Asistensi Menko Perekonomian RI. Di sektor swasta, kariernya membentang dari industri korporat hingga firma hukum. Saat ini, ia aktif sebagai Partner di MRP Law Office, pendiri sekaligus Managing Partner TMP Legal Consultant, serta pendiri platform digital MyKonsul Marketplace.

Taufik Mappaenre is a legal professional who earned a Bachelor of Law degree from Trisakti University, an LL.M degree from Harvard Law School, and a Juridical Doctor degree from Leiden University. He has extensive experience across both the public and private sectors, having held various strategic positions, including Division Head at the State Secretariat/Cabinet Secretariat, Deputy Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency, as well as Special Staff and Legal Advisor roles at several ministries, including the Ministry of Public Housing of the Republic of Indonesia, Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, and Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. Since 2018, he has also served on the Assistance Team to the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. In the private sector, his career spans corporate industries and legal practice. He currently serves as Partner at MRP Law Office, Founder and Managing Partner of TMP Legal Consultant, and Founder of the digital platform MyKonsul Marketplace.

### 3.9 Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung dalam struktur tata kelola BPDP yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Keberadaan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan audit eksternal, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan maupun pelaksanaan audit guna menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan, sehingga pengelolaan BPDP dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan *prudent*.

Dewan Pengawas membentuk Komite Audit melalui Keputusan Nomor KEP-52.1/BPDPKS/DP/XI/2023 tentang Komite Audit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketua Komite Audit dijabat oleh salah satu Anggota Dewan Pengawas. Keputusan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Nomor KEP-59/BPDP/DP/VII/2025 yang berlaku sejak 21 Juli 2025 hingga 3 November 2025. Perubahan tersebut dilakukan dengan masuknya Meinar Mayanti Panjaitan sebagai anggota Komite Audit menggantikan Lupi Hartono yang telah dilantik sebagai Direktur Penghimpunan Dana.

Komite Audit kemudian ditetapkan kembali oleh Dewan Pengawas yang baru pada tanggal 13 Februari 2026 melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP-02/BPDP/DP/II/2026. Penetapan tersebut mempertahankan susunan keanggotaan Komite Audit yang sama dengan periode sebelumnya, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Dr (jur) Taufik Mappaenre, S.H., LL.M	Ketua	Profil lengkap beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas, Laporan Tahunan ini.
2	Meinar Mayanti Panjaitan, S.E., Ak. M.M.	Anggota	Memiliki latar belakang pendidikan jenjang Strata 1 di bidang Akuntansi dan dan Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan.
3	Ronny Rusli, MBA	Anggota	Sarjana Ekonomi, di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 1994. Master of Business Administration, di KenanFlagler Business School, the UNI at Chapel Hill, USA tahun 2000.

### 3.9 Audit Committee

The Audit Committee is a supporting organ within BPDP's governance structure established under and accountable to the Supervisory Board. The Audit Committee is established to assist the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system, the effective implementation of internal and external audit functions, and the application of good governance principles. In carrying out its duties, the Audit Committee conducts monitoring and evaluation of audit planning and implementation to assess the adequacy of internal controls, including financial reporting processes, thereby ensuring that BPDP is managed in an accountable, transparent, and prudent manner.

The Supervisory Board established the Audit Committee through Decree Number KEP-52.1/BPDPKS/DP/XI/2023 concerning the Audit Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency. The Chairperson of the Audit Committee is held by one of the members of the Supervisory Board. The decree was subsequently amended through Decree Number KEP-59/BPDP/DP/VII/2025, which became effective from 21 July 2025 until 3 November 2025. The amendment was made following the appointment of Meinar Mayanti Panjaitan as a member of the Audit Committee, replacing Lupi Hartono, who had been appointed as Director of Fund Collection.

The Audit Committee was subsequently reappointed by the newly appointed Supervisory Board on 13 February 2026 through Supervisory Board Decree Number KEP-02/BPDP/DP/II/2026. The reappointment maintained the same composition of the Audit Committee membership as in the previous period, as follows:

## Piagam Komite Audit

Komite Audit BPDP berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada 1 Januari 2021 sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta mekanisme kerja Komite Audit. Piagam tersebut mengatur ketentuan mengenai tata kelola dan tata kerja Komite Audit yang wajib dipedomani oleh seluruh anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas utama membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit BPDP sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan auditor *intern*;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun auditor *ekstern*;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BPDP;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI dan auditor eksternal;
6. Memberikan rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Pengawas; dan
7. Melakukan identifikasi hal-hal signifikan yang memerlukan perhatian
8. Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya, secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diminta, berikut rekomendasi.

## Audit Committee Charter

The BPDP Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter established on 1 January 2021 as the basis for the implementation of the Audit Committee's duties, functions, and working mechanisms. The Charter sets forth provisions regarding the governance structure and working procedures of the Audit Committee, which must be adhered to by all members in carrying out their supervisory functions professionally and independently.

## Duties and Responsibilities

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee has the primary duty of assisting the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the Internal Control System as well as the effectiveness of audits conducted by internal and external auditors. The following are the duties and responsibilities of the BPDP Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter:

1. Assist the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of duties performed by external and internal auditors;
2. Assess the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Audit Unit (IAU) as well as external auditors;
3. Provide recommendations regarding the improvement of management control systems and their implementation;
4. Ensure that satisfactory evaluation procedures are in place for all information issued by BPDP;
5. Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions by the Board of Directors in response to findings from the Internal Audit Unit and external auditors;
6. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the appointment of public accounting firms; and
7. Identify significant matters requiring the attention of the Supervisory Board.
8. Carry out other duties assigned by the Supervisory Board, both periodically and on an ad hoc basis upon request, including providing recommendations.

## Rapat Komite Audit

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Komite Audit juga bertugas menilai pelaksanaan dan hasil audit serta memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan sistem pengendalian manajemen di BPDP. Komite Audit memastikan tersedianya prosedur evaluasi yang memadai atas informasi yang diterbitkan oleh BPDP dan memantau tindak lanjut Direksi terhadap temuan hasil audit.

Selain itu, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik serta mengidentifikasi berbagai hal signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu disertai rekomendasi yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Audit secara rutin mengadakan rapat minimal satu kali setiap bulan bersama SPI dan manajemen untuk membahas perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta berbagai isu strategis lainnya.

## Audit Committee Meetings

In addition to carrying out its supervisory function, the Audit Committee is also responsible for assessing the implementation and results of audits and providing recommendations related to the improvement of BPDP' management control system. The Audit Committee ensures the availability of adequate evaluation procedures for information issued by BPDP and monitors the Board of Directors' follow-up actions on audit findings. Furthermore, the Audit Committee provides recommendations regarding the appointment of Public Accounting Firms and identifies various significant matters requiring the attention of the Supervisory Board, both periodically and on an ad hoc basis, along with the necessary recommendations. In carrying out its duties, the Audit Committee regularly conducts meetings at least once a month with the Internal Audit Unit and management to discuss the progress of follow-up actions on audit recommendations as well as other strategic issues.



### 3.10 Direksi

Pejabat Pengelola BLU BPDP atau Direksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga professional non pegawai negeri sipil yang bertanggung-jawab terhadap kinerja keuangan dan operasional BLU yang terdiri dari Direktur Utama sebagai pemimpin BLU, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum sebagai Pejabat Keuangan, Direktorat Perencanaan, Penghimpunan dan Pengembangan Dana, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir dan Direktur Hukum dan Kerja Sama sebagai Pejabat Teknis. Pejabat Pengelola/Direksi BLU BPDP bertugas melakukan operasional terhadap:

1. Perencanaan dan penganggaran.
2. Penghimpunan dana.
3. Pengelolaan dana.
4. Penyaluran penggunaan dana.
5. Penatausahaan dan pertanggungjawaban.

### Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Establishment	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Eddy Abdurrachman	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Sekarang June 2025 - present
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum Director of Finance, Risk Management, and General Affairs	Zaid Burhan Ibrahim	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Sekarang June 2025 - present
Plt. Direktur Hukum & Kerja Sama Act. Director of Legal Affairs and Institutional Cooperation		Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Februari 2026 June 2025 - February 2026
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Director of Downstream Sector Fund Distribution	Mohammad Alfansyah	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Sekarang June 2025 - present
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Director of Upstream Sector Fund Distribution	Normansyah Hidayat Syahrudin	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Sekarang June 2025 - present
Direktur Perencanaan, Penghimpunan dan Pengembangan Dana Director of Planning, Collection, and Fund Development	Lupi Hartono	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Decree of the Minister of Finance No. 190 Tahun 2025 June 13, 2025	Juni 2025 – Sekarang June 2025 - present

### 3.10 Board of Directors

The BLU Management Officials of Plantation Fund Management Agency, or the Board of Directors, consist of civil servants and/or professional non-civil servant personnel who are responsible for the financial and operational performance of the Public Service Agency. The management structure comprises the President Director as the head of the BLU, the Director of Finance, Risk Management & General Affairs as the Financial Officer, the Director of Fund Planning, Collection & Development, the Director of Upstream Sector Fund Distribution, the Director of Downstream Sector Fund Distribution, and the Director of Legal Affairs & Cooperation as Technical Officers. The Management Officials/Board of Directors of the BLU BPDP are responsible for carrying out operational activities related to:

1. Planning and budgeting.
2. Fund collection.
3. Fund management.
4. Distribution and utilization of funds.
5. Administration and accountability.

## Tugas dan Fungsi Direksi BPDP

## Duties and Functions of the Board of Directors of Plantation Fund Management Agency

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	<b>Direktur Utama</b>	melaksanakan perencanaan dan penganggaran, pengumpulan dan pengelolaan dan penyaluran penggunaan Dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan Penganggaran;</li> <li>2. Pelaksanaan Penghimpunan Dana;</li> <li>3. Pelaksanaan Pengembangan Dana</li> <li>4. Pelaksanaan penyaluran Dana sektor hulu dan hilir;</li> <li>5. Pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana;</li> <li>6. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana</li> <li>7. Penyusunan peraturan dan perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum</li> <li>8. Pelaksanaan kerja sama kelembagaan dan masyarakat.</li> <li>9. Pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana</li> <li>10. Pengelolaan keuangan, umum, sumber daya manusia, kepatuhan internal, manajemen kinerja dan risiko, komunikasi, serta sistem informasi dan basis data; dan</li> <li>11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komite Pengarah.</li> </ol>
2	<b>Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum</b>	melaksanakan melaksanakan pengelolaan keuangan, umum, sumber daya manusia, kepatuhan internal, manajemen kinerja dan risiko, komunikasi, serta sistem informasi dan basis data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, penyelesaian transaksi keuangan, serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;</li> <li>2. Pengelolaan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan keprotokolan dan kearsipan;</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, kode etik dan perilaku, pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, manajemen risiko, serta pengembangan dan implementasi budaya risiko; dan Pengelolaan strategi komunikasi, layanan informasi, dan edukasi publik, serta pengelolaan sistem informasi dan basis data;</li> <li>4. Pengelolaan strategi komunikasi, layanan informasi dan edukasi publik serta pengelolaan sistem informasi berbasis data.</li> </ol>
3	<b>Direktur Perencanaan, Penghimpunan dan Pengembangan Dana</b>	melaksanakan Penghimpunan, dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, pengembangan program dan layanan, serta pengumpulan dan pengembangan Dana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana strategis bisnis, perencanaan dan evaluasi, penyusunan, perbaikan tata kelola, dan harmonisasi program dan layanan, serta penyusunan standar pelayanan minimum;</li> </ol>

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
3	<b>Direktur Perencanaan, Penghimpunan dan Pengembangan Dana</b>	melaksanakan Penghimpunan, dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, pengembangan program dan layanan, serta penghimpunan dan pengembangan Dana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tarif layanan, penatausahaan penghimpunan Dana, pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan, pelaksanaan penagihan, serta penyelesaian keberatan dan restitusi; dan Pengembangan rencana pengalokasian Dana</li> <li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Dana di pasar uang dan pasar modal, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Dana;</li> </ol>
4	<b>Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu</b>	melaksanakan penyaluran Dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa sawit</li> <li>2. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kakao; dan</li> <li>3. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa.</li> </ol>
5	<b>Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir</b>	melaksanakan penyaluran Dana riset, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, bahan bakar nabati, pemenuhan kebutuhan pangan, dan hilirisasi industri perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan layanan, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana riset;</li> <li>2. Perencanaan, pelaksanaan, rekrutmen penyelenggara dan penerima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana pengembangan sumber daya manusia perkebunan;</li> <li>3. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana biodiesel, serta penunjukan surveyor; dan</li> <li>4. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Dana program pemenuhan kebutuhan pangan dan hilirisasi industri perkebunan.</li> </ol>
6	<b>Direktur Hukum dan Kerjasama</b>	melaksanakan penyusunan peraturan dan perjanjian, pemberian pendapat dan advokasi hukum, serta kerja sama kelembagaan dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, dan harmonisasi peraturan, pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;</li> <li>2. Penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi penyiapan bahan penyusunan, dan penelaahan perjanjian; dan</li> <li>3. Penilaian proposal, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama kementerian/lembaga, perusahaan, lembaga kemasyarakatan, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau koperasi perkebunan, dan pelaksanaan promosi perkebunan yang melibatkan kementerian/lembaga, perusahaan, lembaga kemasyarakatan, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau koperasi perkebunan.</li> </ol>



### 3.10.1 Profil Direksi

#### 3.10.1 Board of Directors Profile



#### **Eddy Abdurrachman**

Direktur Utama  
President Director

Beliau merupakan lulusan Sarjana Ilmu Keuangan dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta (1979) yang juga telah menyelesaikan Kursus Reguler Lemhanas KRA XXXII (1999). Dengan latar belakang tersebut, beliau memiliki rekam jejak kepemimpinan yang panjang di berbagai instansi strategis pemerintahan, seperti Direktur Jenderal Bea dan Cukai (2002–2006), Staf Ahli Menteri Keuangan (2006–2008), serta Sekretaris Menko Bidang Perekonomian (2008–2014). Setelah sebelumnya memimpin sebagai Direktur Utama di BPDPKS, beliau kini resmi diangkat kembali sebagai Direktur Utama di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 terhitung sejak Juni 2025 hingga sekarang.

He earned a Bachelor's degree in Financial Science from the Institute of Finance Science Jakarta in 1979 and completed the Regular Course of the National Resilience Institute (Lemhanas) KRA XXXII in 1999. With this background, he has built an extensive leadership career across various strategic government institutions, including serving as Director General of Customs and Excise from 2002 to 2006, Expert Staff to the Minister of Finance from 2006 to 2008, and Secretary to the Coordinating Minister for Economic Affairs from 2008 to 2014. After previously serving as President Director of BPDPKS, he was reappointed as President Director of BPDP pursuant to Minister of Finance Decree Number 190 of 2025, effective from June 2025 to the present.



## Zaid Burhan Ibrahim

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum  
Director of Finance, Risk Management & General Affairs

Plt. Direktur Hukum & Kerja Sama  
Acting Director of Legal Affairs & Cooperation

Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung (1996) dan meraih gelar Master of Regional Planning dari Institut Teknologi Bandung (2006). Mengawali karier di Kementerian Keuangan, beliau memiliki pengalaman kepemimpinan di berbagai unit kerja, antara lain sebagai Kepala KPPN Tipe A1 Medan (2011–2013), Kepala KPPN Jakarta IV (2013–2017), serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh (2017–2020). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BDPKS sejak Maret 2020. Sejak Juni 2025, beliau resmi menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025.

He earned a Bachelor's degree in Economics from the University of Lampung in 1996 and a Master of Regional Planning degree from Institut Teknologi Bandung in 2006. He began his career at the Ministry of Finance and has held various leadership positions, including Head of the Type A1 State Treasury Service Office (KPPN) Medan from 2011 to 2013, Head of KPPN Jakarta IV from 2013 to 2017, and Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for Aceh Province from 2017 to 2020. Previously, he served as Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management at BDPKS since March 2020. Since June 2025, he has officially served as Director of Finance, Risk Management, and General Affairs of BPDP pursuant to Minister of Finance Decree Number 190 of 2025.



## Mohammad Alfansyah

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir  
Director of Downstream Sector Fund Distribution

Beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (2001) yang kemudian meraih gelar Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (2015). Mengawali karier profesional di Kementerian ESDM, beliau memiliki keahlian mendalam di bidang regulasi energi dengan rekam jejak sebagai Analis Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Koordinator Penelaahan Hukum, hingga Kepala Bagian Hukum Migas. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyaluran Dana di BDPKS, sebelum akhirnya resmi diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 terhitung sejak Juni 2025 hingga sekarang.

He earned a Bachelor of Law degree from Universitas Gadjah Mada in 2001 and later obtained a Master's degree in Constitutional Law from the University of Indonesia in 2015. He began his professional career at the Ministry of Energy and Mineral Resources and has extensive expertise in energy regulation, having served as Associate Legislative Analyst, Coordinator of Legal Review, and Head of the Oil and Gas Legal Division. Previously, he served as Director of Fund Distribution at BDPKS before being officially appointed as Director of Downstream Sector Fund Distribution at BPDP pursuant to Minister of Finance Decree Number 190 of 2025, effective from June 2025 to the present.



## Normansyah Syahrudin

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu  
Director of Upstream Sector Fund  
Distribution

Beliau menempuh pendidikan teknik mesin di Politeknik Universitas Indonesia, lalu meraih gelar sarjana dan magister di bidang Manajemen Industri dari University of New South Wales, Australia, serta gelar Doktor (Ph.D.) dari University of Bergamo, Italia. Mengawali karier sebagai ASN pada tahun 2003 di Kementerian Pertanian, beliau memiliki spesialisasi yang kuat dalam pemasaran hasil perkebunan, termasuk pengalaman mewakili Indonesia di berbagai forum internasional seperti FAO, ICCO, ICO, dan ITRC. Setelah sebelumnya dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Penghimpunan Dana di BPDPKS, beliau kini resmi diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2025 terhitung sejak Juni 2025 hingga sekarang.

He studied Mechanical Engineering at the Polytechnic of the University of Indonesia, and later obtained bachelor's and master's degrees in Industrial Management from University of New South Wales, as well as a Ph.D. from University of Bergamo. He began his career as a civil servant in 2003 at the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, specializing in plantation commodity marketing. He has also represented Indonesia in various international forums, including Food and Agriculture Organization, International Cocoa Organization, International Coffee Organization, and International Tripartite Rubber Council. Prior to his current position, he served as Director of Fundraising at Palm Oil Plantation Fund Management Agency. He currently serves as Director of Upstream Sector Fund Distribution at the Plantation Fund Management Agency based on Minister of Finance Decree Number 190 of 2025, effective since June 2025.



## Lupi Hartono

Direktur Perencanaan, Penghimpunan  
& Pengembangan Dana  
Director of Fund Planning, Collection &  
Development

Beliau meraih pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka, serta Magister Manajemen Keuangan di Universitas Persada Indonesia YAI. Kariernya dimulai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana audit pada 1995. Ia kemudian menduduki berbagai posisi strategis di bidang kepabeanan, audit, dan perencanaan strategis, termasuk sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai di sejumlah wilayah. Pada 2017–2020, beliau juga bertugas sebagai Atase Keuangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Sejak Juni 2025, beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan.

He earned a Diploma III degree from State College of Accountancy, a Bachelor's degree in Economics from Open University, and a Master's degree in Financial Management from Persada Indonesia YAI University. He began his career at the Directorate General of Customs and Excise as an audit officer in 1995. He subsequently held various strategic positions in customs, audit, and strategic planning, including serving as Head of Customs and Excise Offices in several regions. From 2017 to 2020, he also served as Financial Attaché at the Embassy of the Republic of Indonesia in Singapore. Since June 2025, he has served as Director of Fund Planning, Collection, and Development at the Plantation Fund Management Agency.

### 3.11 Kepala Satuan dan Kepala Divisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025, setiap divisi di Badan Pengelola Dana Perkebunan memiliki tugas spesifik sesuai fungsinya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan masing-masing. Tugas ini mencakup pengelolaan keuangan, SDM, kepatuhan dan risiko, komunikasi, perencanaan dan penghimpunan dana, penyaluran dana sektor hulu dan hilir, serta hukum dan kerja sama. Dengan pembagian tugas ini, pengelolaan dana perkebunan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan PMK.

No.	Divisi	Tugas
1	Satuan Pemeriksaan Intern	melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Dana.
2	Keuangan	Menyiapkan bahan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, transaksi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
3	Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia	Menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, tata laksana, SDM, manajemen kinerja, tata usaha, kerumahausahaan, BMN, keprotokolanan, dan kearsipan.
4	Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Menyiapkan bahan pengendalian internal, kode etik, pengelolaan gratifikasi, pengaduan, manajemen risiko, dan budaya risiko.
5	Divisi Komunikasi dan Layanan Informasi	Menyiapkan bahan strategi komunikasi, layanan informasi, edukasi publik, sistem informasi, dan basis data.
6	Divisi Perencanaan dan Pengembangan Program dan Layanan	Menyiapkan bahan rencana strategis bisnis, perencanaan dan evaluasi, tata kelola program/layanan, harmonisasi program, dan standar pelayanan minimum.
7	Divisi Penghimpunan Dana	Menyiapkan bahan tarif layanan, penatausahaan penghimpunan dana, rekonsiliasi penerimaan, penagihan, keberatan, dan restitusi.
8	Divisi Pengembangan Dana	Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dana di pasar uang dan pasar modal, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana.
9	Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit I	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
10	Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
11	Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kakao	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kakao.
12	Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana peremajaan, sarana, dan prasarana perkebunan kelapa.

No.	Divisi	Tugas
13	Divisi Penyaluran Dana Riset	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan layanan, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana riset.
14	Divisi Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, rekrutmen penyelenggara dan penerima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dana pengembangan SDM perkebunan.
15	Divisi Penyaluran Dana Pengembangan Bahan Bakar Nabati	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran dana biodiesel, serta penunjukan surveyor.
16	Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi	Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dana program pemenuhan kebutuhan pangan dan hilirisasi industri perkebunan.
17	Divisi Hukum	Menyiapkan bahan penyusunan, penelaahan, harmonisasi peraturan, pertimbangan dan pendapat hukum, dokumentasi hukum, penelaahan kasus, bantuan hukum, serta perjanjian.
18	Divisi Kerja Sama Kelembagaan	Melakukan penilaian proposal, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama kementerian/lembaga, serta promosi perkebunan yang melibatkan kementerian/lembaga.
19	Divisi Kerja Sama Kelembagaan	Melakukan penilaian proposal, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama kementerian/lembaga, serta promosi perkebunan yang melibatkan kementerian/lembaga.

### 3.11 Heads of Units and Heads of Divisions

Under Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025, each division within the Palm Oil Plantation Fund Management Agency is assigned specific responsibilities aligned with its respective functions, including planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting of activities. These responsibilities cover financial management, human resources, compliance and risk management, communication, planning and fund collection, upstream and downstream fund disbursement, as well as legal affairs and cooperation. Through this structured division of duties, plantation fund management is carried out effectively, efficiently, and accountably in accordance with the provisions of the regulation.

No.	Division	Key Roles & Responsibilities
1	Internal Audit Unit	Carry out internal oversight of the implementation of the duties and functions of the Fund Management Agency.
2	Finance Division	Prepares materials for corporate budgeting and business planning; manages budget allocation, treasury functions, financial transactions, accounting, and regulatory financial reporting.
3	General Affairs and Human Resources Division	Prepares materials for organizational development, institutional procedures, human resource management, performance management, administration, internal operations & facilities, state-owned assets management, protocol, and corporate archiving.

No.	Division	Key Roles & Responsibilities
4	Compliance and Risk Management Division	Prepares materials for internal control systems, code of ethics, anti-gratification management, whistleblowing & grievance mechanisms, risk management frameworks, and fostering an institutional risk-aware culture.
5	Communications and Information Services Division	Prepares materials for corporate communication strategies, public information services, community education, information systems management, and database administration.
6	Planning, Program, and Service Development Division	Prepares materials for strategic business plans, planning and evaluation, program/service governance frameworks, program harmonization, and minimum service standards.
7	Fund Collection Division	Prepares materials for service tariffs, fund collection administration, revenue reconciliation, invoicing/billing, appeals, and restitution processes.
8	Fund Management & Investment Division	Prepares materials for the planning and execution of fund investments in money markets and capital markets, as well as the monitoring, evaluation, and reporting of asset management performance.
9	Oil Palm Upstream Sector Fund Disbursement Division I	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of fund disbursements for replanting, infrastructure, and facilities within the oil palm plantation sector.
10	Oil Palm Upstream Sector Fund Disbursement Division II	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of fund disbursements for replanting, infrastructure, and facilities within the oil palm plantation sector.
11	Cocoa Upstream Sector Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of fund disbursements for replanting, infrastructure, and facilities within the cocoa plantation sector.
12	Coconut Upstream Sector Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of fund disbursements for replanting, infrastructure, and facilities within the coconut plantation sector.
13	Research Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, service development, data and information management, monitoring, evaluation, and reporting of research fund allocations.
14	Human Resources Development Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, recruitment of training providers and beneficiaries, monitoring, evaluation, and reporting of plantation human resource development funds.
15	Biofuel Development Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of biodiesel fund disbursements, as well as the appointment of official surveyors.

No.	Division	Key Roles & Responsibilities
16	Food Programs and Downstream Fund Disbursement Division	Prepares materials for planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting of fund disbursements for food security programs and the downstream development of the plantation industry.
17	Legal Division	Prepares materials for drafting, reviewing, and harmonizing regulations; provides legal advice, counseling, and opinions; manages legal documentation, case assessments, legal assistance, and contract/agreement formulations.
18	Institutional Cooperation Division	Conducts proposal appraisal, planning, execution, monitoring, and evaluation of institutional partnerships with ministries and government agencies, alongside handling sector promotions involving state institutions.
19	Community and MSME Cooperation Division	Conducts proposal appraisal, planning, execution, monitoring, and evaluation of partnerships with corporations, community organizations, MSMEs, and/or plantation cooperatives, alongside handling sector-specific promotional initiatives.



### 3.12 Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025, pengelolaan fungsi SDM BPDP dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.

#### Jumlah Pegawai

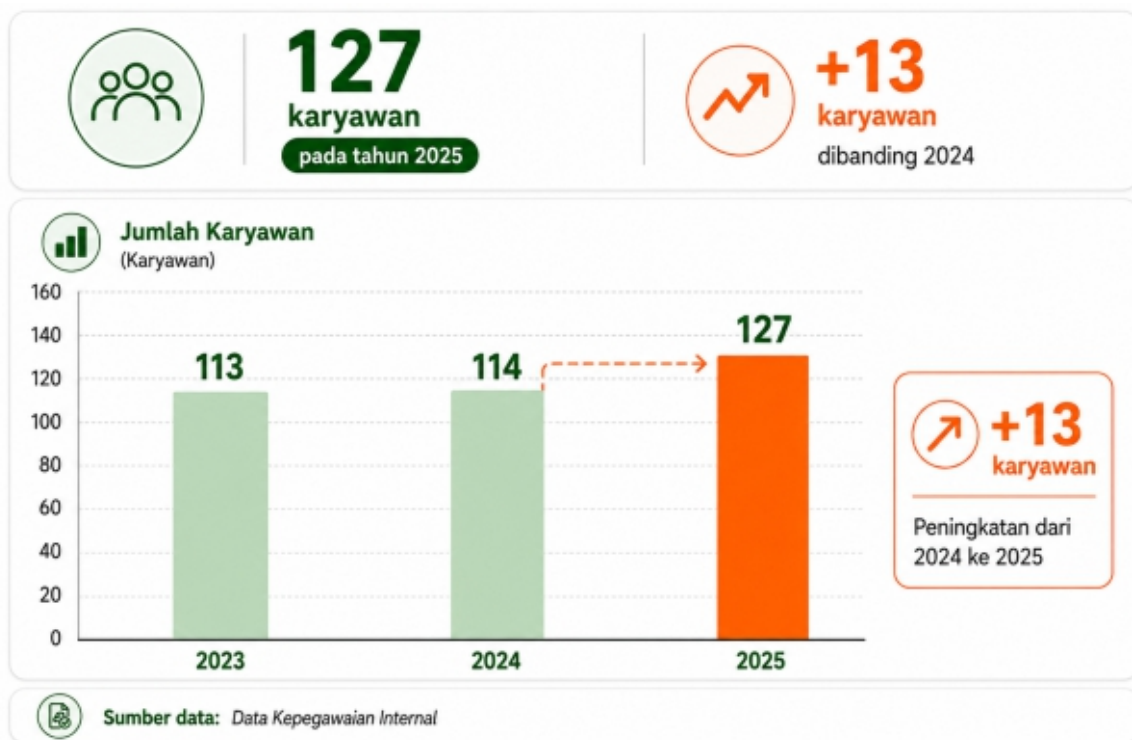
Sumber daya manusia Badan Pengelola Dana Perkebunan pada tahun 2025 berjumlah 127 karyawan, yang terdiri atas pegawai PNS dan Non-PNS. Jumlah ini meningkat 13 orang dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 114 karyawan. Komposisi pegawai dengan status PNS dan Non-PNS menunjukkan dukungan SDM yang beragam dalam menjalankan fungsi kelembagaan, mulai dari pengambilan kebijakan, pengelolaan program, hingga pelaksanaan kegiatan operasional organisasi.

### 3.12 Employee

Based on Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025, the human resources management function at Plantation Fund Management Agency is carried out by the Human Resources & General Affairs Division, which reports directly to the Director of Finance, Risk Management & General Affairs.

#### Number of Employees

In 2025, the workforce of the Plantation Fund Management Agency totaled 127 employees, consisting of both civil servants and non-civil servant employees. This represents an increase of 13 employees compared to 114 employees recorded in 2024. The composition of civil servant and non-civil servant personnel reflects a diverse workforce supporting the organization's functions, ranging from policy formulation and program management to the implementation of operational activities.

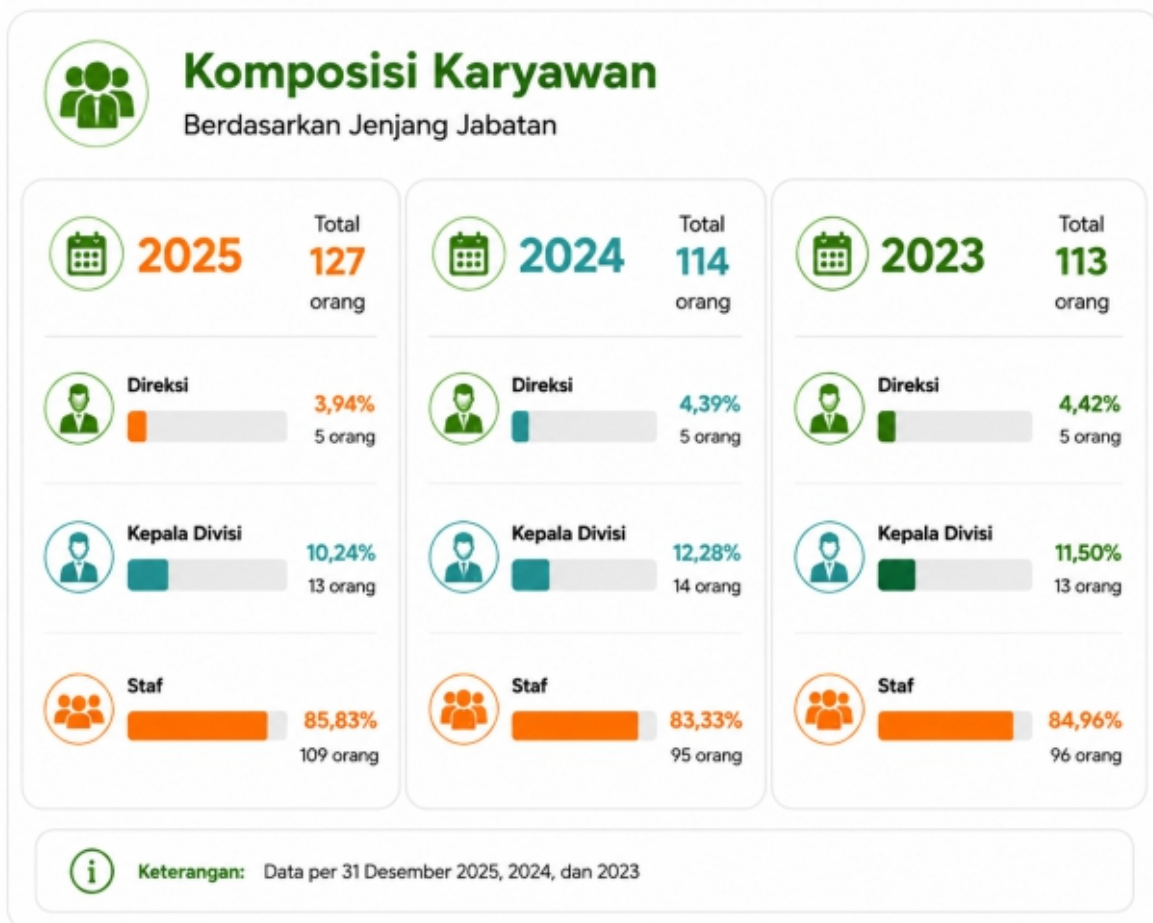


### Komposisi Jabatan

Jumlah karyawan Badan Pengelola Dana Perkebunan meningkat dari 114 orang pada tahun 2024 menjadi 127 orang pada tahun 2025, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada level staf yang menunjukkan penguatan kapasitas operasional organisasi, sementara jumlah Direksi dan Kepala Divisi relatif stabil, mencerminkan keseimbangan antara fungsi strategis dan pelaksanaan operasional.

### Position Composition

The number of employees at the Plantation Fund Management Agency increased from 114 employees in 2024 to 127 employees in 2025. The largest growth occurred at the staff level, reflecting the strengthening of the organization's operational capacity, while the number of Directors and Division Heads remained relatively stable, indicating a balanced structure between strategic functions and operational execution.

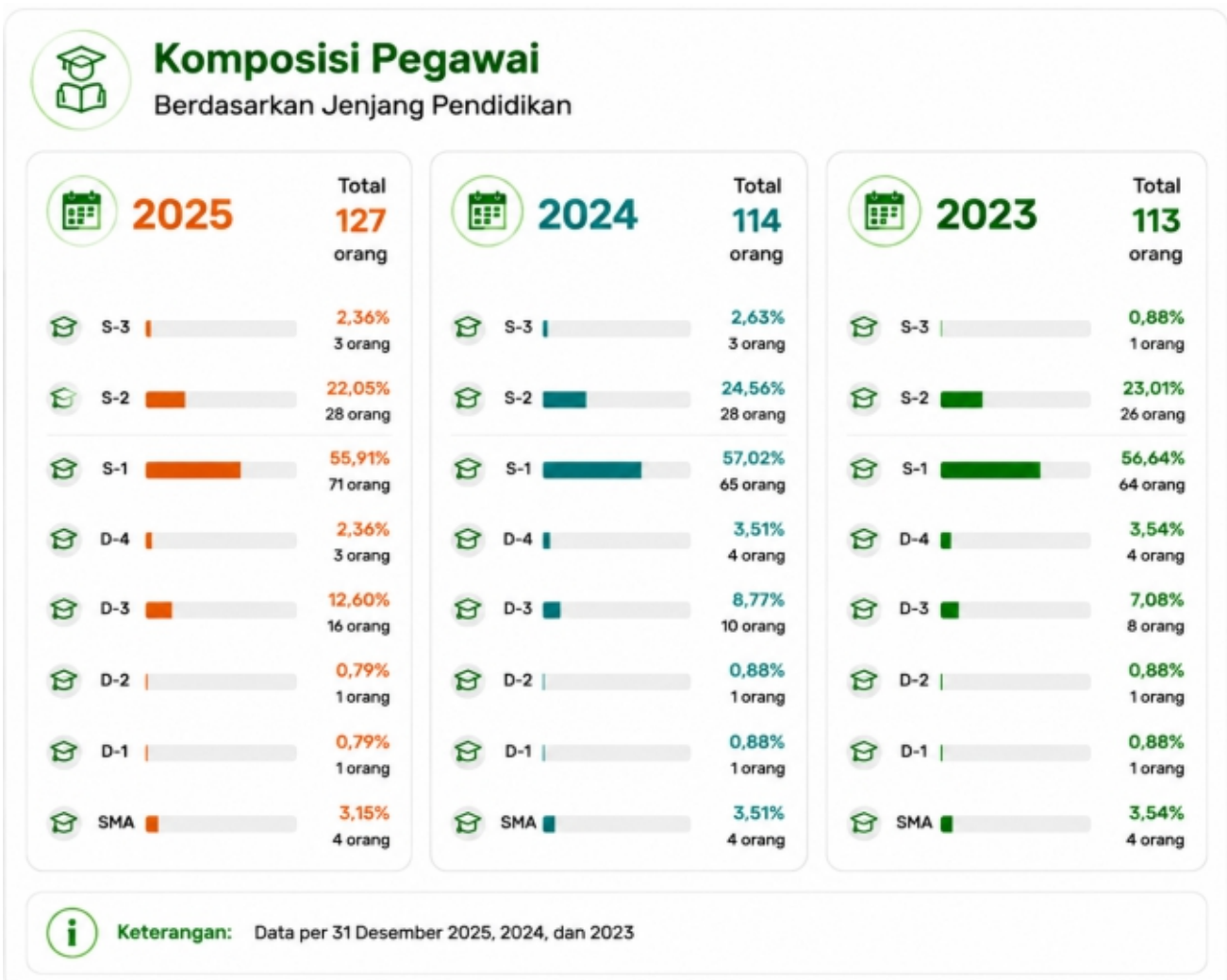


### Pendidikan

Pada tahun 2025 dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 sebanyak 71 orang (55,91%), diikuti S2 sebanyak 28 orang (22,05%). Pegawai dengan pendidikan S3 ada 3 orang (2,36%), sedangkan lulusan diploma dan SMA mencapai 25 orang atau 19,9% dari total pegawai. Hal ini mencerminkan bahwa organisasi didukung oleh SDM berpendidikan tinggi, dengan proporsi signifikan pada jenjang S1 dan S2.

### Education

In 2025, based on educational background, the majority of employees held bachelor's degrees, totaling 71 employees (55.91%), followed by master's degrees with 28 employees (22.05%). Employees with doctoral degrees accounted for 3 employees (2.36%), while diploma and senior high school graduates totaled 25 employees, representing 19.9% of the workforce. This composition reflects that the organization is supported by a highly educated workforce, with significant representation at the undergraduate and postgraduate levels.



### Jenis Kelamin

Dalam kategori jenis kelamin, pegawai laki-laki mencapai 81 orang (63,8%), sedangkan perempuan 46 orang (36,2%), menandakan dominasi laki-laki dalam struktur pegawai saat ini.

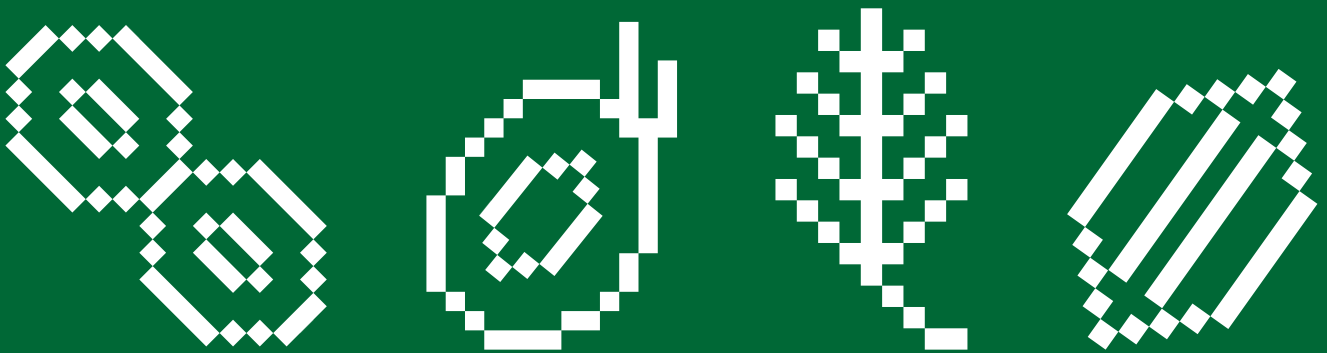
### By gender category

Male employees accounted for 81 employees (63.8%), while female employees accounted for 46 employees (36.2%), indicating that the current workforce composition remains predominantly male.



## Pembahasan dan Analisis Kinerja

Melalui pelaksanaan program yang berkelanjutan dan terarah, diharapkan manfaat yang dihasilkan dapat semakin memperkuat daya saing, produktivitas, serta kontribusi sektor perkebunan bagi perekonomian Indonesia.



## Performance Discussion and Analysis

Through the implementation of sustainable and well-directed programs, the resulting impact is expected to further strengthen the competitiveness, productivity, and contribution of Indonesia's plantation sector to the national economy.

# 04

# 04

## 4.1 Sekilas Perkebunan Indonesia 2025

Secara makroekonomi, subsektor perkebunan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai laporan resmi pemerintah, subsektor tanaman perkebunan pada tahun 2025 menyumbang sekitar 4,15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara itu, sektor pertanian secara keseluruhan berkontribusi sekitar 14,35% terhadap PDB Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kelapa sawit menjadi komoditas dominan dalam subsektor perkebunan nasional dengan kontribusi sekitar 82% dari total produksi perkebunan Indonesia pada tahun 2025. Dengan proporsi tersebut, kontribusi kelapa sawit terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai sekitar 3,4%. Angka ini menegaskan bahwa industri sawit tidak hanya berperan sebagai komoditas ekspor unggulan, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah Indonesia.

Industri kelapa sawit Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin kuat dan strategis dalam menopang perekonomian nasional. Peningkatan produksi, konsumsi domestik, serta ekspor mencerminkan tingginya peran sektor sawit sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyedia energi terbarukan, sekaligus sumber devisa negara.

Berdasarkan data GAPKI (2025), produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun 2025 tercatat mencapai 51,660 juta ton, meningkat 7,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar 48,164 juta ton. Sementara itu, produksi minyak inti sawit (PKO) juga mengalami kenaikan sebesar 6,41% menjadi 4,893 juta ton dari sebelumnya 4,598 juta ton. Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO nasional pada tahun 2025 mencapai 56,553 juta ton atau meningkat 7,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 52,762 juta ton.

## 4.1 Overview of Indonesian Plantations 2025

From a macroeconomic perspective, the plantation subsector continued to play an important role in supporting Indonesia's economy throughout 2025. Based on data from Statistics Indonesia (BPS) and various official government reports, the plantation subsector contributed approximately 4.15% to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). Meanwhile, the broader agricultural sector contributed around 14.35% to national GDP, underlining the strategic role of agriculture as one of the country's key economic pillars.

Within the plantation subsector, palm oil remained Indonesia's most dominant commodity, accounting for approximately 82% of total plantation production in 2025. With this proportion, palm oil's contribution to national GDP is estimated at around 3.4%. This highlights the industry's vital role not only as a leading export commodity, but also as a driver of economic growth, energy security, employment creation, and regional development across Indonesia.

Throughout 2025, Indonesia's palm oil industry continued to demonstrate strong performance amid evolving global economic conditions. Rising production, growing domestic demand, and improving export performance reflected the sector's resilience and strategic importance to the national economy.

According to data from the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), crude palm oil (CPO) production in 2025 reached 51.660 million tons, increasing by 7.26% from 48.164 million tons in 2024. Palm kernel oil (PKO) production also increased by 6.41% to 4.893 million tons from 4.598 million tons in the previous year. As a result, total CPO and PKO production reached 56.553 million tons, representing an annual growth of 7.18%.

Di sisi domestik, konsumsi minyak sawit nasional meningkat 3,82% menjadi 24,772 juta ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 23,859 juta ton. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor biodiesel yang mencapai 12,704 juta ton atau naik 10,97% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,447 juta ton. Kenaikan ini didorong implementasi kebijakan peningkatan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sawit.

Selain biodiesel, konsumsi sektor oleokimia juga meningkat sebesar 1,22% menjadi 2,234 juta ton. Namun demikian, konsumsi sektor pangan mengalami penurunan sebesar 3,64% menjadi 9,834 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,205 juta ton.

Kinerja perdagangan internasional sektor sawit juga menunjukkan tren yang positif. Total ekspor produk sawit Indonesia tahun 2025 mencapai 32,34 juta ton atau meningkat 9,51% dibandingkan tahun 2024 sebesar 29,53 juta ton. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada produk minyak sawit olahan yang mencapai 22,72 juta ton dari sebelumnya 20,451 juta ton. Ekspor olahan minyak inti sawit meningkat menjadi 1,560 juta ton, oleokimia menjadi 5,076 juta ton, dan ekspor CPO meningkat menjadi 2,964 juta ton.

Domestic consumption also continued to increase, reaching 24.772 million tons in 2025, up 3.82% compared to 2024. The biodiesel sector recorded the most significant increase, growing by 10.97% to 12.704 million tons. This growth was mainly driven by the Government's implementation of the B40 biodiesel blending policy, an important step toward strengthening national energy resilience and expanding the use of renewable energy based on palm oil.

In addition to biodiesel, oleochemical consumption also increased modestly to 2.234 million tons. Meanwhile, food consumption experienced a slight decline to 9.834 million tons compared to the previous year.

Indonesia's palm oil export performance also remained positive throughout 2025. Total exports reached 32.34 million tons, an increase of 9.51% compared to 2024. Processed palm oil products continued to dominate exports, reaching 22.72 million tons, followed by oleochemicals at 5.076 million tons, processed palm kernel oil at 1.560 million tons, and CPO exports at 2.964 million tons.

Berdasarkan negara tujuan, peningkatan ekspor terbesar terjadi ke kawasan Afrika, China, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan. Di sisi lain, ekspor ke India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Secara nilai, ekspor sawit Indonesia pada tahun 2025 mencapai US\$35,87 miliar atau sekitar Rp590 triliun, meningkat 29,23% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US\$27,76 miliar atau sekitar Rp440 triliun. Peningkatan tersebut tidak hanya dipengaruhi kenaikan volume ekspor, tetapi juga didorong oleh penguatan harga rata-rata CIF Rotterdam yang mencapai US\$1.221 per ton dibandingkan tahun 2024 sebesar US\$1.084 per ton.

Di tengah meningkatnya produksi, konsumsi, dan ekspor, stok akhir CPO dan PKO nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,068 juta ton atau turun 19,79% dibandingkan stok akhir tahun 2024 sebesar 2,577 juta ton. Penurunan stok ini menunjukkan tingginya tingkat penyerapan pasar domestik maupun global terhadap produk sawit Indonesia.

Di sisi lain, komoditas kelapa dan kakao juga semakin mendapat perhatian strategis dari Pemerintah sepanjang tahun 2025. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, percepatan peremajaan tanaman, serta penguatan hilirisasi guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah kedua komoditas tersebut di pasar domestik maupun global.

Export growth was particularly strong in several markets, including Africa, China, Malaysia, Bangladesh, and Pakistan. On the other hand, exports to India, the European Union, and the United States experienced declines. In terms of value, Indonesia's palm oil exports reached US\$35.87 billion, or approximately Rp590 trillion, representing an increase of 29.23% compared to the previous year. The increase was supported not only by higher export volumes, but also by stronger global prices, with the average CIF Rotterdam price rising to US\$1,221 per ton from US\$1,084 per ton in 2024.

At the same time, ending stocks of CPO and PKO declined to 2.068 million tons, down 19.79% from the previous year. This decline reflected strong market absorption from both domestic industries and export markets, indicating sustained global demand for Indonesian palm oil products.

Alongside palm oil, coconut and cocoa commodities also received growing strategic attention from the Government throughout 2025. Policy direction increasingly focused on improving productivity, accelerating replanting programs, and strengthening downstream industries in order to increase competitiveness and create greater added value.

Pada sektor kakao, perhatian pemerintah difokuskan pada penguatan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung produksi nasional. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui peremajaan tanaman, perbaikan budidaya, serta penguatan kapasitas petani. Selain itu, pengembangan industri pengolahan kakao terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengingat produktivitas kebun rakyat masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan industri kakao nasional.

Sementara itu, pengembangan komoditas kelapa mulai diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi bahan baku, tetapi juga pada penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan bernilai tambah. Pemerintah mendorong pengembangan industri olahan kelapa agar komoditas ini mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, memperluas peluang pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan arah pengembangan tersebut, kelapa diharapkan tidak lagi hanya diposisikan sebagai komoditas mentah, tetapi juga sebagai basis industri olahan yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja sektor perkebunan Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri hilir nasional. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika global, industri sawit tetap menunjukkan resiliensi yang kuat, sementara komoditas kelapa dan kakao mulai memperlihatkan potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah. Melalui penguatan produktivitas, penerapan prinsip keberlanjutan, serta pengembangan hilirisasi yang berkelanjutan, sektor perkebunan diharapkan terus menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

In the cocoa sector, Government initiatives prioritized strengthening smallholder plantations, which remain the backbone of national cocoa production. Efforts included improving cultivation practices, accelerating replanting programs, and enhancing farmers' capabilities. At the same time, the development of domestic cocoa processing industries continued to be encouraged to support higher value-added products and strengthen the long-term sustainability of Indonesia's cocoa industry.

Meanwhile, the coconut sector began to move beyond its traditional role as a raw commodity producer toward becoming a more integrated downstream industry. Government policies increasingly encouraged the development of higher value-added coconut derivative products in order to expand market opportunities and improve farmers' welfare. Through this approach, coconut is expected to evolve into a more competitive, modern, and sustainable industry capable of contributing greater economic value to Indonesia's plantation sector.

Overall, the performance of Indonesian plantation sector in 2025 reflected its increasingly strategic role in supporting national economic growth, strengthening energy security, creating employment opportunities, and enhancing the competitiveness of downstream industries. Amid global challenges and market dynamics, palm oil continued to demonstrate strong resilience, while coconut and cocoa emerged as important commodities with significant potential for future development. Through continuous improvements in productivity, sustainability, and downstream industrialization, Indonesia's plantation sector is expected to remain a key driver of inclusive and sustainable economic development in the years ahead.

## 4.2 Satu Dekade BPDP

Selama satu dekade terakhir, BPDP telah menjalankan berbagai program strategis yang dirancang untuk memperkuat keberlanjutan industri perkebunan nasional, khususnya kelapa sawit. Pendanaan yang bersumber dari pungutan ekspor dan hasil pengelolaan dana tidak hanya digunakan untuk menjaga stabilitas industri sawit, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun, memperkuat ketahanan energi nasional, mengembangkan SDM, serta mendorong inovasi dan hilirisasi perkebunan Indonesia.

Pada program Peremajaan Perkebunan, BPDP berfokus pada peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat yang sudah tua, tidak produktif, atau menggunakan bibit tidak unggul. Sejak 2016 hingga 2025, program ini telah menjangkau 182.218 pekebun dengan total luasan mencapai 408.146 hektare di 21 provinsi. Provinsi Aceh menjadi daerah penerima dana PSR terbesar selama satu dekade terakhir. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat, menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri sawit, sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penggunaan bibit unggul dan praktik budidaya yang lebih baik.

Selain peremajaan, BPDP juga menjalankan program Sarana dan Prasarana Perkebunan yang mulai berjalan pada tahun 2021. Program ini bertujuan mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha pekebun melalui pembangunan jalan kebun, bantuan alat pascapanen, unit pengolahan hasil, hingga dukungan verifikasi ISPO. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau 12.848 pekebun di berbagai wilayah sentra sawit nasional. Kehadiran program sarpras membantu memperkuat rantai pasok perkebunan rakyat agar lebih modern, efisien, dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik.

## 4.2 A Decade of BPDP

Over the past decade, BPDP has implemented a wide range of strategic programs aimed at strengthening the sustainability of Indonesia's plantation sector, particularly the palm oil industry. Funding sourced from export levies and investment returns has not only been utilized to maintain the stability of the palm oil industry, but has also been directed toward improving smallholders welfare, strengthening national energy security, developing human capital, and encouraging innovation and downstream industrial development within Indonesia's plantation sector.

Through the Plantation Replanting Program, BPDP has focused on improving the productivity of aging, unproductive, and low-quality smallholder plantations. From 2016 to 2025, the program reached 182,218 smallholders covering a total area of 408,146 hectares across 21 provinces, with Aceh recorded as the largest recipient province during the period. The program represents a strategic government initiative to enhance smallholder productivity, ensure the sustainability of raw material supply for the palm oil industry, and improve farmers income through the adoption of superior seedlings and better cultivation practices.

In addition to replanting initiatives, BPDP has also implemented the Plantation Facilities and Infrastructure Program, which was introduced in 2021 to support productivity improvement and operational efficiency among smallholders. The program includes the development of plantation access roads, post-harvest equipment assistance, processing units, and ISPO verification support. By 2025, the program had benefited 12,848 smallholders across major palm oil producing regions. The initiative has contributed to strengthening the plantation supply chain, enabling it to become more modern, efficient, and capable of producing higher-quality outputs.

Di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), BPDP menunjukkan komitmen besar dalam menyiapkan generasi muda perkebunan yang unggul dan kompetitif. Hingga tahun 2025, BPDP telah memfasilitasi 13.265 penerima beasiswa dan 29.173 peserta pelatihan. Program ini mencakup pemberian beasiswa pendidikan tinggi, pelatihan teknis budidaya, manajerial, kewirausahaan, hingga penyuluhan kepada pekebun dan masyarakat perkebunan. Investasi pada SDM menjadi salah satu fondasi penting agar sektor perkebunan Indonesia mampu bertransformasi menuju industri yang lebih modern, adaptif terhadap teknologi, dan berkelanjutan.

Dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, BPDP berperan sebagai fasilitator inovasi sawit nasional. Sejak 2015 hingga 2025, BPDP telah mendukung 409 kontrak penelitian dengan melibatkan 1.495 peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Dukungan tersebut menghasilkan 58 paten terdaftar, 305 publikasi ilmiah, serta 23 hasil riset yang berhasil memasuki tahap komersialisasi. Fokus riset diarahkan pada pengembangan pangan, bioenergi, biomaterial, kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi sawit. Melalui program ini, BPDP berupaya memastikan bahwa hasil riset sawit Indonesia tidak berhenti di laboratorium, tetapi mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung hilirisasi industri perkebunan nasional.

Salah satu program terbesar BPDP adalah Pemenuhan Kebutuhan Biodiesel (BBN) yang menjadi tulang punggung implementasi energi baru terbarukan berbasis sawit di Indonesia. Sejak implementasi B15 hingga B40, BPDP berperan penting dalam menjaga keberlangsungan program biodiesel nasional melalui penyaluran insentif pembiayaan biodiesel. Volume penyaluran biodiesel meningkat signifikan dari 0,46 juta KL pada tahun 2015 menjadi 14,9 juta KL pada tahun 2025. Program ini memberikan manfaat strategis berupa pengurangan impor solar, peningkatan konsumsi sawit domestik, stabilisasi harga TBS petani, serta kontribusi terhadap penurunan emisi karbon nasional.

In the area of Human Resource Development, BPDP has demonstrated a strong commitment to preparing a highly competitive and capable future generation for the plantation sector. As of 2025, BPDP had facilitated 13,265 scholarship recipients and 29,173 training participants. The programs encompass higher education scholarships, technical cultivation training, managerial and entrepreneurship development, as well as extension and outreach activities for farmers and plantation communities. Investment in human capital remains a critical foundation for transforming Indonesia's plantation industry into a more modern, technology-driven, and sustainable sector.

Within Research and Development, BPDP has played a significant role as a facilitator of national palm oil innovation. Between 2015 and 2025, BPDP supported 409 research contracts involving 1,495 researchers from universities and research institutions across Indonesia. These initiatives resulted in 58 registered patents, 305 scientific publications, and 23 research outputs entering commercialization stages. Research activities focused on food, bioenergy, biomaterials, health, environmental sustainability, and socio-economic aspects of palm oil. Through this initiative, BPDP seeks to ensure that research outcomes generate tangible economic value and contribute to the downstream development of Indonesia's plantation industry.

One of BPDP's largest strategic initiatives is the Biodiesel Funding Program, which serves as a key pillar in the implementation of Indonesia's palm oil-based renewable energy policy. Since the introduction of the B15 mandate through to B40 implementation, BPDP has played a vital role in sustaining the national biodiesel program through financing support mechanisms. Biodiesel distribution volumes increased significantly from 0.46 million kiloliters in 2015 to 14.9 million kiloliters in 2025. The program has delivered strategic benefits, including reducing diesel imports, increasing domestic palm oil absorption, stabilizing Fresh Fruit Bunch (FFB) prices for farmers, and contributing to national carbon emission reduction efforts.

BPDP juga aktif menjalankan program Promosi dan Kemitraan Perkebunan sebagai upaya memperluas pasar dan memperkuat citra positif produk perkebunan Indonesia. Hingga tahun 2025, jumlah kegiatan promosi terus meningkat dan mencapai 269 kegiatan pada tahun 2024. Program ini meliputi promosi produk turunan sawit, dukungan UMKM perkebunan, pameran, seminar, workshop, hingga kampanye positif sawit Indonesia di dalam dan luar negeri. Upaya ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan global terkait isu keberlanjutan sawit sekaligus membuka peluang pasar baru bagi produk perkebunan nasional.

Memasuki tahun 2025–2026, BPDP juga mulai memperluas mandatnya melalui pengembangan program untuk komoditas kelapa dan kakao. Berbagai workshop penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi, pembangunan sistem digital, hingga koordinasi pengembangan program kakao rakyat telah mulai dilakukan di berbagai daerah. Langkah ini menunjukkan transformasi BPDP menjadi lembaga pengelola dana perkebunan yang tidak hanya fokus pada sawit, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas strategis perkebunan lainnya.

Dengan perjalanan satu dekade tersebut, BPDP telah berkembang menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendukung keberlanjutan perkebunan Indonesia. Melalui pengelolaan dana yang semakin kuat, program yang semakin luas, serta tata kelola yang semakin modern dan adaptif, BPDP diharapkan terus menjadi motor penggerak pembangunan perkebunan nasional yang produktif, inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

BPDP has also actively carried out the Plantation Promotion and Partnership Program as part of efforts to expand market access and strengthen the positive image of Indonesian plantation products. By 2025, promotional activities had continued to increase, reaching 269 activities in 2024. These initiatives include the promotion of palm-based downstream products, support for plantation-based MSMEs, exhibitions, seminars, workshops, and positive campaigns for Indonesian palm oil in both domestic and international markets. The program plays an important role in addressing global sustainability challenges while simultaneously creating new market opportunities for Indonesian plantation products.

Entering the 2025–2026 period, BPDP also began expanding its mandate to include the development of coconut and cocoa commodities. Various activities such as institutional strengthening workshops, regulatory development, digital system enhancement, and coordination for smallholder cocoa development programs have been initiated across multiple regions. This expansion reflects BPDPs transformation into a plantation fund management institution that not only focuses on palm oil, but also supports the development of other strategic plantation commodities.

Throughout its decade-long journey, BPDP has evolved into a strategic government instrument in supporting the sustainability of Indonesias plantation sector. Through stronger fund management, broader program implementation, and increasingly adaptive and modern governance, BPDP is expected to continue serving as a key driver of a productive, inclusive, sustainable, and globally competitive plantation industry that delivers tangible benefits to the Indonesian people.

### 4.3 Kinerja Program Tahun 2025 A. Kinerja Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana melalui pungutan ekspor merupakan salah satu sumber pendanaan utama BPDP dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis perkebunan yang berkelanjutan. Dana yang dihimpun tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan perkebunan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan kerja sama, hingga pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit.



Pada tahun 2025, realisasi penerimaan pungutan ekspor mencapai Rp31,51 triliun, melampaui target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp27,96 triliun. Dengan capaian tersebut, persentase penghimpunan dana mencapai 112,69%, mencerminkan kinerja penghimpunan dana yang optimal dan berada di atas target yang telah ditetapkan.

Peningkatan realisasi penerimaan tersebut didukung oleh meningkatnya volume ekspor produk sawit dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan masih kuatnya permintaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Selain itu, berbagai langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan BPDP turut memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penghimpunan dana.

Di sisi lain, BPDP juga terus melakukan berbagai upaya hukum terkait perkara pungutan ekspor dan berhasil memperoleh banyak putusan yang mendukung posisi BPDP. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan mekanisme penghimpunan dana untuk mendukung program-program strategis sektor perkebunan.

### 4.3 Program Performance in 2025 A. Fund Collection Performance

The collection of export levies remains one of BPDPs primary funding sources in supporting the implementation of sustainable plantation development programs. The funds collected are utilized to support various strategic initiatives, including human resource development, research and development, smallholder plantation replanting, plantation facilities and infrastructure, promotion and partnerships, as well as the development of palm oil-based biofuels.

In 2025, the realization of export levy revenues reached Rp31.51 trillion, exceeding the Business Plan and Budget (RBA) target of Rp27.96 trillion. As a result, the fund collection achievement reached 112.69%, reflecting strong and optimal collection performance above the established target.

The increase in revenue realization was supported by higher export volumes of palm oil products compared to the previous year, in line with continued strong global demand for Indonesian palm oil products. In addition, various governance improvement measures implemented by BPDP also contributed positively to the effectiveness of fund collection activities.

BPDP continued to simplify and streamline the Export Duty (BK) and Export Levy (PE) tariff policies in order to improve service certainty, administrative efficiency, and ease of compliance for business actors. These efforts were accompanied by strengthening the collection system and accelerating the digitalization of service processes to ensure that export levy implementation becomes more transparent, accountable, and efficient.

Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BPDP berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penghimpunan dana yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dukungan optimal bagi pengembangan sektor perkebunan nasional.

At the same time, BPDP also continued to undertake various legal efforts related to export levy disputes and successfully secured numerous rulings that supported BPDPs position. These achievements became an important element in strengthening legal certainty while maintaining the sustainability of the fund collection mechanism to support strategic plantation sector programs. Through these continuous improvement efforts, BPDP remains committed to strengthening an adaptive, accountable, and sustainable fund collection governance system, thereby ensuring optimal support for the development of Indonesias plantation sector.



## B. Kinerja Pengembangan Dana

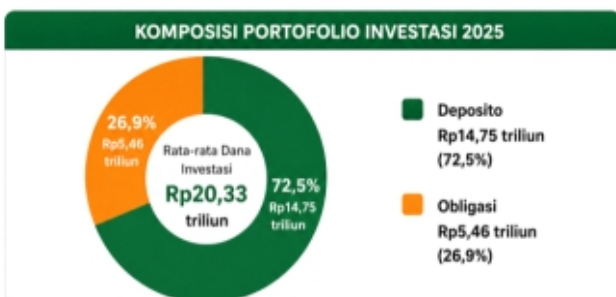
Pengelolaan dana dan kas merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pendanaan program-program BPDP. Melalui strategi investasi yang terukur, prudent, dan adaptif terhadap dinamika pasar, BPDP berupaya mengoptimalkan imbal hasil dana kelolaan dengan tetap memperhatikan aspek likuiditas, keamanan investasi, serta keberlanjutan pembiayaan berbagai program strategis perkebunan.

Pada tahun 2025, kinerja pengelolaan dana dan kas BPDP menunjukkan hasil yang positif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Realisasi annualized weighted average return on investment (RoI) untuk investasi jangka pendek tercatat sebesar 7,43%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata BI Rate sebesar 5,27%. Sementara itu, investasi jangka panjang mencatat RoI sebesar 7,32%, melampaui rata-rata yield Surat Utang Negara (SUN) benchmark tenor 5 tahun sebesar 6,17%.

## B. Fund Investment Performance

Fund and cash management remains one of the key foundations in ensuring the sustainability of BPDPs program financing. Through measured, prudent, and adaptive investment strategies, BPDP seeks to optimize returns on managed funds while maintaining liquidity, investment security, and the long-term sustainability of financing for its strategic plantation programs.

In 2025, BPDPs fund and cash management performance delivered positive results and exceeded the established targets. The realized annualized weighted average return on investment (RoI) for short-term investments reached 7.43%, higher than the average BI Rate of 5.27%. Meanwhile, long-term investments recorded an RoI of 7.32%, exceeding the average yield of the 5-year Government Bond (SUN) benchmark, which stood at 6.17%.



Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas hingga 31 Desember 2025 mencapai 125,89% dari target 100%, dengan nilai kinerja sebesar 120%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan dan penempatan dana BPDP yang mampu menghasilkan imbal hasil kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan global maupun domestik.

Selama tahun 2025, rata-rata dana investasi BPDP tercatat sebesar Rp20,33 triliun, yang terdiri atas penempatan deposito sebesar Rp14,75 triliun dan investasi obligasi sebesar Rp5,46 triliun. Dari portofolio investasi tersebut, BPDP membukukan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp1,51 triliun yang berasal dari bunga deposito, kupon obligasi, serta capital gain obligasi.

Kinerja positif tersebut didukung oleh pemantauan kondisi pasar keuangan secara berkala dan komprehensif, termasuk monitoring arah kebijakan suku bunga global dan domestik, pergerakan harga Surat Utang Negara (SUN), serta perkembangan yield to maturity melalui berbagai sumber data dan informasi pasar keuangan seperti Bloomberg.

Melalui pengelolaan dana yang berbasis prinsip kehati-hatian, analisis pasar yang adaptif, dan tata kelola yang akuntabel, BPDP terus memperkuat perannya sebagai lembaga pengelola dana yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada keberlanjutan. Optimalisasi pengelolaan dana tersebut diharapkan dapat terus mendukung kesinambungan pembiayaan program-program strategis BPDP dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Overall, the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for the Rate of Return on Fund and Cash Management as of 31 December 2025 reached 125.89% against the target of 100%, with a performance score of 120%. This achievement reflects the effectiveness of BPDPs fund placement and investment management strategies in generating competitive returns amid global and domestic financial market dynamics.

Throughout 2025, BPDPs average investment fund portfolio amounted to Rp20.33 trillion, consisting of Rp14.75 trillion in time deposits and Rp5.46 trillion in bond investments. From this investment portfolio, BPDP recorded fund management income totaling Rp1.51 trillion, primarily derived from deposit interest, bond coupons, and bond capital gains.

These positive results were supported by continuous and comprehensive monitoring of financial market conditions, including monitoring global and domestic interest rate policies, Government Bond (SUN) price movements, and yield to maturity developments through various financial market information sources, including Bloomberg.

Through prudent fund management practices, adaptive market analysis, and accountable governance, BPDP continues to strengthen its role as a professional, reliable, and sustainability-oriented fund management institution. The optimization of fund management is expected to continuously support the sustainability of financing for BPDPs strategic programs in advancing a more competitive and sustainable national plantation sector.

### C. Kinerja Pengembangan SDM Perkebunan

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor perkebunan nasional. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, BPDP terus mendorong peningkatan kapasitas generasi muda, pekebun, petugas pendamping, kelompok tani, koperasi, serta pelaku usaha perkebunan lainnya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri yang semakin dinamis dan berorientasi pada keberlanjutan.

### C. Plantation Human Resources Development Performance

Human resource development remains one of the key foundations in strengthening the competitiveness and sustainability of Indonesia's plantation sector. Through various education and training programs, BPDP continues to enhance the capacity of young generations, smallholders, field facilitators, farmer groups, cooperatives, and other plantation stakeholders so they can adapt to the evolving needs of an increasingly dynamic and sustainability-oriented industry.



Sepanjang tahun 2025, program Pengembangan SDM Perkebunan mencatatkan kinerja yang sangat positif. Dari target sebanyak 11.000 peserta, realisasi program berhasil mencapai 19.932 peserta atau sebesar 181,34% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut terdiri atas 9.146 peserta program pendidikan dan 10.786 peserta program pelatihan.

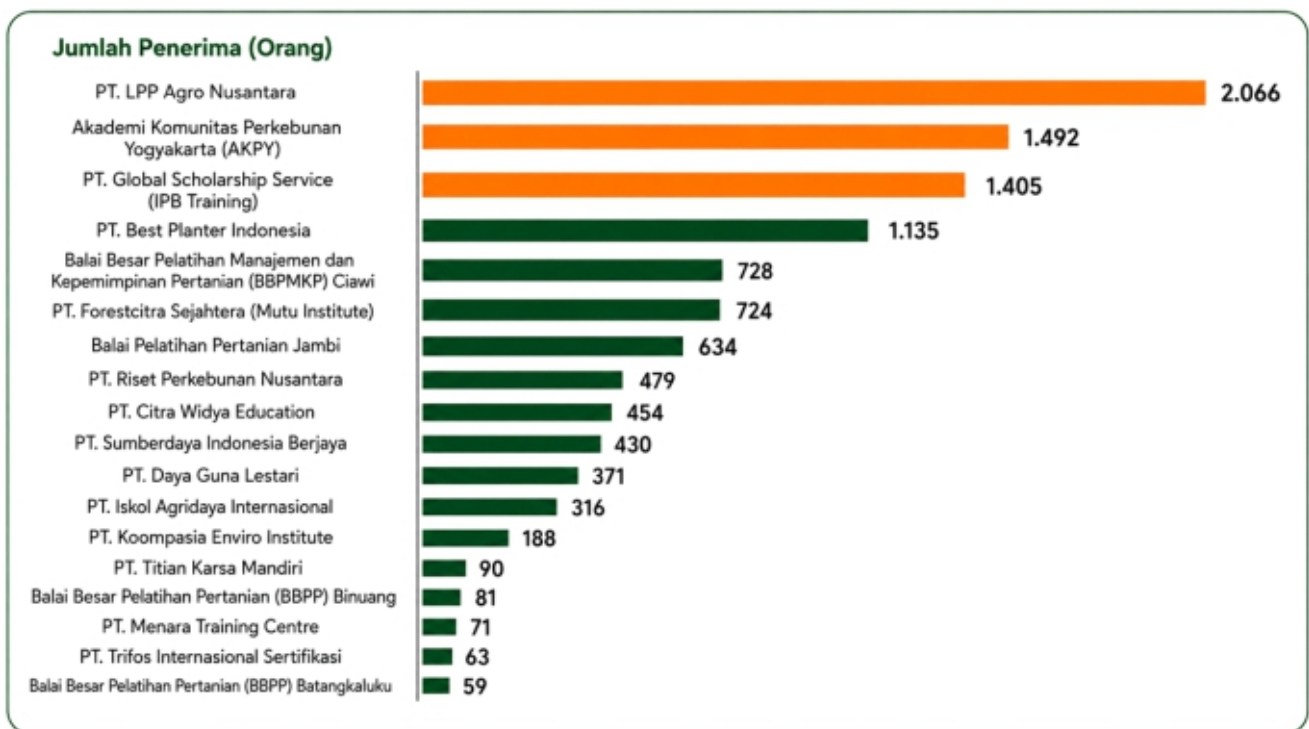
Throughout 2025, the Plantation Human Resource Development program recorded very positive performance. From the target of 11,000 participants, the program successfully reached 19,932 participants, equivalent to 181.34% of the established target. This achievement consisted of 9,146 participants in education programs and 10,786 participants in training programs.

No.	Lembaga Pendidikan	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Yang dikelola 2025
1	Poltek LPP Yogyakarta	D2	-	30	30	30	30	88
		D3	50	120	120	120	90	356
		D4	75	30	120	210	180	683
2	Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY)	D1	250	310	440	570	490	1.041
		D2	-	-	-	-	60	59
3	Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE)	D1	-	-	-	-	-	-
		D3	90	90	180	240	210	713
		D4	30	30	90	90	120	354
4	Politeknik Kampar	D2	-	30	30	30	30	88
		D3	80	90	150	210	150	584
		D4	-	-	-	30	60	89
5	Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI)	D4	60	60	120	120	90	437
		S1	-	120	150	150	120	527
6	Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB)	D3	25	30	-	30	60	110
7	Institut Pertanian Stiper (INSTIPER)	S1	-	60	120	120	150	441
8	Univ Prima	S1	-	-	30	90	90	208
9	Sekolah Vokasi (SV) IPB	D4	-	-	60	-	-	59
10	Politeknik ATI Padang	D3	-	-	120	150	180	439
		D4	-	-	30	90	30	87
11	Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan	D3	-	-	90	90	150	315
12	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan	D4	-	-	60	60	30	136
13	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I)	S1	-	-	30	90	90	207

No.	Lembaga Pendidikan	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Yang dikelola 2025
14	Politeknik Aceh	D3	-	-	-	90	150	261
15	Politeknik Aceh Selatan	D3	-	-	-	30	30	90
16	Politeknik ATI Makassar	D3	-	-	-	30	30	85
17	Politeknik Jambi	D3	-	-	-	60	60	177
18	Univ. Islam Sumut	S1	-	-	-	60	60	118
19	Universitas Koperasi Indonesia (KOPIN)	S1	-	-	-	60	60	117
20	Politeknik Caltex Riau (PCR)	D4	-	-	-	60	60	179
21	Polban Manokwari	D4	-	-	-	30	30	59
22	Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven)	D3	-	-	-	30	30	114
23	Univ. Pasir Pengaraian	S1	-	-	-	30	30	89
24	Sekolah Vokasi (SV) UNDIP	D4	-	-	-	60	60	119
25	Politeknik Bombana	S1	-	-	-	-	30	29
26	Politeknik Kutarejo	D4	-	-	-	-	30	30
27	Politeknik Negeri Lhokseumawe	D3	-	-	-	-	30	30
28	Politan Negeri Samarinda	D3	-	-	-	-	30	59
		D4	-	-	-	-	30	30
29	Politeknik YKPN	D3	-	-	-	-	30	30
30	Univ. Borobudur	S1	-	-	-	-	60	60
31	Univ. Hasanuddin	S1	-	-	-	-	60	60
32	Univ. Jambi	D3	-	-	-	-	30	30
33	Univ. Lam. Mangkurat	S1	-	-	-	-	30	29
34	Univ. Lancang Kuning	S1	-	-	-	-	60	60
35	Univ. Muh. Sumbar	S1	-	-	-	-	30	30
36	Univ. Nadhatul Ulama	S1	-	-	-	-	30	30
37	Univ. Sattra	S1	-	-	-	-	30	30
38	Univ. Taman Siswa Padang	S1	-	-	-	-	30	30
39	Univ. Teuku Umar	S1	-	-	-	-	30	30
40	Univ. Tjut Nyak Dhien	S1	-	-	-	-	30	30
41	Univ. Tunas Pembangunan	S1	-	-	-	-	30	30
42	Akademi Komunitas Industri Manufaktur (Akomi) Bantaeng	D2	-	-	-	-	30	30
<b>Jumlah</b>			<b>660</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.730</b>	<b>9.146</b>

Program pendidikan dilaksanakan melalui 41 lembaga penyelenggara pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sementara itu, program pelatihan menjangkau 40 kabupaten di 17 provinsi dengan melibatkan 18 lembaga penyelenggara pelatihan. Luasnya cakupan program ini mencerminkan komitmen BPDP untuk memperluas akses peningkatan kompetensi SDM perkebunan secara lebih inklusif dan merata di berbagai daerah.

The education programs were implemented through 41 educational institutions located across various regions in Indonesia, including Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. Meanwhile, the training programs reached 40 regencies across 17 provinces by involving 18 training institutions. The broad coverage of these programs reflects BPDPs strong commitment to expanding access to competency development opportunities for plantation human resources in a more inclusive and equitable manner.



Melalui penguatan kapasitas SDM, BPDP tidak hanya berupaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku perkebunan, tetapi juga mendorong lahirnya sumber daya manusia perkebunan yang produktif, adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan industri di masa depan. Dengan SDM yang semakin berkualitas, sektor perkebunan diharapkan mampu tumbuh lebih berdaya saing sekaligus mendukung pembangunan perkebunan nasional yang berkelanjutan.

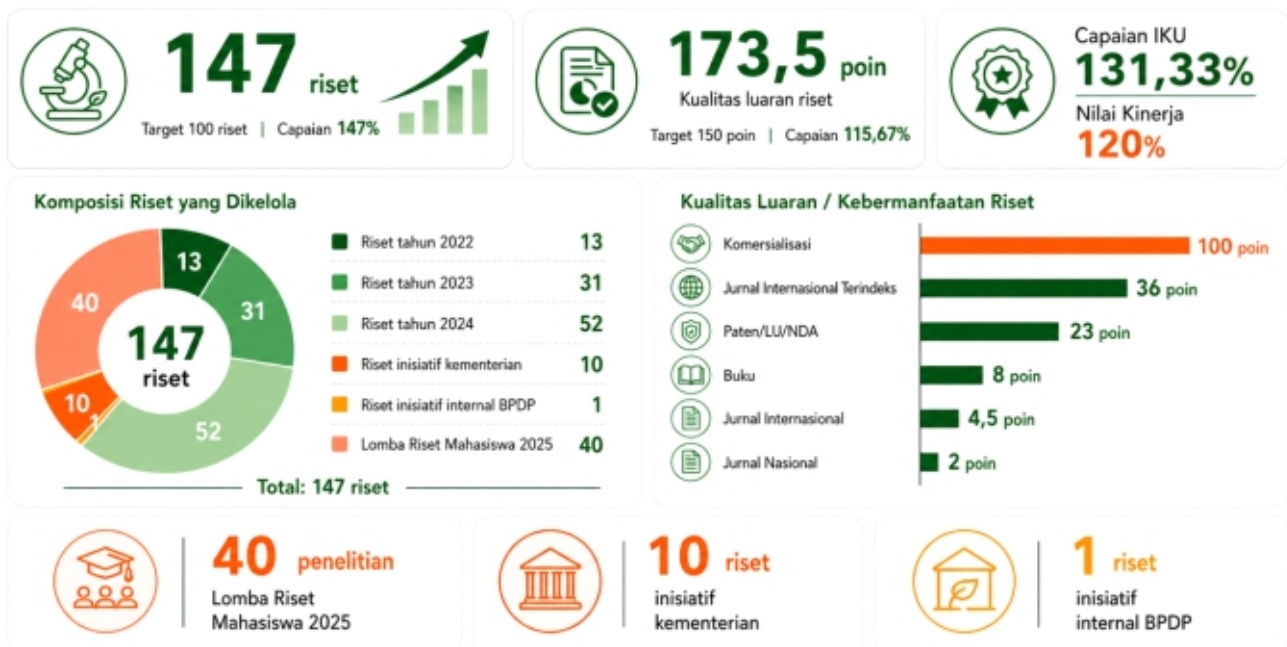
Through strengthening human capital, BPDP aims not only to improve the skills and knowledge of plantation stakeholders, but also to foster productive, adaptive, and innovative human resources that are well prepared to face future industry challenges. With increasingly qualified human resources, the plantation sector is expected to become more competitive while continuing to support sustainable national plantation development.

### D. Kinerja Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Penelitian dan pengembangan menjadi salah satu instrumen strategis BPDP dalam mendorong inovasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan keberlanjutan sektor perkebunan nasional. Melalui dukungan pendanaan riset, BPDP terus berupaya membangun ekosistem penelitian yang tidak hanya menghasilkan luaran akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi industri, pekebun, masyarakat, serta pengembangan kebijakan perkebunan nasional.

### D. Plantation Research and Development Performance

Research and development continued to serve as one of BPDPs strategic instruments in driving innovation, enhancing value creation, and strengthening the sustainability of Indonesias plantation sector. Through its research funding programs, BPDP remained committed to fostering a research ecosystem that delivers not only academic outputs, but also practical contributions to industry development, smallholders welfare, and national plantation policies.



Sepanjang tahun 2025, kinerja program riset perkebunan menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target pengelolaan sebanyak 100 riset, BPDP berhasil mengelola 147 riset atau mencapai 147% dari target yang ditetapkan. Riset tersebut mencakup berbagai skema, mulai dari riset lanjutan tahun 2022, 2023, dan 2024, riset inisiatif kementerian anggota Komite Pengarah, riset inisiatif internal BPDP, hingga 40 penelitian dalam Program Lomba Riset Mahasiswa Tahun 2025.

In 2025, the Plantation Research and Development Program recorded strong performance. Out of the target of 100 research projects, BPDP successfully managed 147 research projects, representing an achievement of 147% of the annual target. The managed research portfolio consisted of continuing research projects from 2022, 2023, and 2024, research initiatives proposed by ministries represented in the Steering Committee, internally initiated BPDP research projects, as well as 40 research projects under the 2025 Student Research Competition Program.

Program Lomba Riset Mahasiswa terus menjadi salah satu bentuk komitmen BPDP dalam mendorong keterlibatan generasi muda dan kalangan akademisi dalam pengembangan sektor perkebunan. Melalui kompetisi ini, BPDP membuka ruang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menghadirkan ide, inovasi, dan solusi berbasis riset yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan industri perkebunan saat ini maupun di masa depan. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memperkuat budaya riset sekaligus menciptakan regenerasi peneliti dan inovator di sektor perkebunan nasional.

Selain itu, BPDP juga terus melanjutkan pengembangan bensin sawit bekerja sama dengan Institut Teknologi (IT) sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian energi nasional. Pengembangan bahan bakar berbasis sawit ini menjadi langkah strategis dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Dari sisi kualitas dan kebermanfaatan luaran riset, capaian yang dihasilkan juga menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2025, riset yang dikelola BPDP menghasilkan nilai 173,5 poin dari target 150 poin atau mencapai 115,67%. Luaran tersebut berasal dari berbagai indikator, antara lain komersialisasi hasil riset, paten, Letter of Intent (LoI), Non-Disclosure Agreement (NDA), publikasi jurnal internasional terindeks, buku, jurnal internasional, hingga jurnal nasional.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Riset Perkebunan yang Dikelola mencapai 131,33% dengan nilai kinerja sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan BPDP terhadap riset perkebunan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penelitian, tetapi juga pada kualitas, pemanfaatan, serta kontribusi nyata hasil riset dalam mendukung penguatan industri perkebunan yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

The Student Research Competition Program continued to reflect BPDPs commitment to encouraging greater participation from students and academic institutions in the development of the plantation sector. Through this program, BPDP provided opportunities for university students across Indonesia to develop innovative and research-based solutions relevant to the challenges and future needs of the plantation industry. The program is expected to further strengthen the national research culture while supporting the regeneration of researchers and innovators within the plantation sector.

In parallel, BPDP continued the development of palm-based gasoline in collaboration with the Institute of Technology (IT) as part of its support for national energy independence initiatives. The development of palm-based fuel represents a strategic effort to expand renewable energy utilization, increase the added value of palm commodities, and reinforce Indonesias long-term energy resilience.

From the perspective of research quality and utilization, the program also delivered positive outcomes. In 2025, research outputs generated 173.5 points against a target of 150 points, equivalent to 115.67% achievement. These outputs included research commercialization, patents, Letters of Intent (LoI), Non-Disclosure Agreements (NDA), indexed international journal publications, books, as well as international and national scientific journals.

Overall, the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for the Quality of Managed Plantation Research reached 131.33%, with a performance score of 120%. These achievements demonstrate that BPDPs support for plantation research is not solely focused on increasing the number of research projects, but also on ensuring the quality, applicability, and strategic contribution of research outcomes toward strengthening a more innovative, competitive, and sustainable plantation industry.

### E. Kinerja Promosi Perkebunan

Program Promosi dan Kerja Sama BPDP merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat citra positif komoditas perkebunan nasional. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan promosi yang terarah, pengelolaan informasi yang berkelanjutan, publikasi di berbagai kanal komunikasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan tersebut, BPDP berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran penting sektor perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

### E. Plantation Promotion Performance

The Promotion and Partnership Program implemented by BPDP forms an integral part of its strategic efforts to strengthen the positive image of Indonesia's plantation commodities. The program was carried out through targeted promotional activities, sustainable information management, publications across various communication channels, as well as collaborations with multiple stakeholders. Through these initiatives, BPDP seeks to enhance public understanding of the important role of the plantation sector in supporting economic growth, improving smallholders welfare, and advancing national sustainability.



Pada tahun 2025, efektivitas Program Promosi dan Kerja Sama menunjukkan capaian yang sangat baik. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai 131,33%, didukung oleh pelaksanaan 165 kegiatan promosi yang terdiri atas 111 kegiatan eksternal dan 54 kegiatan internal. Melalui berbagai kanal luring maupun daring, seluruh kegiatan tersebut berhasil menjangkau 32.485 peserta dan audiens.

In 2025, the effectiveness of the Promotion and Partnership Program recorded very strong performance. The Key Performance Indicator (KPI) achievement reached 131.33%, supported by the implementation of 165 promotional activities, consisting of 111 external activities and 54 internal activities. Through both offline and online channels, these activities successfully reached 32,485 participants and audiences.

Selain kegiatan promosi, BPDP juga terus memperkuat peran Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMK) dalam ekosistem perkebunan nasional. Melalui berbagai kegiatan promosi, pameran, business matching, dan pengembangan kemitraan, BPDP mendorong perluasan akses pasar serta peningkatan daya saing produk-produk UKMK berbasis komoditas perkebunan, khususnya produk hilir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

In addition to promotional activities, BPDP also continued to strengthen the role of micro, small, and medium enterprises and cooperatives (MSMEs and Cooperatives/UKMK) within the plantation sector ecosystem. Through various promotional platforms, exhibitions, partnerships, and business matching initiatives, BPDP encouraged the expansion of market access and increased competitiveness for plantation-based MSME products, particularly downstream products with higher added value.

Dari aspek pengelolaan informasi, BPDP mencatat persepsi positif media sebesar 77,16% dan engagement rate sebesar 226,68%. Selain itu, rata-rata tingkat pemahaman peserta terhadap kegiatan promosi mencapai 92,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program promosi dan kerja sama BPDP tidak hanya berhasil memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat keterlibatan publik, serta membangun persepsi positif terhadap sektor perkebunan nasional.

BPDP juga terus berperan aktif dalam mendukung upaya mempertahankan sekaligus memperluas pasar produk sawit Indonesia di tingkat global. Melalui berbagai kegiatan promosi, komunikasi strategis, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri, BPDP turut mendukung penguatan daya saing serta penerimaan produk sawit Indonesia yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar internasional.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan komitmen BPDP dalam menghadirkan komunikasi publik yang adaptif, informatif, dan berdampak. Melalui program promosi dan kerja sama yang berkelanjutan, BPDP terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan komoditas perkebunan yang berdaya saing, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

From the information management perspective, BPDP recorded positive media sentiment of 77.16% and an engagement rate of 226.68%. Furthermore, the average level of participant understanding in promotional activities reached 92.33%. These results demonstrate that BDPs promotion and partnership programs were not only successful in expanding communication outreach, but also in improving the quality of engagement, strengthening public participation, and building positive perceptions toward Indonesias plantation sector.

BPDP also remained actively engaged in supporting efforts to maintain and expand international market access for Indonesian palm oil products. Through collaborative promotion initiatives, strategic communication, and stakeholder engagement at both domestic and international levels, BPDP contributed to strengthening the global competitiveness and acceptance of sustainable Indonesian palm oil products amid evolving global market dynamics.

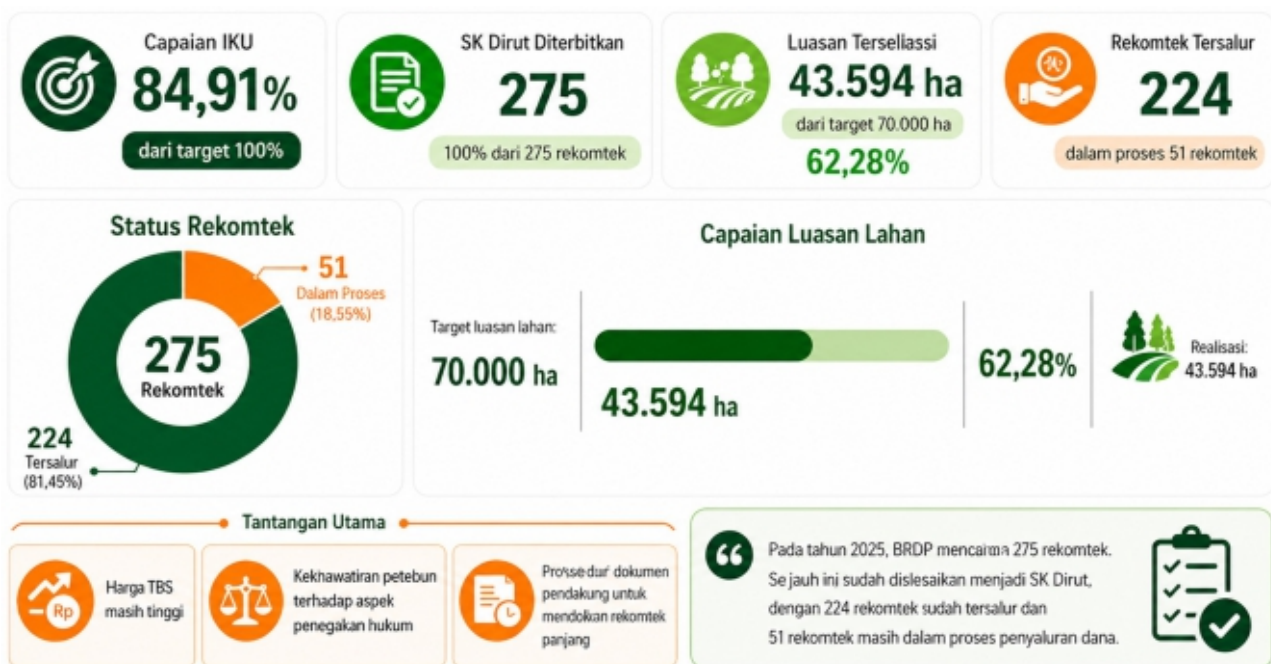
Overall, the 2025 achievements reflect BDPs commitment to delivering adaptive, informative, and impactful public communication. Through sustainable promotion and partnership initiatives, BPDP continues to strengthen support for the development of plantation commodities that are competitive, value-added, and sustainable.

## F. Kinerja Peremajaan Perkebunan

Program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PPR) merupakan salah satu program strategis BPDP dalam mendukung keberlanjutan sektor perkebunan nasional, khususnya industri kelapa sawit rakyat. Program ini dirancang untuk membantu pekebun melakukan peremajaan tanaman sawit yang sudah tua, tidak produktif, atau mengalami penurunan hasil, sehingga produktivitas kebun dapat kembali meningkat dan keberlangsungan usaha perkebunan rakyat tetap terjaga dalam jangka panjang. Melalui program ini, BPDP tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas, tetapi juga mendorong penguatan tata kelola perkebunan rakyat, peningkatan kesejahteraan pekebun, serta keberlanjutan industri sawit nasional secara keseluruhan.

## F. Plantation Replanting Performance

The Smallholder Plantation Replanting Program (PPR) represents one of BPDPs strategic initiatives in supporting the sustainability of Indonesias plantation sector, particularly the smallholder palm oil industry. The program is designed to assist smallholders in replanting aging, unproductive, or declining oil palm trees in order to improve plantation productivity and maintain the long-term sustainability of smallholder plantation businesses. Through this program, BPDP not only supports productivity improvement, but also encourages better plantation governance, enhanced smallholder welfare, and the long-term sustainability of Indonesias palm oil industry as a whole.



Pada tahun 2025, BPDP menerima 275 rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 rekomtek telah tersalurkan dengan cakupan luasan mencapai 36.169 hektare, sementara 51 rekomtek dengan luasan 7.421 hektare masih berada dalam proses penyaluran dana.

In 2025, BPDP received 275 technical recommendations from the Directorate General of Plantations under the Ministry of Agriculture. Of this total, 224 recommendations had been disbursed, covering an area of 36,169 hectares, while 51 recommendations covering 7,421 hectares were still in the process of fund disbursement.

Dari sisi administrasi program, BPDP berhasil menerbitkan seluruh 275 Surat Keputusan Direktur Utama atau mencapai 100% dari total rekomtek yang diterima. Sementara itu, realisasi luasan lahan program peremajaan mencapai 43.594 hektare dari target 70.000 hektare, atau 62,28%. Dengan mempertimbangkan capaian pada aspek penerbitan SK maupun realisasi penyaluran dana, capaian akhir kinerja penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Rakyat tahun 2025 tercatat sebesar 84,91%.

Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Tingginya harga tandan buah segar (TBS) pada tahun 2025 menyebabkan sebagian pekebun memilih menunda peremajaan karena kebun yang ada masih dianggap memberikan keuntungan ekonomi yang baik. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran dari kelembagaan pekebun terkait aspek penegakan hukum, serta proses pemenuhan dokumen persyaratan yang membutuhkan waktu relatif panjang.

Untuk mempercepat implementasi program, BPDP terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta bank mitra penyalur. Berbagai langkah percepatan dilakukan, antara lain melalui penerapan sistem host-to-host, penguatan integrasi layanan berbasis open API, penandatanganan perjanjian kerja sama tiga pihak secara berkala, serta percepatan jalur kemitraan.

Selain program peremajaan sawit rakyat, BPDP bersama instansi terkait juga tengah menyusun payung hukum serta petunjuk teknis pelaksanaan program peremajaan untuk komoditas kakao dan kelapa. Penyusunan regulasi dan mekanisme pelaksanaan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan program dapat berjalan secara tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pekebun di lapangan.

From the administrative perspective, BPDP successfully issued all 275 Board of Directors Decrees, representing 100% of the technical recommendations received. Meanwhile, the realized replanting area reached 43.594 hectares out of the targeted 70,000 hectares, equivalent to 62,28% achievement. By taking into account both the issuance of decrees and the realization of fund disbursement, the overall performance achievement of the 2025 Smallholder Plantation Replanting Program reached 84.91%.

In its implementation, the program continued to face several challenges in the field. The relatively high price of fresh fruit bunches (FFB) throughout 2025 encouraged some smallholders to postpone replanting activities, as existing plantations were still considered economically profitable. In addition, concerns among smallholder institutions regarding legal enforcement aspects, as well as the lengthy process of fulfilling supporting documentation requirements, also contributed to implementation challenges.

To accelerate program implementation, BPDP continued to strengthen coordination and synergy with the Directorate General of Plantations and partner banks. Various acceleration measures were implemented, including the adoption of host-to-host systems, strengthening service integration through open APIs, periodic signing of tripartite cooperation agreements, and the acceleration of partnership schemes.

In addition to the smallholder palm oil replanting program, BPDP, together with relevant government institutions, is currently preparing the legal framework and technical implementation guidelines for replanting programs covering cocoa and coconut commodities. The preparation of these regulations and implementation mechanisms is being carried out through intensive coordination with related ministries and institutions to ensure that the programs can be implemented effectively, accountably, and in accordance with the needs of smallholders in the field.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, program peremajaan kakao dan kelapa diharapkan dapat segera diimplementasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, dan keberlanjutan komoditas perkebunan nasional.

Melalui berbagai upaya tersebut, BPDP berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan kualitas penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat agar manfaat program dapat semakin luas dirasakan oleh para pekebun. Ke depan, Program Peremajaan Perkebunan Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan produktivitas, kesejahteraan pekebun, dan keberlanjutan industri perkebunan Indonesia.

With a stronger regulatory foundation, the cocoa and coconut replanting programs are expected to be implemented in the near future as part of broader efforts to improve productivity, product quality, and the sustainability of Indonesia's plantation commodities.

Through these various initiatives, BPDP remains committed to improving the effectiveness and quality of replanting fund disbursement so that the benefits of the program can be more widely felt by smallholders. Going forward, the Smallholder Plantation Replanting Program is expected to become one of the key drivers in enhancing productivity, improving smallholder welfare, and strengthening the sustainability of Indonesia's plantation sector.



### G. Kinerja Sarana dan Prasarana Perkebunan

Program Sarana dan Prasarana Perkebunan merupakan salah satu bentuk dukungan strategis BPDP dalam memperkuat produktivitas, meningkatkan mutu hasil, serta mendukung keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Melalui program ini, BPDP membantu pekebun memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki tata kelola perkebunan, serta mendorong penerapan praktik perkebunan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Dukungan yang diberikan melalui program ini diharapkan dapat membantu pekebun meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat kualitas produksi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan nasional di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

### G. Plantation Facilities and Infrastructure Performance

The Plantation Facilities and Infrastructure Program represents one of BPDPs strategic initiatives to strengthen productivity, improve product quality, and support the sustainability of smallholder plantation businesses. Through this program, BPDP provides support for facilities and infrastructure needed by smallholders to enhance business capacity, improve plantation governance, and encourage the adoption of more modern and sustainable plantation practices.

The support provided through this program is expected to help smallholders improve operational efficiency, strengthen production quality, and enhance the competitiveness of Indonesias plantation commodities amid the continuously evolving industry landscape.



Pada tahun 2025, BPDP menerima 78 rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 rekomtek telah diterbitkan persetujuan pembiayaannya melalui Surat Keputusan Direktur Utama. Sementara itu, 4 rekomtek dikembalikan untuk perbaikan, dan 1 dokumen perbaikan rekomtek yang diterima pada akhir tahun akan diperhitungkan dalam proses tahun berikutnya.

In 2025, BPDP received 78 technical recommendations from the Directorate General of Plantations under the Ministry of Agriculture. Of this total, 73 recommendations were approved for financing through Board of Directors Decrees. Meanwhile, 4 recommendations were returned for revision, and 1 revised recommendation document received at the end of the year will be processed in the following year.

Dari aspek percepatan pelaksanaan program, BPDP berhasil menerbitkan 30 dokumen kontrak pengadaan barang dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah terbitnya persetujuan pembiayaan, dari total 36 dokumen Surat Keputusan Direktur Utama dalam bentuk barang. Capaian tersebut menunjukkan komitmen BPDP dalam mempercepat proses penyaluran dukungan sarana dan prasarana agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh para pekebun di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan pada tahun 2025 mencapai 141,67% dari target 100%, dengan nilai kinerja sebesar 120%. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas BPDP dalam mengelola proses persetujuan pembiayaan, memperkuat koordinasi lintas unit, serta mendorong percepatan proses pengadaan barang guna mendukung kebutuhan pekebun secara lebih optimal.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, BPDP terus memperkuat koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Berbagai langkah percepatan dilakukan, antara lain melalui akselerasi penerbitan rekomendasi teknis, percepatan proses pengadaan barang, pembahasan penyempurnaan tata cara penyaluran dana, hingga dukungan terhadap percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun.

Melalui berbagai upaya tersebut, BPDP berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing perkebunan rakyat, sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di masa depan.

From the implementation acceleration perspective, BPDP successfully issued 30 procurement contract documents within less than three months after financing approvals were issued, out of a total of 36 Board of Directors Decrees related to goods procurement. This achievement reflects BDPs commitment to accelerating the distribution of facilities and infrastructure support so that the program benefits can be promptly realized by smallholders in the field.

Overall, the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for the disbursement of plantation facilities and infrastructure funds in 2025 reached 141.67% against the target of 100%, with a performance score of 120%. These results demonstrate BDPs effectiveness in managing financing approval processes, strengthening cross-unit coordination, and accelerating procurement processes to better support smallholders needs.

To sustain these achievements, BPDP continued to strengthen coordination with the Procurement Service Unit, the Directorate General of Plantations, and other relevant stakeholders. Various acceleration measures were undertaken, including accelerating the issuance of technical recommendations, expediting procurement processes, refining fund disbursement procedures, and supporting the acceleration of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification for smallholders.

Through these efforts, BPDP remains committed to strengthening its tangible contribution toward improving the productivity, quality, and competitiveness of smallholder plantations, while supporting the development of a more sustainable and competitive national plantation sector in the future.

## H. Kinerja Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan salah satu kontribusi strategis BPDP dalam mendukung ketahanan energi nasional, menjaga stabilitas industri sawit, serta mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sawit melalui pengembangan energi baru terbarukan berbasis domestik.

Pada tahun 2025, Pemerintah secara resmi menerapkan program mandatori Biodiesel B40, yaitu pencampuran 40% biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan 60% minyak solar. Program dimaksud merupakan bentuk pemanfaatan biodiesel sawit pada seluruh sektor usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi *Public Service Obligation (PSO)*, transportasi Non-PSO, pembangkit listrik, industri dan komersil.

Implementasi kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat serapan minyak sawit di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung target transisi energi nasional menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Atas program mandatori Biodiesel, Badan Pengelola Dana Perkebunan sesuai Perpres 132 tahun 2024 memiliki tugas dan fungsi untuk membiayai dana insentif Biodiesel. Pada 2025, pembiayaan insentif Biodiesel hanya dilakukan pada sektor *Public Service Obligation (PSO)*.

## H. Biofuel Development Performance

The Biofuel Development Program (BBN) represents one of BPDP’s strategic contributions to supporting national energy security, maintaining the stability of the palm oil industry, and promoting the utilization of environmentally sustainable energy sources. The program also plays a significant role in enhancing the value-added potential of palm oil commodities through the development of domestically sourced renewable energy.

In 2025, the Government officially implemented the B40 Biodiesel Mandate, requiring the blending of 40% palm oil-based Fatty Acid Methyl Ester (FAME) biodiesel with 60% diesel fuel. The program covers the utilization of palm-based biodiesel across various sectors, including micro-enterprises, fisheries, agriculture, Public Service Obligation (PSO) transportation, Non-PSO transportation, power generation, industrial activities, and commercial operations.

The implementation of this policy constitutes a strategic measure to strengthen domestic palm oil absorption, reduce dependence on fossil fuels, and support the national energy transition agenda toward a more sustainable energy future.

Pursuant to Presidential Regulation No. 132 of 2024, Indonesian Plantation Fund (IPF) is mandated to provide financing for biodiesel incentives under the Biodiesel Mandate Program. In 2025, biodiesel incentive financing was allocated towards Public Service Obligation (PSO) sector.



Sepanjang tahun 2025, realisasi volume penyaluran biodiesel mencapai 14.940.729 kiloliter, melampaui target kinerja sebesar 13,5 juta kiloliter. Dengan capaian tersebut, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) volume penyaluran biodiesel mencapai 134%, mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan efektif dan menunjukkan tingginya kebutuhan serta penyerapan biodiesel di pasar domestik.

Berdasarkan kategori penyalurannya, volume biodiesel terdiri atas 6.908.804 kiloliter untuk kategori Public Service Obligation (PSO) dan 8.031.926 kiloliter untuk kategori Non-PSO. Sementara itu, volume biodiesel yang telah dibayarkan sepanjang tahun 2025 mencapai 8.114.003 kiloliter.

Capaian tersebut mencerminkan peran penting BPDP dalam memastikan dukungan pendanaan program biodiesel dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui program ini, BPDP tidak hanya berkontribusi terhadap stabilisasi harga CPO dan keberlangsungan industri sawit nasional, tetapi juga mendukung pengurangan emisi, penguatan bauran energi nasional, serta peningkatan kemandirian energi Indonesia.

Selain mendukung implementasi biodiesel, BPDP juga terus mendorong pengembangan inovasi energi berbasis sawit lainnya, termasuk pengembangan bensin sawit sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi terbarukan domestik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BPDP dalam mendukung transformasi sektor perkebunan menuju industri yang lebih inovatif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati tahun 2025 menunjukkan bahwa program mandatori biodiesel tetap menjadi instrumen strategis dalam menciptakan manfaat ekonomi, energi, dan keberlanjutan bagi sektor perkebunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, industri, dan para pemangku kepentingan, program ini diharapkan terus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya domestik.

Throughout 2025, the realized biodiesel distribution volume reached 14,940,729 kiloliters, exceeding the performance target of 13.5 million kiloliters. As a result, the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for biodiesel distribution volume reached 134%, reflecting the effective implementation of the program and the strong domestic demand and absorption of biodiesel.

Based on the distribution categories, the biodiesel volume consisted of 6,908,804 kiloliters under the Public Service Obligation (PSO) category and 8,031,926 kiloliters under the Non-PSO category. Meanwhile, the biodiesel volume that had been financially settled throughout 2025 reached 8,114,003 kiloliters.

These achievements reflect BPDPs important role in ensuring the sustainability and consistency of funding support for the biodiesel program. Through this initiative, BPDP contributes not only to stabilizing CPO prices and supporting the sustainability of Indonesias palm oil industry, but also to reducing emissions, strengthening the national energy mix, and enhancing Indonesias energy independence.

In addition to supporting biodiesel implementation, BPDP also continued to encourage the development of other palm oil-based energy innovations, including the development of palm-based gasoline as part of efforts to expand the utilization of domestic renewable energy. This initiative reflects BPDPs commitment to supporting the transformation of the plantation sector into a more innovative, value-added, and sustainable industry.

Overall, the performance of the Biofuel Development Program in 2025 demonstrated that the biodiesel mandatory program remains a strategic instrument in generating economic, energy, and sustainability benefits for Indonesias plantation sector. Through synergy among the Government, industry players, and other stakeholders, the program is expected to continue making meaningful contributions to national energy security and the strengthening of Indonesias domestic resource-based economy.

## 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja

### A. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Kinerja BPDP tahun 2025 tertuang dalam Kontrak Kinerja Direktur Utama BPDP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS).

- Satu sasaran strategis pada perspektif Stakeholder
- Satu sasaran strategis pada perspektif Customer
- Empat sasaran strategis pada perspektif Internal Process
- Tiga sasaran strategis pada perspektif Learning and Growth

Nilai Kinerja Organisasi BPDP berdasarkan Capaian Sasaran Strategis:

SS1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan 112.55
SS2	Penyaluran dana perkebunan yang efektif 108.3
SS3	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif 113.33
SS4	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal 116.34
SS5	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif 120
SS6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel 110.4
SS7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif 104.88
SS8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel 120
SS9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern 120

Catatan Status NKO:

$100 \leq \text{NKO} \leq 120$  = memenuhi ekspektasi

$80 \leq \text{NKO} \leq 100$  = belum memenuhi ekspektasi

$\text{NKO} \leq 80$  = tidak memenuhi ekspektasi

## 4.4 Key Performance Indicators and Work Plan

### A. Key Performance Indicators

The 2025 Performance Agreement of BPDP was stipulated through the Performance Contract between the President Director of BPDP and the Director General of Treasury. The agreement was translated into 9 (nine) Strategic Objectives, consisting of:

- One Strategic Objective under the Stakeholder perspective
- One Strategic Objective under the Customer perspective
- Four Strategic Objectives under the Internal Process perspective
- Three Strategic Objectives under the Learning and Growth perspective

The Organizational Performance Score of BPDP based on the achievement of Strategic Objectives is as follows:

SS1	Sustainable plantation fund management: 112.55
SS2	Effective plantation fund distribution: 108.30
SS3	Effective achievement of special mission assignments: 113.33
SS4	Optimal collection and development of plantation funds: 116.34
SS5	Effective public communication and partnerships: 120.00
SS6	Transparent and accountable state financial accountability: 110.40
SS7	Adaptive organizational management: 104.88
Ss8	Accountable financial management: 120.00
SS9	Adaptive and modern facilities and ICT management: 120.00

Organizational Performance Score (NKO) Classification

- $100 \leq \text{NKO} \leq 120$ : Meets expectations
- $80 \leq \text{NKO} \leq 100$ : Below expectations
- $\text{NKO} \leq 80$ : Does not meet expectations

Nilai Kinerja Organisasi BPDP Tahun 2025 sebesar 112.92. Nilai ini meningkat 0.82 dari NKO Tahun 2024 sebesar 112.10. NKO BPDP lima tahun terakhir cukup dinamis, dengan tren peningkatan pada tiga tahun terakhir. NKO Tahun 2025 didapatkan dari hasil capaian 19 Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktur Utama BPDP.

Dari sembilan sasaran strategis organisasi, telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut:

The Organizational Performance Score (NKO) of BPDP in 2025 reached 112.92. This figure increased by 0.82 points compared to the 2024 NKO of 112.10. Over the past five years, the NKO performance trend has remained dynamic, with consistent improvement recorded over the last three years.

The 2025 NKO was derived from the achievement of 19 Key Performance Indicators (KPIs) as stipulated in the Performance Agreement of the President Director of BPDP. From the nine organizational strategic objectives, 19 Key Performance Indicators (KPIs) were established in 2025 with the following achievements:

Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	100%	101.03%	101.03%
1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	100%	128.57%	120%
1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%	181.34%	120%
1d-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	107.58%	107.58%
2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%	84.91%	84.91%
2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	141.67%	120%
2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	100%	131.33%	120%
3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3	3	100%
3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	125.65%	120%
3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3.5	4.95	120%

4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%	125.89%	120%
4b-N	Persentase Penghimpunan Dana	100%	112.69%	112.69%
5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%	143.08%	120%
5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%	221.67%	120%
6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%	118.75%	118.75%
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/ Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK	97%	98.99%	102.05%
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	89.15	104.88%
8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	120	120%
9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	124.55%	120%

SS / KPI Code	SS / KPI Code	SS / KPI Code	SS / KPI Code	SS / KPI Code
1a-CP	Percentage of foreign exchange savings from the biodiesel mandatory program	100%	101.03%	101.03%
1b-CP	Percentage of biodiesel distribution volume	100%	128.57%	120%
1c-CP	Percentage of participants in Plantation Human Resource Development programs	100%	181.34%	120%
1d-CP	Stakeholder and service user satisfaction level	100%	107.58%	107.58%
2a-N	Percentage of smallholder plantation replanting fund disbursement	100%	84.91%	84.91%
2b-N	Percentage of plantation facilities and infrastructure fund disbursement	100%	141.67%	120%
2c-N	Percentage of managed plantation research quality	100%	131.33%	120%
3a-CP	BLU maturity level	3	3	100%
3b-N	Percentage level of CPO prices	100%	125.65%	120%
3c-N	Accuracy index of BLU revenue projections	3.5	4.95	120%
4a-CP	Rate of return on fund and cash management	100%	125.89%	120%
4b-N	Percentage of fund collection	100%	112.69%	112.69%
5a-N	Percentage of effectiveness of promotion and partnership programs	100%	143.08%	120%
5b-N	Percentage of completed partnerships for plantation export market expansion	100%	221.67%	120%
6a-CP	Percentage of completion of recommendations for Risk Management Maturity Assessment	100%	118.75%	118.75%
6b-N	Percentage of completion of supervisory recommendations from Financial Supervisors/Technical Supervisors/Internal Audit Unit/Supervisory Board/APIP and/or BPK	97%	98.99%	102.05%
7a-N	Quality score of performance management based on Strategy Focused Organization	85	89.15	104.88%
8a-CP	Ministry of Finance budget performance index	100	120	120%
9a-N	Percentage of completion of BLU management modernization	100%	124.55%	120%



## B. Rencana Kerja

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor perkebunan nasional, BPDP ke depan akan terus melaksanakan berbagai program strategis yang dirancang secara terarah sesuai dengan fokus pengembangan, target capaian, serta prioritas penguatan komoditas perkebunan nasional.

### 1. Program Peremajaan Perkebunan

Program Peremajaan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing usaha perkebunan rakyat melalui percepatan peremajaan tanaman, khususnya pada komoditas Kelapa Sawit, Kakao, dan Kelapa.

Beberapa fokus pengembangan program meliputi:

- Target peremajaan Kelapa Sawit tahap I seluas 60.000 hektare dan tahap II seluas 50.000 hektare.
- Penyiapan regulasi dan mekanisme penyaluran dana peremajaan untuk komoditas Kakao dan Kelapa.
- Penguatan dan pengembangan sistem informasi peremajaan perkebunan Kelapa Sawit, Kakao, dan Kelapa.
- Optimalisasi pelaksanaan peremajaan Kelapa Sawit melalui skema kemitraan.

### 2. Program Sarana dan Prasarana

Program Sarana dan Prasarana difokuskan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan melalui penyediaan dukungan sarana produksi dan infrastruktur perkebunan, baik untuk kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan.

## B. Work Plan

In supporting the improvement of productivity, competitiveness, and sustainability of the national plantation sector, BPDP will continue implementing various strategic programs that are carefully designed in line with development priorities, targeted achievements, and the strengthening of Indonesia's key plantation commodities.

### 1. Plantation Replanting Program

The Plantation Replanting Program is aimed at improving productivity, sustainability, and competitiveness of smallholder plantation businesses through the acceleration of crop rejuvenation, particularly for Oil Palm, Cocoa, and Coconut commodities.

The key focus areas of the program include:

- Phase I Oil Palm replanting target covering 60,000 hectares and Phase II covering 50,000 hectares.
- Preparation of regulations and funding mechanisms for Cocoa and Coconut replanting programs.
- Strengthening and enhancing plantation replanting information systems for Oil Palm, Cocoa, and Coconut commodities.
- Optimizing Oil Palm replanting implementation through partnership schemes.

### 2. Plantation Facilities and Infrastructure Program

The Plantation Facilities and Infrastructure Program is focused on supporting plantation productivity and operational efficiency through the provision of supporting production facilities and plantation infrastructure for both land intensification and land extensification activities.

Fokus kegiatan program antara lain:

- Intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida.
- Ekstensifikasi lahan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, dan pestisida.
- Penyediaan mesin pertanian serta sarana transportasi pendukung.
- Peningkatan kualitas jalan kebun.
- Pembangunan dan pengembangan kebun

### 3. Program Promosi Perkebunan

Program Promosi Perkebunan dilaksanakan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk perkebunan, serta memperkuat citra positif komoditas perkebunan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun fokus pelaksanaan program meliputi:

- Target pelaksanaan sebanyak 100 kegiatan promosi.
- Promosi komoditas Kelapa Sawit, Kakao, dan Kelapa melalui pameran perdagangan di dalam dan luar negeri.
- Pelaksanaan kampanye positif produk perkebunan melalui berbagai platform media sosial.
- Penyelenggaraan workshop, seminar, dan forum komunikasi strategis

### 4. Program Pengembangan SDM

Program Pengembangan SDM Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia perkebunan agar mampu mendukung pengelolaan perkebunan yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.

The program focuses include:

- Land intensification through the provision of fertilizers and pesticides.
- Land extensification through the provision of superior seeds, fertilizers, and pesticides.
- Provision of agricultural machinery and supporting transportation facilities.
- Improvement of plantation roads.
- Development and expansion of seedling plantation areas.

### 3. Plantation Promotion Program

The Plantation Promotion Program is implemented to expand market access, improve the competitiveness of plantation products, and strengthen the positive image of Indonesian plantation commodities at both national and international levels.

The program focuses include:

- Target implementation of 100 promotional activities.
- Promotion of Oil Palm, Cocoa, and Coconut commodities through domestic and international trade exhibitions.
- Positive campaigns for plantation products through various social media platforms.
- Organization of workshops, seminars, and strategic communication forums.

### 4. Human Resource Development Program

The Plantation Human Resource Development Program aims to enhance the capacity, competency, and quality of plantation human resources in order to support more productive, modern, and sustainable plantation management.

Fokus pengembangan program mencakup:

- Target peserta pengembangan SDM Perkebunan sebanyak 28.127 orang, yang terdiri atas 5.000 penerima beasiswa mahasiswa baru, 13.000 peserta pelatihan Kelapa Sawit, 1.000 peserta pelatihan Kakao, dan 1.000 peserta pelatihan Kelapa.
- Peningkatan jumlah lembaga pendidikan penyelenggara program beasiswa perkebunan.
- Pelaksanaan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pekebun.

## 5. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan diarahkan untuk mendorong inovasi, memperkuat kapasitas riset, serta meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan.

Fokus program meliputi:

- Target pelaksanaan sebanyak 110 paket riset.
- Komersialisasi hasil riset melalui kerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia.
- Perluasan cakupan bidang penelitian untuk komoditas Kakao dan Kelapa.

## 6. Program Insentif Biodiesel

Program Insentif Biodiesel dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis Kelapa Sawit.

Fokus pelaksanaan program meliputi:

- Target penyaluran biodiesel sebesar 7,45 juta kiloliter.
- Dukungan insentif untuk sektor Public Service Obligation (PSO).
- Implementasi lanjutan kebijakan bauran biodiesel B40.

Melalui pelaksanaan berbagai program strategis tersebut, BPDP berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan yang produktif, berdaya saing, bernilai tambah, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan pekebun Indonesia.

The program focuses include:

- Target participation of 28,127 individuals in plantation human resource development programs, consisting of 5,000 new scholarship recipients, 13,000 Oil Palm training participants, 1,000 Cocoa training participants, and 1,000 Coconut training participants.
- Expansion of educational institutions participating in plantation scholarship programs.
- Provision of extension services, mentoring, and facilitation support for smallholders.

## 5. Research and Development Program

The Research and Development Program is directed toward encouraging innovation, strengthening research capacity, and increasing the utilization of research outcomes in supporting the development and added value enhancement of plantation commodities.

The program focuses include:

- Target implementation of 110 research packages.
- Commercialization of research outcomes through collaboration with the Indonesian Inventors Association.
- Expansion of research coverage for Cocoa and Coconut commodities.

## 6. Biodiesel Incentive Program

The Biodiesel Incentive Program is implemented as part of support for national energy policies through increased utilization of palm oil-based biofuels.

The key focus areas of the program include:

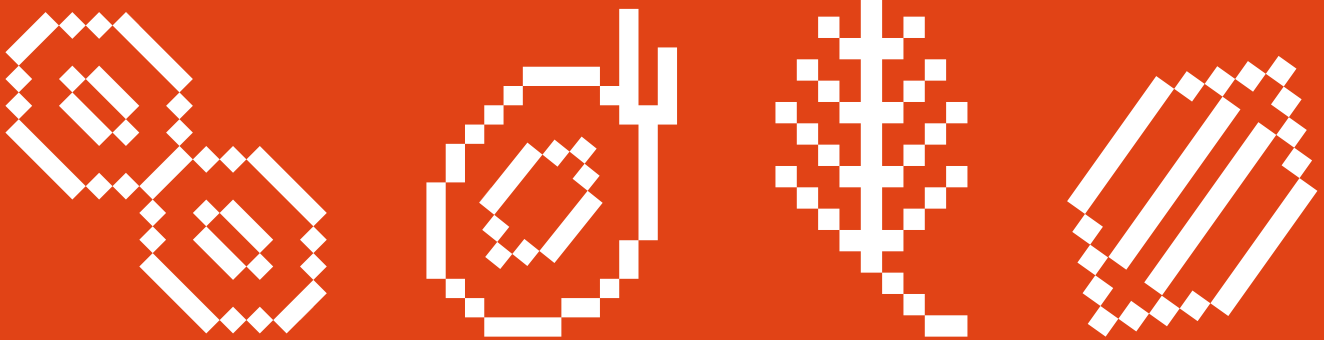
- Biodiesel distribution target of 7.45 million kiloliters.
- Incentive support for the Public Service Obligation (PSO) sector.
- Continued implementation of the B40 biodiesel blending policy.

Through the implementation of these strategic programs, BPDP remains committed to strengthening its contribution toward developing a more productive, competitive, value-added, and sustainable plantation sector, while also supporting national economic growth and improving the welfare of Indonesian smallholders.



## Tata Kelola

Melalui penerapan tata kelola yang dijalankan secara konsisten di seluruh lini organisasi, berbagai program dan pengelolaan dana perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Komitmen terhadap tata kelola yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan yang transparan serta memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan sektor perkebunan Indonesia.



## Governance

Through the consistent implementation of governance practices across all levels of the organization, plantation fund management and strategic programs have been carried out effectively, accountably, and sustainably. A strong commitment to good governance serves as an essential foundation in ensuring transparent management while delivering optimal value for the development of Indonesia's plantation sector.

# 05



## 5.1 Sumber Daya Manusia

### 5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis dan Penguatan Kapasitas SDM

Transformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada tahun 2025 menandai langkah strategis organisasi dalam memperluas peran sebagai badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana kelapa sawit, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis lainnya, seperti kakao dan kelapa. Perluasan mandat tersebut semakin memperkuat posisi BPDP sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendukung kebijakan fiskal, penguatan sektor perkebunan nasional, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, BPDP secara konsisten memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia guna memastikan seluruh program dan layanan dapat dilaksanakan secara profesional, adaptif, inovatif, dan akuntabel. Penguatan SDM menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus mendukung transformasi kelembagaan BPDP menuju institusi yang modern, *agile*, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### A. Analisis Lingkungan Strategis SDM (PESTEL Analysis)

Sebagai organisasi yang berada pada sektor strategis dan memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal, perdagangan, keberlanjutan industri perkebunan, dan pemberdayaan masyarakat, BPDP terus melakukan pemetaan lingkungan strategis guna memastikan kesiapan organisasi dalam menjawab tantangan masa depan.

## 5.1 Human Resources

### 5.1.1 Strategic Environment Analysis and Strengthening of Human Resource Capacity

The transformation of the Plantation Fund Management Agency (BPDP) in 2025 marked a strategic milestone in expanding its role as a public service agency under the Ministry of Finance. BPDP is no longer focused solely on managing palm oil funds, but also supports the development of other strategic plantation commodities, including cocoa and coconut. This expanded mandate further strengthens BPDPs position as a strategic government instrument in supporting fiscal policy, strengthening the national plantation sector, and promoting sustainable economic development.

In responding to the continuously evolving strategic environment, BPDP consistently strengthens its organizational capacity and human resources to ensure that all programs and services are delivered professionally, adaptively, innovatively, and accountably. Human resource development serves as a critical foundation in maintaining organizational sustainability while supporting BPDPs institutional transformation into a modern, agile, and service-oriented organization.

#### A. Strategic Environment Analysis of Human Resources (PESTEL Analysis)

As an organization operating within a strategic sector and closely connected to fiscal policy, trade, plantation industry sustainability, and community empowerment, BPDP continuously maps its strategic environment to ensure organizational readiness in addressing future challenges.

### 1) Politik

Dinamika kebijakan nasional serta meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penguatan sektor perkebunan berkelanjutan menjadi momentum penting bagi BPDP untuk memperluas kontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sinergi lintas kementerian/lembaga dan penguatan koordinasi kebijakan mendorong BPDP untuk memiliki SDM yang adaptif, kolaboratif, dan mampu bergerak secara strategis dalam lingkungan regulasi yang dinamis.

### 2) Ekonomi

Peran BPDP dalam pengelolaan dana sektor perkebunan menempatkan organisasi pada posisi strategis dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan program nasional. Dinamika ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta kebutuhan pembiayaan program perkebunan mendorong BPDP untuk terus memperkuat kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan, investasi, manajemen risiko, dan tata kelola dana publik.

### 3) Sosial

Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik serta kebutuhan penguatan kesejahteraan pekebun menjadi pendorong bagi BPDP untuk terus menghadirkan layanan yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata. Dengan karakteristik wilayah perkebunan yang tersebar luas di Indonesia, BPDP terus memperkuat kapasitas SDM dalam membangun komunikasi, kolaborasi, dan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

### 1) Political

The dynamics of national policies and the Governments increasing focus on strengthening the sustainable plantation sector have created important momentum for BPDP to expand its contribution in supporting the national development agenda. Cross-ministerial synergy and stronger policy coordination encourage BPDP to develop human resources that are adaptive, collaborative, and capable of operating strategically within a dynamic regulatory environment.

### 2) Economic

BPDPs role in managing plantation sector funds places the organization in a strategic position to support the stability and sustainability of national programs. Global economic dynamics, commodity price fluctuations, and increasing financing needs for plantation programs encourage BPDP to continuously strengthen employee competencies in financial management, investment, risk management, and public fund governance.

### 3) Social

Increasing public expectations regarding service quality and the need to improve smallholder welfare encourage BPDP to continuously deliver responsive, inclusive, and impactful services. Considering the vast geographical distribution of plantation areas across Indonesia, BPDP continues strengthening human resource capacity in communication, collaboration, and stakeholder-oriented service approaches.

#### 4) Teknologi

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama penguatan organisasi BPDP. Pengembangan sistem informasi, integrasi data perkebunan, digitalisasi proses bisnis, serta penguatan keamanan informasi terus dilakukan untuk mendukung tata kelola organisasi yang modern dan berbasis data.

Melalui penguatan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan digitalisasi, BPDP terus mendorong terciptanya proses bisnis yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### 5) Lingkungan

Meningkatnya perhatian global terhadap aspek keberlanjutan menjadikan sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, BPDP terus memperkuat kapasitas organisasi untuk mendukung pengembangan perkebunan yang produktif, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

SDM BPDP didorong untuk memiliki perspektif keberlanjutan (sustainability mindset) dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

#### 6) Legal

Sebagai badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan, BPDP berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Dinamika regulasi dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik menjadi pendorong bagi BPDP untuk memperkuat kompetensi SDM di bidang regulasi, kepatuhan, audit, pengawasan, dan mitigasi risiko hukum.

#### 4) Technological

Digital transformation has become one of the primary focuses of organizational strengthening within BPDP. The development of information systems, plantation data integration, business process digitalization, and information security enhancement continue to be implemented to support modern and data-driven organizational governance.

Through strengthening competencies in information technology and digital transformation, BPDP continues to encourage the creation of more effective, transparent, and integrated business processes to improve service quality for all stakeholders.

#### 5) Environmental

Growing global attention toward sustainability issues has positioned the plantation sector as an important contributor to green and sustainable economic development. In this context, BPDP continues strengthening organizational capacity to support productive, inclusive, and environmentally sustainable plantation development.

BPDP employees are encouraged to develop a sustainability mindset in supporting strategic programs that deliver not only economic benefits, but also social and environmental value.

#### 6) Legal

As a public service agency under the Ministry of Finance, BPDP remains committed to strengthening transparent, accountable, and good governance practices. Regulatory dynamics and increasing public accountability demands encourage BPDP to strengthen employee competencies in regulatory compliance, auditing, supervision, and legal risk mitigation.

## B. Analisis Kapabilitas Internal SDM BPDP (VRIO Framework)

Dalam mendukung transformasi organisasi dan perluasan mandat kelembagaan, BPDP melakukan penguatan kapabilitas internal SDM menggunakan pendekatan VRIO (Value, Rarity, Imitability, dan Organization) untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki mampu menjadi keunggulan strategis organisasi.

### 1) Value

SDM BPDP memiliki nilai strategis yang tinggi dalam mendukung pengelolaan dana sektor perkebunan secara profesional, modern, dan akuntabel. Kapabilitas SDM BPDP mencakup kombinasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara, tata kelola badan layanan umum, pengembangan sektor perkebunan, manajemen risiko, hukum, teknologi informasi, hingga pengembangan program strategis nasional.

Kekuatan tersebut menjadikan BPDP memiliki kemampuan untuk merespons dinamika lingkungan strategis sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### 2) Rarity

BPDP memiliki karakteristik SDM yang unik dan tidak banyak dimiliki organisasi lain. Kombinasi kompetensi antara pengelolaan dana publik, pemahaman kebijakan fiskal, tata kelola BLU, serta pengembangan sektor perkebunan menjadikan SDM BPDP memiliki kapabilitas yang khas dan strategis.

Sebagai badan layanan umum yang secara khusus mengelola dana sektor perkebunan nasional, BPDP memiliki posisi yang unik dalam ekosistem pengelolaan dana publik dan pembangunan sektor perkebunan Indonesia.

### 3) Imitability

Kapabilitas SDM BPDP dibangun melalui pengalaman panjang dalam mengelola program strategis nasional, koordinasi lintas kementerian/lembaga, pengelolaan dana berskala besar, serta implementasi program sektor perkebunan dari hulu hingga hilir.

## B. Internal Human Resource Capability Analysis of BPDP (VRIO Framework)

In supporting organizational transformation and the expansion of institutional mandates, BPDP strengthens its internal human resource capabilities using the VRIO framework (Value, Rarity, Imitability, and Organization) to ensure that human resources become a strategic organizational advantage.

### 1) Value

BPDP human resources possess high strategic value in supporting professional, modern, and accountable plantation fund management. Employee capabilities include competencies in state financial management, public service agency governance, plantation sector development, risk management, legal affairs, information technology, and national strategic program development.

These strengths enable BPDP to respond effectively to strategic environmental dynamics while ensuring sustainable and efficient program implementation.

### 2) Rarity

BPDP possesses unique human resource characteristics rarely found in other organizations. The combination of competencies in public fund management, fiscal policy understanding, BLU governance, and plantation sector development creates distinctive and strategic organizational capabilities.

As a public service agency specifically managing national plantation sector funds, BPDP holds a unique position within Indonesia's public fund management and plantation development ecosystem.

### 3) Imitability

BPDP human resource capabilities have been developed through extensive experience in managing national strategic programs, coordinating across ministries and institutions, managing large-scale funds, and implementing plantation sector programs from upstream to downstream.

Pengalaman kelembagaan, kompleksitas tugas, serta penguasaan kompetensi multidisiplin tersebut menjadikan kapabilitas SDM BPDP tidak mudah direplikasi oleh organisasi lain dalam waktu singkat.

#### 4) Organization

BPDP terus melakukan penguatan organisasi melalui pengembangan struktur kelembagaan, transformasi proses bisnis, penguatan budaya kerja, pengembangan sistem manajemen talenta, serta penguatan tata kelola SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Transformasi kelembagaan yang dilakukan menjadi momentum penting bagi BPDP untuk membangun organisasi yang semakin agile, profesional, kolaboratif, dan adaptif dalam menjawab tantangan sektor perkebunan dan pengelolaan dana publik di masa depan.

#### C.Strategi Penguatan SDM BPDP

Sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, BPDP terus melaksanakan berbagai strategi penguatan SDM, antara lain melalui:

1. Penguatan perencanaan kebutuhan SDM berbasis organisasi dan beban kerja melalui analisis kebutuhan pegawai;
2. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan talenta melalui analisis kebutuhan pembelajaran;
3. Penguatan transformasi digital dan kompetensi teknologi informasi;
4. Penguatan budaya kerja profesional, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas;
5. Pengembangan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karier yang berkelanjutan; serta
6. Optimalisasi komposisi SDM melalui penguatan pegawai tetap dan penugasan PNS, serta rekrutmen tenaga profesional yang dipekerjakan secara kontrak pada fungsi-fungsi strategis organisasi.

Such institutional experience, task complexity, and multidisciplinary competencies make BPDP capabilities difficult to replicate by other organizations within a short period.

#### 4) Organization

BPDP continues strengthening its organization through institutional restructuring, business process transformation, strengthening organizational culture, developing talent management systems, and reinforcing performance- and competency-based human resource governance.

This institutional transformation serves as a key momentum for BPDP to build a more agile, professional, collaborative, and adaptive organization capable of addressing future plantation sector and public fund management challenges.

#### C.Human Resource Strengthening Strategies of BPDP

As part of efforts to build a highly competitive and sustainable organization, BPDP continues implementing various human resource strengthening strategies, including:

1. Strengthening organization- and workload-based workforce planning through employee needs analysis.
2. Developing competencies through education, training, certification, and talent development based on learning needs analysis.
3. Strengthening digital transformation and information technology competencies.
4. Reinforcing a professional, adaptive, collaborative, and integrity-driven work culture.
5. Developing sustainable performance management and career development systems.
6. Optimizing workforce composition through strengthening permanent employees, seconded civil servants, and recruiting contract-based professional personnel for strategic organizational functions.

### 5.1.2 Transformasi Pengelolaan SDM melalui Penyusunan Kebijakan Manajemen SDM BPDP

Dalam rangka mendukung transformasi kelembagaan serta penguatan tata kelola organisasi, BPDP telah menetapkan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan nomor PER-2/BPDP/2025 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Dana Perkebunan sebagai landasan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan organisasi jangka panjang.

Penerbitan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen BPDP dalam membangun sistem manajemen SDM yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang seiring dengan perluasan mandat BPDP sebagai badan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini menjadi dasar dalam pengelolaan siklus SDM secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan karier, hingga penguatan disiplin dan budaya kerja organisasi.

Melalui penerapan kebijakan manajemen SDM yang lebih terstruktur, BPDP mendorong terciptanya pengelolaan human capital yang berbasis kompetensi, kinerja, integritas, dan profesionalisme. Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung penguatan organisasi yang agile dan adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, transformasi digital, serta meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana sektor perkebunan.

Penyusunan Peraturan Direktur Utama ini sekaligus menjadi langkah strategis BPDP dalam memperkuat kesinambungan organisasi melalui pengembangan talenta dan penguatan kapasitas SDM yang mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis sektor perkebunan nasional secara berkelanjutan.

### 5.1.2 Transformation of Human Resource Management through the Development of BPDP Human Resource Management Policies

In supporting institutional transformation and strengthening organizational governance, BPDP established President Director Regulation Number PER-2/BPDP/2025 concerning Human Resource Management within the Plantation Fund Management Agency. This regulation serves as the foundation for a more integrated, adaptive, and long-term oriented human resource management policy.

The issuance of this policy reflects BDPs commitment to building a professional and accountable human resource management system aligned with the organizations evolving needs following the expansion of BDPs mandate as a strategic institution under the Ministry of Finance.

The policy provides the framework for managing the entire human resource cycle, including workforce planning, recruitment, competency development, performance management, career development, discipline, and organizational culture strengthening.

Through the implementation of a more structured human resource management policy, BPDP promotes competency-based, performance-driven, integrity-oriented, and professional human capital management. The policy is also designed to support the development of a more agile and adaptive organization in responding to strategic environmental dynamics, digital transformation, and increasing complexity in plantation fund management.

The issuance of this President Director Regulation also represents a strategic step in strengthening organizational sustainability through talent development and human resource capacity enhancement to support the successful implementation of sustainable national plantation sector programs.

### 5.1.3 Pelaksanaan Rekrutmen Talenta Profesional untuk Mendukung Transformasi dan Keberlanjutan BPDP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang semakin berkembang, BPDP terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan rekrutmen tenaga profesional yang dilaksanakan secara selektif, transparan, dan berbasis kebutuhan organisasi. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan program strategis BPDP di sektor perkebunan nasional.

Transformasi kelembagaan BPDP pada tahun 2025 yang disertai dengan perluasan mandat pengelolaan dana sektor perkebunan, tidak hanya pada komoditas kelapa sawit tetapi juga kakao dan kelapa, mendorong meningkatnya kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi multidisiplin dan mampu menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan rekrutmen tenaga profesional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada fungsi-fungsi strategis, teknis, dan operasional yang mendukung efektivitas pelaksanaan program BPDP.

Rekrutmen tenaga profesional dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja, peta kebutuhan SDM, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan dana perkebunan secara profesional dan akuntabel. Proses seleksi dilaksanakan secara objektif dan kompetitif guna memperoleh SDM yang memiliki integritas profesionalisme, kompetensi teknis, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaborasi yang tinggi.

Tenaga profesional yang direkrut mendukung berbagai fungsi strategis organisasi, antara lain pengelolaan investasi dan risiko, penyaluran dana program perkebunan, pengembangan SDM perkebunan, hukum dan kerja sama, teknologi informasi, promosi perkebunan, serta fungsi pengawasan dan tata kelola organisasi.

### 5.1.3 Recruitment of Professional Talent to Support BPDP Transformation and Sustainability

To support the expanding duties and functions of the organization, BPDP continues strengthening its human resource capacity through the recruitment of professional personnel conducted selectively, transparently, and based on organizational needs. This initiative forms an important part of ensuring the sustainability of BPDPs strategic programs in the national plantation sector.

BPDPs institutional transformation in 2025, accompanied by the expansion of plantation fund management mandates beyond palm oil to include cocoa and coconut commodities, has increased the need for multidisciplinary human resources capable of addressing increasingly complex organizational challenges.

Professional recruitment is therefore directed toward fulfilling workforce needs in strategic, technical, and operational functions that support effective program implementation.

Recruitment processes are conducted based on workload analysis, workforce mapping, and competency requirements needed to support professional and accountable plantation fund management. The selection process is implemented objectively and competitively to attract individuals with integrity, professionalism, technical expertise, adaptability, and strong collaborative capabilities.

The recruited professionals support various strategic organizational functions, including investment and risk management, plantation fund distribution, plantation human resource development, legal affairs and partnerships, information technology, plantation promotion, as well as governance and supervisory functions.

Melalui penguatan SDM tersebut, BPDP berupaya memastikan bahwa seluruh program dan layanan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kehadiran tenaga profesional juga menjadi bagian dari strategi organisasi dalam menjaga agility dan kapasitas kelembagaan BPDP dalam menghadapi dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, serta tantangan sektor perkebunan nasional dan global.

BPDP meyakini bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan fondasi utama dalam mendukung stabilisasi, penguatan, dan keberlanjutan industri perkebunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang profesional dan berbasis kompetensi akan terus menjadi prioritas organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPDP sebagai badan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan

#### **5.1.4 Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Menciptakan Pegawai yang Unggul dan Berdaya Saing.**

Dalam rangka mendukung transformasi organisasi dan penguatan peran BPDP sebagai badan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, BPDP secara konsisten melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari strategi penguatan human capital yang berkelanjutan. Program tersebut diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menjawab dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi diawali melalui analisis kebutuhan pembelajaran (*learning needs analysis*) yang disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, perkembangan lingkungan eksternal, serta kapabilitas internal SDM BPDP. Dalam proses tersebut, BPDP menggunakan pendekatan analisis PESTEL dan VRIO guna memastikan pengembangan kompetensi selaras dengan arah transformasi organisasi dan kebutuhan strategis jangka panjang.

Through strengthening human resources, BPDP seeks to ensure that all programs and services are implemented optimally, effectively, and sustainably. The presence of professional personnel also forms part of BPDPs strategy to maintain organizational agility and institutional capacity in responding to policy dynamics, technological developments, and challenges within the national and global plantation sectors.

BPDP believes that high-quality human resources are the primary foundation for supporting the stabilization, strengthening, and sustainability of the national plantation industry. Therefore, professional and competency-based human resource management will continue to remain a key organizational priority in supporting the achievement of BPDPs vision and mission as a strategic institution under the Ministry of Finance.

#### **5.1.4 Training and Competency Development Programs to Build Excellent and Competitive Employees.**

In supporting organizational transformation and strengthening BPDPs role as a strategic institution under the Ministry of Finance, BPDP consistently implements training and competency development programs as part of its sustainable human capital strengthening strategy. These programs are designed to develop professional, adaptive, innovative, and future-ready human resources capable of responding to evolving strategic dynamics.

Competency development implementation begins with a systematic Learning Needs Analysis (LNA), which considers organizational needs, external environmental developments, and internal human resource capabilities. BPDP applies both PESTEL and VRIO analytical approaches to ensure competency development aligns with organizational transformation and long-term strategic needs.

Melalui analisis PESTEL, BPDP mengidentifikasi berbagai perubahan lingkungan strategis yang memengaruhi kebutuhan kompetensi pegawai, antara lain dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi digital, penguatan tata kelola dan regulasi, isu keberlanjutan sektor perkebunan, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan publik. Kondisi tersebut mendorong BPDP untuk memperkuat kompetensi pegawai pada bidang pengelolaan keuangan dan risiko, tata kelola organisasi, teknologi informasi, komunikasi strategis, pengelolaan program perkebunan, keberlanjutan (*sustainability*), serta kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, analisis internal menggunakan kerangka VRIO menunjukkan bahwa SDM BPDP memiliki karakteristik kompetensi yang unik karena memadukan kemampuan di bidang pengelolaan dana publik, tata kelola badan layanan umum, kebijakan fiskal, serta pengembangan sektor perkebunan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai, tetapi juga untuk memperkuat keunggulan kompetitif organisasi melalui pengembangan kapabilitas multidisiplin, kepemimpinan, inovasi, dan kemampuan adaptasi organisasi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi BPDP dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, antara lain pelatihan klasikal, pelatihan teknis dan sertifikasi, seminar dan *workshop*, *coaching* dan mentoring, *knowledge sharing*, serta pembelajaran digital (*digital learning*). Dalam rangka mendorong profesionalisme dan peningkatan kualitas SDM, BPDP juga memberikan dukungan kepada pegawai untuk mengikuti berbagai program sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kompetensi di bidang masing-masing.

Through PESTEL analysis, BPDP identifies strategic environmental changes affecting employee competency requirements, including evolving government policies, digital technological developments, governance and regulatory strengthening, sustainability issues in the plantation sector, and increasing stakeholder expectations regarding public service quality.

These dynamics encourage BPDP to strengthen employee competencies in financial and risk management, organizational governance, information technology, strategic communication, plantation program management, sustainability, and cross-sector collaboration.

Meanwhile, internal analysis using the VRIO framework demonstrates that BPDP human resources possess unique competencies through the integration of public fund management expertise, public service agency governance, fiscal policy understanding, and plantation sector development.

Accordingly, competency development is directed not only toward enhancing employees technical capabilities, but also toward strengthening the organizations competitive advantage through multidisciplinary capabilities, leadership development, innovation, and organizational adaptability.

BPDP training and competency development programs are delivered through various learning methods, including classroom training, technical training and certification, seminars and workshops, coaching and mentoring, knowledge sharing, and digital learning.

To strengthen professionalism and improve human resource quality, BPDP also supports employees participation in professional certification programs relevant to organizational needs and competency development within their respective fields.

Program sertifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi BPDP dalam membangun SDM yang memiliki standar kompetensi profesional, berdaya saing, dan mampu mendukung penguatan tata kelola organisasi. Adapun sertifikasi yang telah diikuti oleh pegawai BPDP antara lain Bendahara Negara Tersertifikasi, Certified Government Accounting Associate (CGAA), Certified Government Accounting Expert (CGAE), Certified Human Resource Manager (CHRM), Certified Organization Performance Analyst (COPA), Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, Certified Compliance Professional (CCP), Certified Risk Management Officer (CRMO), Qualified Risk Management Analyst (QRMA), Qualified Risk Management Professional (QRMP), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), Certified Technical Analyst, Sertifikasi Wakil Manajer Investasi, Certified Fixed Income Analyst, Certified Filing Handling Competency Cluster, Qualified Internal Auditor, sertifikasi teknologi informasi, serta berbagai sertifikasi teknis dan profesional lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Melalui dukungan terhadap program sertifikasi profesi, BPDP mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berbasis kompetensi, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis dan meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana sektor perkebunan.

Selain mendukung peningkatan kompetensi individu, program pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk memperkuat budaya belajar (*learning culture*) dan membangun organisasi yang *agile*, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan.

Melalui pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang terarah dan berkelanjutan, BPDP berkomitmen untuk membangun SDM unggul yang mampu mendukung stabilisasi, penguatan, dan keberlanjutan sektor perkebunan nasional, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan mandat strategis secara profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Professional certifications undertaken by BPDP employees include Certified State Treasurer, Certified Government Accounting Associate (CGAA), Certified Government Accounting Expert (CGAE), Certified Human Resource Manager (CHRM), Certified Organization Performance Analyst (COPA), Procurement Certification, Certified Compliance Professional (CCP), Certified Risk Management Officer (CRMO), Qualified Risk Management Analyst (QRMA), Qualified Risk Management Professional (QRMP), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), Certified Technical Analyst, Investment Manager Representative Certification, Certified Fixed Income Analyst, Certified Filing Handling Competency Cluster, Qualified Internal Auditor, information technology certifications, and various other technical and professional certifications aligned with organizational needs.

Through support for professional certification programs, BPDP promotes a professional and competency-based work culture while strengthening organizational capacity in addressing strategic environmental dynamics and increasing complexity in plantation fund management.

Beyond individual competency improvement, competency development programs are also directed toward strengthening the organizational learning culture and building a more agile, collaborative, and adaptive organization.

Through focused and sustainable competency development initiatives, BPDP remains committed to building superior human resources capable of supporting the stabilization, strengthening, and sustainability of the national plantation sector while reinforcing organizational capacity to carry out strategic mandates professionally, accountably, and competitively.

## 5.2 Manajemen Risiko

### 5.2.1 Sistem Manajemen Risiko

BPDP menerapkan Sistem Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-252/PB/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Risiko Organisasi Di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif yang luas, mudah dipahami, terukur serta mampu meningkatkan integrasi dan koordinasi antar unit kerja di BPDP. Penerapan Sistem Manajemen Risiko di BPDP terdiri dari tahapan-tahapan pengelolaan risiko yang terstruktur dan sistematis. Fungsi Manajemen Risiko BPDP dijalankan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

### 5.2.2 Komitmen Dan Penerapan Manajemen Risiko BPDP

BPDP telah mengimplementasikan Penerapan manajemen risiko melalui kegiatan pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Budaya sadar risiko dikembangkan dengan berpedoman pada nilai-nilai BPDP dengan memberikan pemahaman bahwa pengelolaan risiko menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Disamping itu, sebagai upaya dalam mencapai visi, misi, dan sasaran bisnis Badan Layanan Umum, Divisi Manajemen Risiko BPDP menyusun profil risiko, melakukan monitoring dan mitigasi risiko.

## 5.2 Risk Management

### 5.2.1 Risk Management System

BPDP implements a Risk Management System based on Minister of Finance Regulation Number 222/PMK.01/2021 concerning State Financial Risk Management, Minister of Finance Decree Number 105/KMK.01/2022 concerning Guidelines for the Implementation of State Financial Risk Management, and Director General of Treasury Decree Number KEP-252/PB/2022 concerning Guidelines for the Implementation of State Financial Risk Management for Organizational Risks within the Directorate General of Treasury.

The implementation of this framework is intended to establish risk management practices that are comprehensive, measurable, easy to understand, and capable of strengthening integration and coordination across all work units within BPDP.

The Risk Management System at BPDP is implemented through structured and systematic risk management processes consisting of risk identification, assessment, monitoring, mitigation, and evaluation. The risk management function within BPDP is carried out by the Compliance and Risk Management Division, led by the Head of the Compliance and Risk Management Division.

### 5.2.2 Commitment and Implementation of Risk Management

BPDP has implemented risk management through the development of a risk-aware culture, the establishment of a risk management structure, and the implementation of risk management processes throughout the organization. The development of a risk-aware culture is guided by BPDP values by promoting the understanding that risk management forms an integral part of decision-making processes at all organizational levels.

In addition, as part of efforts to achieve the vision, mission, and business objectives of the Public Service Agency, the Risk Management Division prepares risk profiles and conducts risk monitoring and mitigation activities on an ongoing basis.

Sebagai wujud komitmen Penerapan Manajemen Risiko BPDP dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen risiko, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh unit kerja BPDP sebagaimana dalam Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-286/DPKS/2025 tentang Struktur Manajemen Risiko Pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2025

As a reflection of its commitment to implementing risk management, BPDP applies risk management principles across the organization and clearly defines the main duties and responsibilities related to risk management within all work units, as stipulated in President Director Decree Number KEP-286/DPKS/2025 concerning the Risk Management Structure of the Plantation Fund Management Agency for 2025.



### 5.2.3 Profil dan Peta Risiko

Penyusunan profil risiko BPDP didasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal. Dalam penyusunan profil risiko tersebut, BPDP telah melaksanakan *risk assessment* di semua proses bisnis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan level risiko menjadi beberapa tingkatan, yaitu: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi

### 5.2.3 Risk Profile and Risk Map

The preparation of the risk profile is based on organizational objectives as well as internal and external factors that may affect the achievement of those objectives. In developing the risk profile, risk assessments have been conducted across all business processes to further analyze potential risks and identify their possible impacts on organizational performance. The identified risks are subsequently classified into several risk levels, namely Very Low, Low, Moderate, High, and Very High.

Tingkatan   Level	Level Risiko   Risk Level	Besaran Risiko   Risk	Warna   Colour
5	Sangat Tinggi   Very High	20-25	
4	Tinggi   High	16-19	
3	Sedang   Moderate	12-15	
2	Rendah   Low	6-11	
1	Sangat Rendah   Very Low	1-5	



Sepanjang tahun 2025, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP berfokus pada pengelolaan kualitas perbaikan dan mitigasi dari profil risiko tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan risiko-risiko yang dapat merugikan BPDP baik di bidang Keuangan, kepatuhan, Kebijakan, Fraud, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi BPDP adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, the Compliance and Risk Management Division focused on strengthening the quality of corrective actions and mitigation measures related to the 2024 risk profile, particularly risks that had the potential to adversely affect the organization in the areas of finance, compliance, policy, fraud, operations, and reputation.

<b>RISIKO KEUANGAN</b> <b>FINANCIAL RISK</b>	<p>Berkaitan kondisi fiskal pemerintah pusat meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.</p> <p>Related to the central government's fiscal conditions include the macroeconomic framework, budgeting, taxation, customs, treasury, and financial supervision as well as with regard to state assets which include State Property (BMN), separated state assets, government investment, and other state assets.</p>
<b>RISIKO KEBIJAKAN</b> <b>POLICY RISK</b>	<p>Berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.</p> <p>Related to the formulation and determination of internal and external policies of the organization.</p>
<b>RISIKO REPUTASI</b> <b>REPUTATION RISK</b>	<p>Berkaitan dengan persepsi negatif atau menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi</p> <p>Related to the negative perceptions or reduced levels of external stakeholder trust towards the organization</p>
<b>RISIKO FRAUD</b> <b>FRAUD RISK</b>	<p>Berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih.</p> <p>Related to the acts that contain elements of intentional, benefiting oneself or others, fraud, concealment or embezzlement, and abuse of trust with the aim of obtaining illegal profits which can be in the form of money, goods/property, services, and not paying for services, by one or more individuals.</p>
<b>RISIKO LEGAL</b> <b>LEGAL RISK</b>	<p>Berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lain kepada organisasi/jabatan.</p> <p>Related to the lawsuits and other legal remedies against organizations/positions.</p>
<b>RISIKO KEPATUHAN</b> <b>COMPLIANCE RISK</b>	<p>Berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.</p> <p>Related to the non-compliance with organizations or external parties with laws and regulations, international agreements, or other applicable provisions.</p>
<b>RISIKO OPERASIONAL</b> <b>OPERATIONAL RISK</b>	<p>Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu</p> <p>Related to the malfunctioning risks of the organization's business processes, information systems, or individual work safety</p>

### Peta Risiko Berdasarkan Klasifikasi Risiko Risk Map by Risk Classification

Matriks Analisis Risiko Risk Analysis Matrix		Level Dampak   Impact Level				
		1 Tidak Signifikan Insignificant	2 Minor Minor	3 Moderat Moderate	4 Signifikan Significant	5 Sangat Signifikan Very Significant
Level Kemungkinan   Likelihood Level	5 Hampir Pasti Terjadi Almost Definitely Occurs	7	12	17	22	25
	4 Sering Terjadi Often Occurs	4	9	14	19	24
	3 Kadang Terjadi Sometimes Occurs	3	8	13	18	23
	2 Jarang Terjadi Rarely Occurs	2	6	11	16	21
	1 Hampir Tidak Terjadi Hardly Occurs	1	5	10	15	20



Adapun daftar risiko beserta besaran risiko BPDP pada tahun 2025 sebelum dan sesudah dimitigasi antara lain sebagai berikut :

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko		
			Awal Periode	Akhir Periode	
1.	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan	1.1	Peningkatan bauran Mandatori Biodiesel	14	22
		1.2	Dana Sawit tidak mencukupi Untuk membayar insentif Biodiesel	20	10
		1.3	Terlambatnya penyampaian dan tindak lanjut rekomendasi teknis dari Ditjenbun, Kementerian Pertanian	14	9
		1.4	Terdapat layanan BPDPKS yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan	12	7
		1.5	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	10
2.	Penyaluran dana perkebunan yang efektif	2.1	Rendahnya jumlah penerbitan rekomtek yang disampaikan kepada BPDP	17	17
		2.2	SK Dirut BPDPKS terkait Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) lambat terbit	8	3
		2.3	Sedikitnya usulan penelitian yang direkomendasikan oleh komite litbang BPDPKS	17	7
3.	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	3.1	Bukti dukung penilaian maturity rating tidak lengkap	9	9
		3.2	Tingkat harga CPO berada di bawah harga produksi	15	10
		3.3	Perhitungan proyeksi dan/atau realisasi pendapatan tidak akurat	10	1
4.	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal	4.1	Penurunan suku bunga deposito perbankan dan nilai instrumen investasi obligasi	14	9
		4.2	Perbaikan/pemenuhan dokumen atas konfirmasi dari stakeholder (bea cukai dan/atau eksportir) membutuhkan waktu yang lama	1	6
5.	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif	5.1	Terdapat persepsi negatif terhadap kelapa sawit pada media massa	19	9
		5.2	Terdapat hambatan perizinan pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka perluasan pasar ekspor	1	2

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko		
			Awal Periode	Akhir Periode	
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6.1	Keterlambatan penyampaian Laporan Manajemen Risiko	5	5
		6.2	Terdapat rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis yang terlambat diselesaikan tepat waktu	2	2
7.	Pengelolaan Organisasi yang adaptif	7.1	Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di bawah nilai yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJPb	16	10
		7.2	Ownership pegawai terhadap organisasi	15	10
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8.1	Terjadi deviasi yang melebihi 5% antara realisasi/pengesahan belanja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada halaman III DIPA	17	7
9.	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	9.1	Data pada Aplikasi BIOS tidak terkirim setiap hari	16	10
		9.2	Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15	10



#### 5.2.4 Penerapan Kode Etik

Sejalan dengan komitmen terhadap penerapan etika bisnis dan etika kerja, BPDP secara konsisten melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sebagai unit organisasi non-eselon berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), BPDP bergerak di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, BPDP mengikuti pedoman kode etik yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, mengingat keberagaman pegawai BPDP yang tidak hanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga profesional non-PNS, terdapat beberapa penyesuaian dalam penerapan kode etik tersebut.

Untuk mengakomodasi karakteristik tersebut, BPDP telah menerbitkan pedoman kode etik sendiri melalui Peraturan Direktur Utama Nomor Per-14/DPKS/2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan perusahaan serta menetapkan sanksi moral bagi pelanggarannya.

Dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, BPDP mengacu pada ketentuan resmi berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern serta KMK-322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal di BPDP dijalankan secara terstruktur untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara efektif dan akuntabel.

#### 5.2.4 Implementation of the Code of Ethics

In line with its commitment to business ethics and professional conduct, BPDP consistently implements internal control monitoring activities aimed at providing reasonable assurance on the achievement of organizational objectives. As a non-echelon organizational unit in the form of a Public Service Agency (BLU), BPDP operates in the management of Palm Oil Plantation Funds and is directly accountable to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury.

As part of the Ministry of Finance, BPDP follows the code of ethics guidelines stipulated under Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants within the Ministry of Finance. However, considering the diverse composition of BPDP employees, which includes both civil servants (PNS) and non-civil servant professionals, certain adjustments have been made in the implementation of the code of ethics.

To accommodate these characteristics, BPDP has issued its own code of ethics through Director Regulation Number Per-14/DPKS/2021 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct. This guideline serves as a reference for all employees in maintaining appropriate conduct in the workplace and establishes moral sanctions for violations.

In implementing internal control monitoring, BPDP refers to official regulations, namely Minister of Finance Decree Number KMK-477/KMK.09/2021 concerning Guidelines for Monitoring the Implementation of the Internal Control System, and KMK-322/KMK.09/2021 concerning the Framework for Implementing the Internal Control System within the Ministry of Finance. Accordingly, BPDP's internal control system is implemented in a structured manner to support the effective and accountable achievement of the organization's strategic objectives.

### 5.2.5 Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan baik kepada stakeholders maupun internal, BPDP mengelola sistem pelaporan pelanggaran yang dirancang untuk menindaklanjuti pengaduan secara efektif dan rahasia. Sistem ini mencakup penanganan berbagai dugaan pelanggaran, termasuk korupsi, pencurian, kecurangan (*fraud*), praktik suap, gratifikasi, pembocoran rahasia organisasi, pelanggaran etika, pemerasan, penggelapan aset, penipuan, benturan kepentingan, serta tindakan tidak etis atau melawan hukum lainnya.

Sistem ini bersifat anonim dan mandiri sehingga memberikan perlindungan kepada pelapor sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh Insan BPDP maupun pihak eksternal dalam mengungkapkan setiap potensi pelanggaran di lingkungan organisasi.

BPDP memiliki 3 (tiga) media komunikasi sebagai sistem saluran pengaduan dalam penyampaian Laporan pelanggaran atau pengaduan dari stakeholders, yaitu:

- Aplikasi HAI DJPB (<https://hai.kemenkeu.go.id/>)
- Aplikasi Sipandu (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/sipandu/>)
- Kotak Pengaduan fisik yang disediakan di lingkungan kantor BPDP

Dengan keberadaan berbagai media ini, BPDP memastikan kemudahan akses dan keterbukaan bagi seluruh *stakeholder* dalam menyampaikan informasi terkait pelanggaran secara transparan dan terpercaya.

### 5.2.5 Complaint Management

To improve services for both stakeholders and internal parties, BPDP manages a whistleblowing system designed to handle complaints effectively and confidentially. This system covers various types of alleged violations, including corruption, theft, fraud, bribery, gratification, disclosure of confidential information, ethical violations, extortion, asset misappropriation, deception, conflicts of interest, and other unethical or unlawful actions.

The system is anonymous and independent, providing protection for whistleblowers while encouraging active participation from BPDP personnel and external parties in reporting any potential violations within the organization.

BPDP provides three communication channels as complaint reporting media for stakeholders to submit reports or complaints, namely:

- Aplikasi HAI DJPB (<https://hai.kemenkeu.go.id/>) Aplikasi
- SIPANDU (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/sipandu/>)
- Kotak pengaduan fisik yang tersedia di lingkungan kantor BPDP

Through these channels, BPDP ensures accessibility and openness for all stakeholders to report violations in a transparent and reliable manner. elanggaran secara transparan dan terpercaya.

### 5.3 Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) merupakan organ pendukung di bawah Direktur Utama yang berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 27, 28, dan 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan dinyatakan bahwa dibentuk Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Selain itu, berdasarkan Pasal 267 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, BLU harus memiliki piagam Pengawasan Intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kepala SPI serta mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Berdasarkan Piagam Satuan Pemeriksaan Intern BPDP, tugas, tanggung jawab, dan wewenang SPI adalah:

#### Tugas

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPDP.

#### Tanggung Jawab

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana pemeriksaan intern;
- Pengujian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;

### 5.3 Internal Audit Unit

Internal Audit Unit (IAU) is a supporting organ under the President Director that serves as a strategic management partner in providing reasonable assurance on the achievement of operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, and compliance with prevailing laws and regulations. Pursuant to Articles 27, 28, and 29 of Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Plantation Fund Management Agency, an Internal Audit Unit (IAU) has been established within the Plantation Fund Management Agency (BPDP). Furthermore, pursuant to Article 267 of Minister of Finance Regulation Number 129/PMK.05/2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies, as lastly amended by Minister of Finance Regulation Number 76 of 2025 concerning the Second Amendment to Minister of Finance Regulation Number 129/PMK.05/2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies, Public Service Agencies (BLU) are required to have an Internal Audit Charter signed by the President Director and the Head of the Internal Audit Unit and approved by the Supervisory Board. Based on the BPDP Internal Audit Charter, the duties, responsibilities, and authorities of the Internal Audit Unit are as follows:

#### Duties

The Internal Audit Unit is tasked with conducting internal audits on the implementation of BPDP's duties and functions.

#### Responsibilities

- Formulation and implementation of the internal audit plan;
- Assessment and evaluation of the implementation of internal controls and risk management systems;

- Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
  - Pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
  - Pembuatan laporan hasil pemeriksaan intern dan penyampaian laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas;
  - Pemberian rekomendasi terhadap perbaikan dan/atau peningkatan proses tata kerja dan upaya pencapaian strategi bisnis;
  - Pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina badan layanan umum;
  - Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
  - Pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
  - Penyusunan dan pemutakhiran pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern; dan
  - Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Examination and assessment of efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
  - Provision of recommendations for improvement and objective information regarding supervised activities at all levels of management;
  - Preparation of internal audit reports and submission of such reports to the President Director and the Supervisory Board;
  - Provision of recommendations for the improvement and/or enhancement of work processes and efforts to achieve business strategies;
  - Monitoring, analysis, and reporting on the implementation of follow-up actions arising from audit recommendations issued by the Internal Audit Unit, government internal supervisory bodies, external government auditors, and public service agency supervisors;
  - Conduct of financial statement reviews;
  - Conduct of special audits when necessary;
  - Preparation and updating of work guidelines, as well as systems and procedures for the implementation of Internal Audit Unit duties; and
  - Performance of other duties assigned in accordance with prevailing laws and regulations.

## Wewenang

SPI dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen dan fisik aset BPDP pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi BPDP dan/atau Dewan Pengawas;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi BPDP, Dewan Pengawas, dan/atau Komite Audit;
- Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pengawasan ekstern Pemerintah dan/atau pembina badan layanan umum; dan
- Mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pengawasan ekstern Pemerintah dan/atau pembina badan layanan umum dalam melakukan pengawasan atau pembinaan.

## Authority

Carrying out its duties, the Internal Audit Unit has the following authorities:

- Obtain access to all documents, records, human resources, management information systems, and physical assets of BPDP across all divisions and work units;
- Communicate directly with the Board of Directors of BPDP and/or the Supervisory Board;
- Conduct regular and incidental meetings with the Board of Directors of BPDP, the Supervisory Board, and/or the Audit Committee;
- Coordinate with government internal supervisory bodies, external government supervisory bodies, and/or public service agency supervisors; and
- Assist government internal supervisory bodies, external government supervisory bodies, and/or public service agency supervisors in carrying out supervisory or advisory activities.

## 5.4 Teknologi dan Informasi

Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional, pengelolaan data dan informasi, serta peningkatan kualitas layanan di lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan andal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses bisnis yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BPDP terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyusunan dan implementasi Roadmap Teknologi Informasi yang dirancang secara komprehensif, mencakup pengembangan aplikasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, infrastruktur digital, hingga penguatan keamanan informasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi digital BPDP serta meminimalisir risiko operasional dan keamanan siber di masa mendatang.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan layanan dan kebijakan pemerintah di bidang digitalisasi, BPDP juga mendorong pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan kementerian / lembaga terkait, penerapan standar keamanan informasi, serta penguatan tata kelola data guna mendukung layanan publik yang lebih optimal dan berkelanjutan.

### Pengelolaan Informasi

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja sebelumnya BPD PKS menjadi BPDP sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2025 yang mana fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDP dikelola oleh Divisi Komunikasi dan Layanan Informasi yang mana terdapat fokus kerja di bidang Perangkat Lunak, Perangkat Keras/Infrastruktur dan Jaringan, serta Teknologi Support.

## 5.4 Technology and Information

Information Technology plays a strategic role in supporting operational effectiveness, data and information management, and service quality improvement within the Plantation Fund Management Agency (BPDP). Integrated and reliable information technology management is also an important component in establishing effective, efficient, transparent, and accountable business processes.

BPDP continues to optimize the utilization of information technology through the development and implementation of a comprehensive Information Technology Roadmap covering application development, data governance, system interoperability, digital infrastructure, and information security enhancement. These efforts are intended to support BPDPs digital transformation while minimizing operational and cybersecurity risks in the future.

In line with evolving service requirements and Government digitalization policies, BPDP also promotes the development of integrated information systems connected with relevant ministries and institutions, the implementation of information security standards, and the strengthening of data governance to support more effective and sustainable public services.

### Information Management

In 2025, organizational and governance changes were implemented following the transition from BPD PKS to BPDP pursuant to Minister of Finance Regulation Number 6 of 2025. Under this structure, Information Technology Management is administered by the Communication and Information Services Division, with key focus areas covering Software Development, Hardware /Infrastructure and Networking, as well as Technology Support Services.

## Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital organisasi, penguatan tata kelola dana perkebunan, serta peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi BPDP Tahun 2025–2029, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Teknologi Informasi meliputi:

- Berkoordinasi, membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem informasi serta transaksi elektronik yang mendukung seluruh proses bisnis BPDP secara terintegrasi, adaptif, dan berbasis data;
- Menyiapkan, mengoperasikan, mengelola, dan infrastruktur Teknologi Informasi, termasuk perangkat keras, jaringan komunikasi data, *data center*, *cloud services*, serta layanan sistem informasi agar dapat diakses secara aman, andal, dan berkelanjutan oleh internal BPDP maupun *stakeholder*;
- Melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sesuai kebutuhan unit kerja BPDP serta perkembangan teknologi informasi terkini;
- Mendukung implementasi interoperabilitas dan integrasi sistem dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, dan *stakeholder* lainnya melalui pemanfaatan API, *middleware*, dan layanan pertukaran data secara aman;
- Melaksanakan penguatan keamanan informasi dan perlindungan data melalui penerapan kebijakan keamanan siber, *vulnerability assessment*, *penetration test*, *backup data*, serta pengendalian akses sistem sesuai standar dan regulasi yang berlaku;

## Duties and Responsibilities of Information Technology Management

Information Technology Management within the Plantation Fund Management Agency (BPDP) plays a strategic role in supporting organizational digital transformation, strengthening plantation fund governance, and improving service quality for stakeholders.

In line with the BPDP Information Technology Development Roadmap 2025–2029, the duties and responsibilities of Information Technology Management include:

- Coordinating, developing, enhancing, and integrating information systems and electronic transaction services that support all BPDP business processes in an integrated, adaptive, and data-driven manner.
- Preparing, managing, and operating Information Technology infrastructure, including hardware, data communication networks, data centers, cloud services, and information systems to ensure secure, reliable, and sustainable access for internal users and stakeholders.
- Conducting needs analysis, planning, development, maintenance, and evaluation of information systems based on organizational requirements and technological developments.
- Supporting interoperability and system integration with ministries, institutions, business partners, and other stakeholders through the implementation of APIs, middleware, and secure data exchange services.
- Strengthening information security and data protection through cybersecurity policies, vulnerability assessments, penetration testing, data backup systems, and system access controls in accordance with applicable standards and regulations.

- Menyediakan dukungan pelaksanaan *Hybrid Video Conference*, layanan multimedia digital, desain media komunikasi publik (*marketing communication*), serta pengelolaan *website* dan media sosial BPDP;
- Melaksanakan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM Teknologi Informasi melalui pelatihan, dan kolaborasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mendukung pengembangan layanan digital BPDP berbasis portal, aplikasi *mobile*, *Artificial Intelligence* (AI), WebGIS, dan teknologi digital lainnya guna meningkatkan efektivitas layanan dan tata kelola organisasi.
- Providing support for Hybrid Video Conference implementation, digital multimedia services, public communication media design (*marketing communication*), and the management of BPDP websites and social media platforms.
- Enhancing the competencies and capabilities of Information Technology personnel through training programs and collaboration with relevant units within the Ministry of Finance.
- Supporting the development of BPDP digital services through portal-based systems, mobile applications, Artificial Intelligence (AI), WebGIS, and other digital technologies to improve organizational governance and service effectiveness.

### Roadmap Teknologi Informasi

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi BPDP Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah strategis transformasi digital organisasi dalam mendukung pengelolaan dana perkebunan yang transparan, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Roadmap ini menjadi pedoman pengembangan teknologi informasi yang terstruktur, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan organisasi.

Salah satu target utama pengembangan Teknologi Informasi BPDP adalah peningkatan kualitas layanan TI, penguatan keamanan informasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi, serta integrasi layanan digital yang mendukung proses bisnis BPDP. Fokus pengembangan dilakukan melalui penguatan infrastruktur TI, integrasi sistem informasi dan data layanan, implementasi keamanan siber, pengembangan portal layanan digital, serta pemanfaatan teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* (AI), dan sistem berbasis WebGIS.

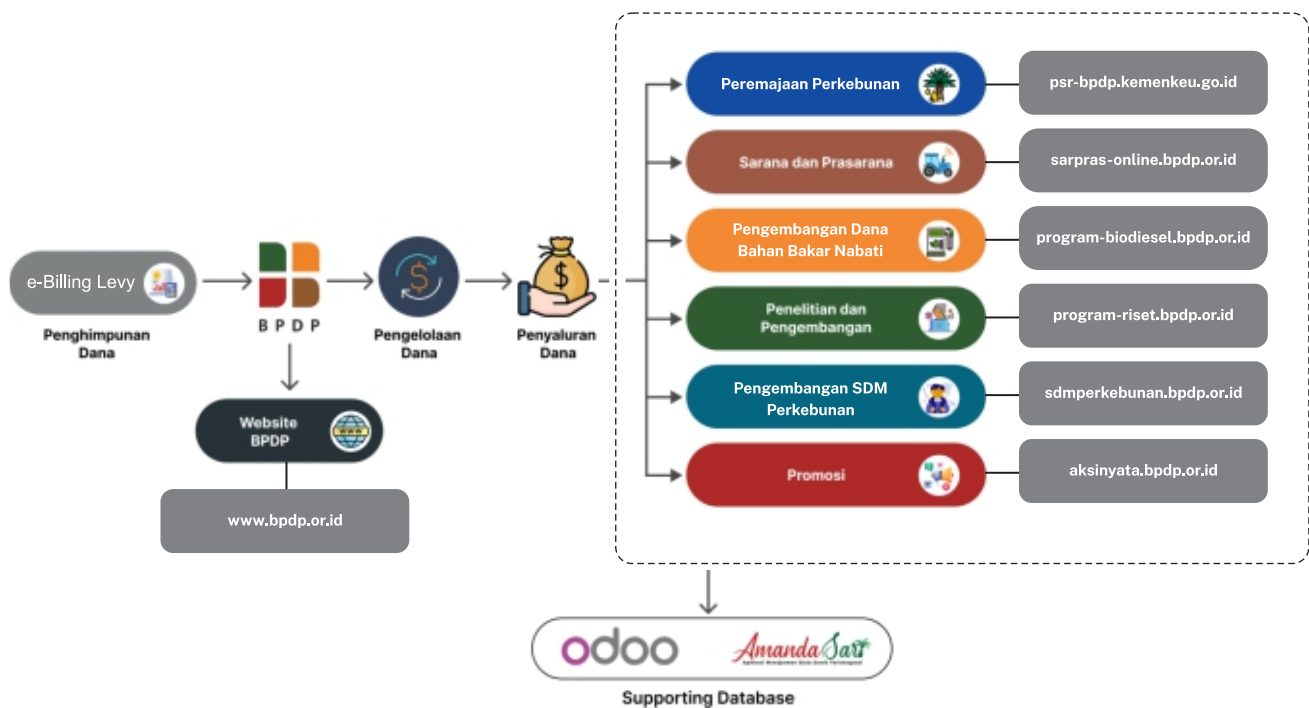
### Information Technology Roadmap

The BPDP Information Technology Development Roadmap 2025–2029 was developed as the strategic direction for organizational digital transformation in supporting transparent, effective, efficient, and sustainable plantation fund management. The roadmap serves as a guideline for structured, integrated, and adaptive information technology development aligned with technological advancements and organizational needs.

One of the primary objectives of BPDP Information Technology development is improving IT service quality, strengthening information security, maintaining and enhancing information systems, and integrating digital services that support organizational business processes. Development priorities include strengthening IT infrastructure, integrating information systems and service data, implementing cybersecurity measures, developing digital service portals, and utilizing emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI) and WebGIS-based systems.

Dalam implementasinya, BPDP akan terus melakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola TI, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, efisiensi operasional, serta sinergi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan seperti Direktorat Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) guna mendukung transformasi digital organisasi secara optimal. Gambar Model Sistem Pelayanan dari Divisi Pengelolaan Sistem Informasi BPDP Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

In its implementation, BPDP will continue conducting ongoing development and evaluation by adhering to principles of IT governance, system interoperability, information security, operational efficiency, and synergy with related units within the Ministry of Finance, including Directorate of Treasury Information System and Technology (Dir. SITP) and Financial Information and Intelligence Technology Agency (often referred to as BaTii), to support optimal organizational digital transformation.



### Proses sistem dan aplikasi yang dikelola oleh BPDP System and Application Management Processes by BPDP

## Penerimaan BLU

Sistem ALEXIA (Aplikasi Levy Ekspor Terintegrasi AI) adalah sistem penerimaan BLU dari ALEXIA yang telah terintegrasi dengan Sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan juga untuk proses pembayarannya telah terkoneksi secara *host-to-host* dengan Bank Mitra (Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI).

## Sistem Penyaluran Produk Hulu

- Program Peremajaan Sawit Rakyat
- Program Sarana dan Prasarana

## Sistem Penyaluran Produk Hilir

- Program SDM Perkebunan
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biodiesel)
- Program Pangan dan Hilirisasi
- Program Riset
- Program Kerjasama / Promosi

## Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi BPDP 2025.

- Telah mengembangkan sistem informasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dengan teknologi *Large Language Model* (LLM) v1. Versi awal ini dikembangkan untuk mendukung kebutuhan ekstraksi, pencarian, dan pengolahan informasi dari dokumen secara otomatis yang digunakan pada aplikasi ALEXIA.
- Telah melakukan upgrade dan mengimplementasikan sistem aplikasi e-Billing Levy dengan nama baru aplikasi menjadi ALEXIA (Aplikasi Levy Ekspor Terintegrasi AI) dengan mengintegrasikan dengan sistem informasi *Artificial Intelligence* (AI), penyempurnaan Modul Rekonsiliasi, Analisis dan Validasi, Permohonan Restitusi, dan Monitoring Kurang Bayar.

## Public Service Agency Revenue System

The ALEXIA System (AI-Integrated Export Levy Application) is the Public Service Agency revenue system that has been integrated with the systems of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) of the Ministry of Finance. Its payment process is also connected *host-to-host* with partner banks, including Bank Mandiri, Bank BRI, and Bank BNI.

## Upstream Distribution Program Systems

- Smallholder Palm Oil Replanting Program
- Plantation Facilities and Infrastructure Program

## Downstream Distribution Program Systems

- Plantation Human Resource Development Program
- Biofuel Development Program (Biodiesel)
- Food and Downstream Industry Program
- Research Program
- Partnership and Promotion Program

## Achievements in Information Systems and Information Technology Development in 2025.

- Artificial Intelligence (AI) Development. BPDP developed an Artificial Intelligence (AI)-based information system utilizing Large Language Model (LLM) v1 technology. This initial version was designed to support automated extraction, search, and information processing from documents and is currently utilized within the ALEXIA application.
- ALEXIA System Enhancement. BPDP upgraded and implemented the e-Billing Levy application under the new name ALEXIA (AI-Integrated Export Levy Application). The enhancement included integration with Artificial Intelligence systems, improvements to reconciliation modules, analysis and validation features, restitution request modules, and underpayment monitoring systems.

- c. Telah mengimplementasikan *Enterprise Resource Planning (ERP) ODOO* di lingkungan kerja BPDP. Adapun modul yang telah digunakan adalah Migrasi sistem BDPK ke BPDP, Modul Audit, dsb dengan menggunakan sistem ERP ini diharapkan agar dapat data-data dapat saling terintegrasi.
- d. Penyempurnaan guna memperbaiki sistem aplikasi Program Riset diwujudkan melalui penambahan fitur pelaporan dan pencatatan belanja yang wajib diisi oleh penerima dana riset. Fitur tersebut mendukung peningkatan monitoring, akuntabilitas, serta pengawasan penggunaan dana riset secara lebih sistematis dan terdokumentasi.
- c. ERP ODOO Implementation . BPDP implemented the Enterprise Resource Planning (ERP) ODOO system across the organization. Modules currently in use include the migration system from BDPK to BPDP, audit modules, and other integrated operational modules. The implementation of ERP is intended to strengthen data integration and organizational process efficiency.
- d. Enhancements to the Research Program application system were carried out through the introduction of mandatory reporting and expenditure recording features for research grant recipients. These features support improved monitoring, accountability, and oversight of research fund utilization through a more systematic and well-documented process.



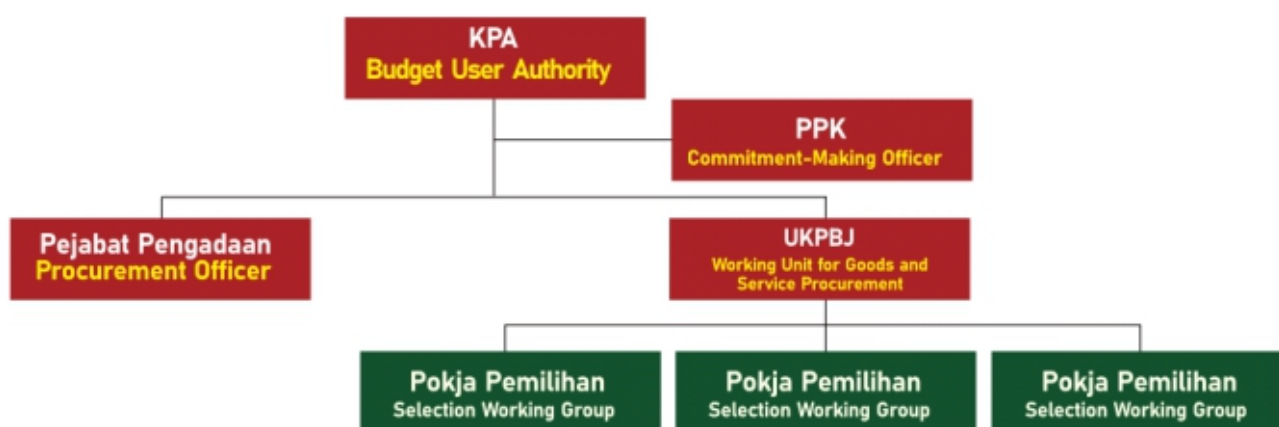
## 5.5 Unit Pengadaan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, BPDP senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip *good governance* senantiasa diimplementasikan dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa, guna menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang sehat, fleksibel, cepat, efektif dan efisien agar mampu memaksimalkan segala momentum dan peluang bisnis yang ada.

### Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa, BPDP mengacu pada Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 13/DPKS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan dan tata cara Pengadaan Barang / Jasa di lingkup BPDP.

### Struktur Perangkat Pengadaan Barang/Jasa



## 5.5 Procurement Unit

In carrying out all its activities, BPDP always strives to implement Good Governance, including in the process of procuring goods and services. The principle of good governance is always implemented in the entire process of procurement, in order to ensure a healthy, flexible, fast, effective, and efficient procurement process in order to be able to maximize all existing business momentum and opportunities.

### Policy on the Procurement of Goods/Services

Internal policies related to the Procurement of Goods and/or Services of BPDP refer to the Regulation of the President Director of BPDPKS No. 13/DPKS/2021 regarding Guidelines for the Procurement of Goods/ Services at the Public Service Agency of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. This regulation regulates the provisions and procedures for the Procurement of Goods/Services within the scope of BPDP.

### Procurement Organizational Structure.

### Tugas dan Kewenangan UKPBJ BPDP

- a. Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai Barang, jasa lainnya, jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas 50 juta s.d. paling tinggi 500 juta rupiah;
- b. Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Penunjukan Langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas 50 juta rupiah;
- c. Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Tender untuk paket pekerjaan barang, jasa lainnya dan/atau pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas 500 juta rupiah
- d. Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Seleksi untuk paket pekerjaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas 500 juta.
- e. Menetapkan Penyedia untuk metode pemilihan :
  1. Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi/jasa konsultasi dengan nilai diatas 50 juta s.d. 10 miliar rupiah.
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi/jasa konsultasi dengan nilai diatas 50 juta s.d. 10 miliar rupiah.

### Prinsip Pengadaan Barang/Jasa BPDP

Pengadaan Barang dan Jasa di BPDP dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- Efisien dan Efektif
- Transparan dan Terbuka
- Bersaing, Adil dan Akuntabel

### Duties and Authorities of UKPBJ

- a. Implement provider selection mechanism through Direct Procurement method for work packages of Other goods, services, Consultation and/or construction valued above 50 million up to a maximum of 500 million Rupiah;
- b. Implement provider selection mechanism through Direct Appointment method for work packages of Other goods, services, Consultation and/or construction valued above 50 million;
- c. Implement provider selection mechanism through the Tender method for work packages of goods, other services, and/or Construction with values above 500 million Rupiah;
- d. Implement provider selection mechanism through the Tender method for work packages of Consultation with values above 500 million Rupiah;
- e. Establish Provider for the selection method of:
  1. Tender/Selection/Direct Appointment/Direct Procurement for work packages of Goods/Other Services/Construction/ with values above 50 million up to 50 billion Rupiah.
  2. Selection/Direct Appointment/Direct Procurement for work packages of Consultation services with values above 50 million up to 10 billion Rupiah.

### Principles of Procurement of Goods/Services BPDP

The principles of goods and services procurement at BPDP are as follows:

- Eficient and Effective
- Transparent and Open
- Competitive, Fair, and Accountable

## Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa BPDP

### 1. Pemilihan Penyedia:

- Metode Pengadaan Langsung
- Metode Penunjukan Langsung
- Metode Tender/Seleksi
- Metode Epurchasing

### 2. Swakelola:

- Swakelola Type I
- Metode Type II
- Metode Type III
- Metode Type IV

## Sistem Manajemen Mutu

Sebagai upaya dalam menjamin kesesuaian mutu dan kualitas dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan para stakeholder, BPDP menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

## Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BPDP

Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan
2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
3. Pelaksanaan Kontrak
4. Serah Terima Hasil Pekerjaan
5. Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan

## BPDP Goods/Services Procurement Mechanism

The mechanism for the procurement of BPDP goods/ services consists of:

### 1. Selection of Providers:

- Direct Procurement Method
- Direct Appointment Method
- Tender/Selection Method
- E-purchasing Method

### 2. Self-management:

- Self-management Type I
- Type II Method
- Type III Method
- Type IV Method

## Quality Management System

BPDP strives to maintain the quality of its business processes through the fulfilment of quality conformity as well as the quality of processes and products to the needs of stakeholders. The implementation of BPDP quality management system refers to the Financial Management Pattern of the Public Service Agency using the Minimum Service Standards in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 80/PMK.05/2016 regarding Minimum Service Standards for Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

## Goods and Services Procurement Activities

The process of procurement of goods/services is carried out through the following stages:

1. Procurement Preparation
2. Selecting Provider
3. Contract Execution
4. Handover of Work Results
5. Work Payment Completion

Selama tahun 2025, Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang dan jasa yang sudah terselesaikan dalam memenuhi kebutuhan operasi BPDP Adalah sebagai berikut:

#### Jumlah paket pengadaan barang dan jasa

Metode Pelelangan Direct Procurement	Jumlah Amount
Penunjukan Langsung Direct Appointment	147 Paket
Tender/Seleksi Tender/Selection	17 Paket
E-Purchasing	119 Paket
Pembelian Langsung Direct Buying	231 Paket

SPM merupakan pedoman BPDP dalam memberikan layanan masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan dana dan pengembangan kelapa sawit, Kakao, Kelapa berkelanjutan yang dilakukan BPDP. Dalam pelaksanaan SPM Dewan Pengawas melakukan monitoring terhadap pengelolaan BPDP yang dilakukan oleh Direksi. Kebijakan terkait Sistem Pelayanan Minimum BPDP, meliputi:

1. Pengelolaan Dana;
2. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
4. Penyaluran Dana Promosi Perkebunan;
5. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
6. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
7. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
8. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

During 2025, the total number of packages for procurement of goods and services that have been completed in meeting the operational needs of BPDP are as follows:

#### Number of packages for procurement of goods and services

SPM is BPDP guideline in providing community services for the implementation of fund management and sustainable palm oil, Kakao, and coconut development. In implementing SPM, the Supervisory Board monitors the management of BPDP carried out by the Board of Directors. Policies related to BPDP Minimum Service System, include:

1. Fund Management;
2. Human Resources Development Funds Disbursement;
3. Research and Development Fund Disbursements;
4. Plantation Promotion Funds Disbursements;
5. Plantation Rejuvenation Funds Disbursement;
6. Plantation Facilities and Infrastructure Funds Disbursement;
7. Biodiesel Financing Funds Disbursement; and
8. Implementation of General Affairs and Household Affairs.

### Tujuan Sistem Pelayanan Minimum BPDP, antara lain:

- Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan dana perkebunan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan perkebunan berkelanjutan; dan
- Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan Perkebunan berkelanjutan.

### Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan serta pengembangan BPDP telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pemantauan yang digunakan BPDP mencakup kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan. Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- Membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
- BLU BPDP yang berkoordinasi dengan unit/lembaga terkait;
- Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPDP, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BPDP.

### The objectives of BPDP Minimum Service System include:

- Ensuring the procedures for the implementation of BPDP management funds in a transparent and accountable manner in accordance with the provisions of the legislation;
- Ensuring the fulfillment of service quality in the implementation of sustainable development fund management; and
- Ensuring the consistency of planning, implementation, monitoring, and evaluation of the implementation of sustainable development fund management

### Monitoring and Evaluation

In order to ensure that the implementation of services and development of BPDP are in accordance with the established standards, monitoring is carried out. The monitoring method includes field visits, documentation studies, and meetings with service providers and recipients. The monitoring includes:

- Comparing the services provided with the established MSS indicators;
- BLU BPDP in coordination with related units/institutions;
- Monitoring is carried out periodically.

Afterward, periodic evaluations are conducted to see the achievements and impacts of the programs carried out based on the results of monitoring in order to improve the performance of BPDP. The evaluation was conducted by means of field visits, interviews, observations, and documentation studies. The results of this evaluation are used as input in order to improve the performance of BPDP services.

## 5.6 Keterbukaan Informasi Pengelolaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat pengelolaan layanan informasi publik melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengelolaan informasi publik menjadi wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

Dalam pelaksanaannya, BPDP sebagai Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan berada dalam struktur PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai PPID Tingkat II. Posisi tersebut memperkuat peran BPDP dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui koordinasi yang terintegrasi dengan PPID Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sepanjang tahun 2025, BPDP terus mengedepankan prinsip pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan platform digital dan sistem layanan informasi publik yang terhubung dengan PPID Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui situs resmi PPID Kementerian Keuangan maupun kanal layanan informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, pengajuan permohonan informasi juga dapat dilakukan secara langsung, melalui surat elektronik, maupun aplikasi layanan PPID berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan akses dan kecepatan pelayanan.

## 5.6 Information Disclosure Public Information Management

As part of its commitment to transparent, accountable, and responsive governance, BPDP continued to strengthen public information services through the optimization of the Information and Documentation Management Officer (PPID) function. Public information management represents the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, which guarantees the public's right to access information in a timely, accurate, and accessible manner.

As a Public Service Agency under the Ministry of Finance, BPDP operates within the Directorate General of Treasury's PPID structure as a Tier II PPID. This position further strengthens BPDP's role in supporting public information disclosure through integrated coordination with the Ministry of Finance and the Directorate General of Treasury PPID network.

Throughout 2025, BPDP continued to uphold accessible public information services through digital platforms and public information systems integrated with the Ministry of Finance's PPID services. Public information can be accessed through the official Ministry of Finance PPID website as well as information service channels managed by the Directorate General of Treasury. In addition, requests for public information can be submitted directly, via electronic mail, or through digital PPID service applications designed to improve accessibility and service responsiveness.

Dalam mendukung kualitas layanan informasi publik, BPDP turut melaksanakan monitoring dan pemutakhiran data secara berkala pada aplikasi PPID, serta memperkuat koordinasi dengan unit pengelola layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BPDP juga aktif mengikuti berbagai kegiatan pengelolaan layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan tata kelola layanan informasi publik.

Selama tahun 2025, BPDP tidak menerima permohonan informasi publik maupun pengajuan sengketa informasi publik. Kondisi tersebut mencerminkan tersedianya informasi yang cukup memadai melalui kanal komunikasi publik yang telah berjalan, sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan layanan informasi publik yang dilakukan secara proaktif dan terbuka.

Meskipun demikian, BPDP terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan layanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain perlunya peningkatan pemahaman petugas PPID terkait pelayanan informasi publik dan pengoperasian aplikasi SI-PPID Generasi 2, serta kebutuhan penguatan sistem database informasi publik yang lebih terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut atas tantangan tersebut, BPDP berkomitmen untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan forum koordinasi, serta meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam pengelolaan informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan informasi publik yang semakin adaptif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

To support the quality of public information services, BPDP conducted periodic monitoring and data updates within the PPID application while strengthening coordination with information service management units within the Directorate General of Treasury. BPDP also actively participated in various public information management activities organized by the Directorate General of Treasury Headquarters as part of efforts to strengthen institutional capacity and improve public information governance.

During 2025, no public information requests or public information dispute submissions were received. This condition reflects the availability of adequate information through existing public communication channels and demonstrates the effectiveness of proactive and transparent public information management.

Nevertheless, BPDP continued to evaluate its public information services to further improve service quality in the future. Several challenges identified include the need to enhance PPID officers' understanding of public information services and the operation of the SI-PPID Generation 2 application, as well as the need to strengthen a more integrated public information database system.

In response to these challenges, BPDP remains committed to strengthening human resource capacity through socialization programs, technical guidance, and coordination forums, while also improving synergy among work units in managing public information services. These efforts are expected to further strengthen adaptive, transparent, and responsive public information services that effectively meet public needs.

## Pencapaian Support Center bersama Layanan Hai DJPb

Sejak tahun 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah terintegrasi dalam layanan *contact center* HAI-DJPb sebagai tindak lanjut Nota Dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-1264/SJ.6/2022 mengenai penggabungan pengelolaan *contact center* pada BLU lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Integrasi ini merupakan bagian dari upaya BPDP dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat responsivitas informasi, serta menghadirkan layanan konsultasi yang lebih terstandar dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Layanan *contact center* BPDP melayani berbagai kelompok stakeholder yang memiliki karakteristik dan kebutuhan layanan yang beragam. Pengguna layanan tersebut meliputi penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum untuk layanan Direktorat KUKMR; perbankan untuk layanan Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana; eksportir, Direktorat Jenderal Perkebunan, serta koperasi atau kelompok penerima dana PSR untuk layanan Direktorat Penghimpunan Dana; Kementerian ESDM, periset kelapa sawit, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), Pertamina, dan penerima beasiswa untuk layanan Direktorat Penyaluran Dana; serta media, lembaga perhimpunan kelapa sawit, dan pelaku usaha kecil dan koperasi penerima layanan Direktorat Kemitraan.

Dalam pelaksanaannya, layanan *contact center* BPDP mencakup berbagai kategori layanan, baik layanan umum maupun layanan teknis sektoral. Layanan umum meliputi informasi pengadaan barang dan jasa, kebijakan sumber daya manusia, legal drafting perjanjian, konfirmasi pencairan dana, hingga pelaksanaan audit. Selain itu, BPDP juga menyediakan layanan pengelolaan dana seperti layanan rencana bisnis tahunan, investasi, dan amandahari.

## Support Center Achievement Through HAI-DJPb Services

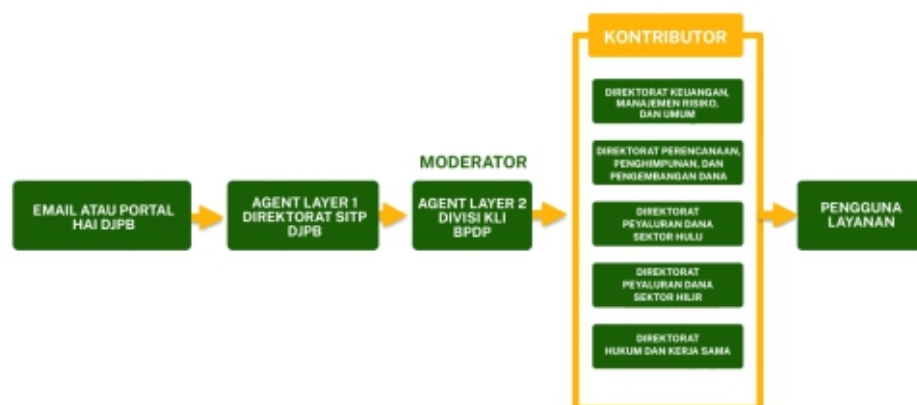
Since 2022, BPDP has been integrated into the HAI-DJPb *contact center* service as a follow-up to the Memorandum of the Head of the Bureau of Communication and Information Services of the Ministry of Finance Secretariat General Number ND-1264/SJ.6/2022 regarding the integration of *contact center* management within Public Service Agencies under the Directorate General of Treasury. This integration forms part of BPDP's efforts to improve public service quality, strengthen information responsiveness, and provide more standardized and accessible consultation services for all stakeholders.

The BPDP *contact center* serves various stakeholder groups with diverse service characteristics and requirements. Service users include suppliers and the general public for MSME and Cooperative Services Directorate programs; banking institutions for Planning and Fund Management Directorate services; exporters, the Directorate General of Plantations, cooperatives, and farmer groups participating in the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR) for Fund Collection Directorate services; the Ministry of Energy and Mineral Resources, palm oil researchers, Biofuel Business Entities (BUBBN), Pertamina, and scholarship recipients for Fund Distribution Directorate services; as well as media institutions, palm oil associations, and MSMEs and cooperatives under Partnership Directorate services.

The BPDP *contact center* provides both general and sector-specific technical services. General services include procurement information, human resource policies, legal drafting for agreements, fund disbursement confirmation, and audit-related inquiries. In addition, BPDP also provides fund management services, including annual business plan services, investment services, and amandahari services.

Pada aspek layanan operasional program, contact center BPDP melayani konfirmasi restitusi kelebihan bayar eksportir dan layanan aplikasi e-billing levy, layanan penerima dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seperti penyelesaian rekomtek PSR dan sarana prasarana, layanan kebijakan dan penyelesaian proposal riset, layanan beasiswa termasuk pembayaran mahasiswa penerima beasiswa, serta layanan terkait pembayaran selisih bayar biodiesel. Di bidang media dan kemitraan, *contact center* BPDP juga melayani konfirmasi penyelesaian pengajuan proposal kemitraan.

Seluruh layanan konsultasi tersebut dapat diakses melalui platform HAI-DJPb yang tersedia melalui internet, smartphone, e-mail, dan layanan telepon pada line 14090 setiap hari kerja pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Kehadiran sistem layanan terpadu ini memberikan kemudahan akses informasi dan konsultasi bagi *stakeholder* BPDP di berbagai wilayah Indonesia.



Sepanjang tahun 2025, BPDP mencatat sebanyak 160 tiket layanan masuk melalui *contact center* HAI-DJPb. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan stakeholder terhadap layanan informasi, konsultasi, dan penyelesaian administrasi terkait program-program BPDP. Melalui penguatan sistem layanan *contact center* yang terintegrasi, BPDP terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

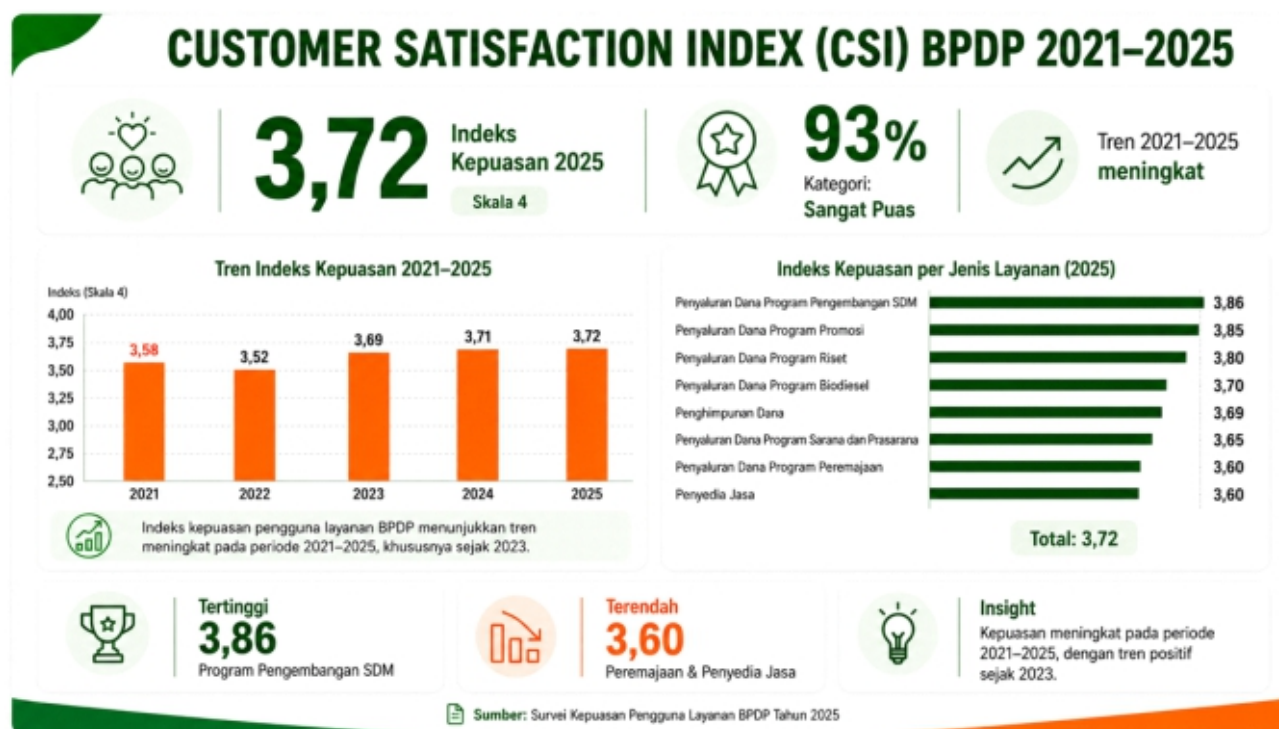
For operational program services, the contact center handles confirmation of export levy overpayment restitution and e-billing levy application services; services for recipients of the Smallholder Palm Oil Replanting (PSR) program, including recommendation completion and plantation facilities and infrastructure support; research proposal policy and completion services; scholarship services including scholarship disbursement confirmation; and biodiesel compensation payment services. In the media and partnership sector, the BPDP contact center also facilitates confirmation of partnership proposal submissions.

All consultation services are accessible through the HAI-DJPb platform via internet, smartphone, e-mail, and telephone services through line 14090 during working days from 08.00 to 16.00 WIB. The integrated service system provides easier access to information and consultation services for BPDP stakeholders across Indonesia.

Throughout 2025, BPDP recorded a total of 160 incoming service tickets through the HAI-DJPb contact center. This figure reflects the high demand from stakeholders for information services, consultations, and administrative support related to BPDP programs. Through the strengthening of its integrated contact center services, BPDP remains committed to improving public service quality that is responsive, transparent, accountable, and stakeholder-oriented.

## 5.7 Survei Kepuasan Pengguna Layanan

## 5.7 Service User Satisfaction Survey



Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, BPDP melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan BPDP, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan strategi perbaikan layanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Survei dilakukan terhadap pengguna layanan yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyedia jasa melalui metode kuesioner online.

Sepanjang periode 2021–2025, indeks kepuasan pengguna layanan BPDP menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021, indeks kepuasan tercatat sebesar 3,58, kemudian sempat menurun menjadi 3,52 pada 2022. Setelah itu, indeks kepuasan terus meningkat secara konsisten menjadi 3,69 pada 2023, 3,71 pada 2024, dan mencapai 3,72 dari skala 4 pada 2025.

As part of its commitment to improving governance quality and public services, BPDP conducted the 2025 User Satisfaction Survey. The survey aimed to measure stakeholder satisfaction with the quality of BPDP services while also serving as an evaluation tool for developing more responsive, transparent, and stakeholder-oriented service improvement strategies. The survey was conducted through online questionnaires targeting service users across fund collection, fund distribution, and service provider activities.

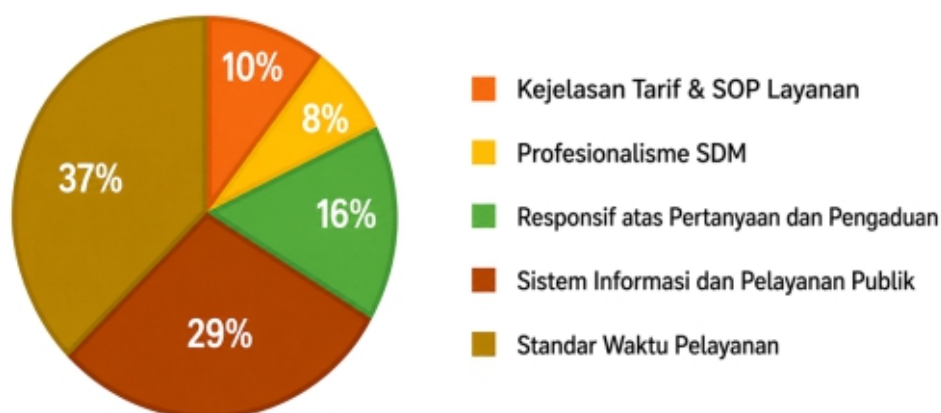
During the 2021–2025 period, the user satisfaction index demonstrated a positive trend. In 2021, the satisfaction index stood at 3.58, before slightly declining to 3.52 in 2022. Subsequently, the index consistently improved to 3.69 in 2023, 3.71 in 2024, and reached 3.72 out of a scale of 4 in 2025.

Capaian tahun 2025 tersebut setara dengan 93% dan berada pada kategori sangat puas, yang menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan menilai kualitas pelayanan BPDP sudah sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan BPDP. Nilai ini juga melampaui target IKU Direktur Utama yang ditetapkan sebesar 3,4, sehingga mencerminkan bahwa kualitas layanan BPDP telah berada pada kategori sangat baik dan mampu memenuhi harapan pengguna layanan.

Hasil ini mencerminkan komitmen BPDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. BPDP akan terus memperkuat layanan yang cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

The 2025 achievement was equivalent to 93% and categorized as “very satisfied,” indicating that, in general, service users considered the quality of BPDP services to be highly satisfactory. The result also exceeded the President Director Key Performance Indicator (KPI) target of 3.4, reflecting that BPDP service quality has reached an excellent standard and successfully met stakeholder expectations.

This achievement reflects the commitment to continuously improving service quality. BPDP will continue strengthening services that are responsive, transparent, efficient, and oriented toward stakeholder needs.



Berdasarkan hasil analisis, aspek yang menjadi prioritas perbaikan meliputi standar waktu pelayanan sebesar 37,25%, sistem informasi dan pelayanan publik sebesar 29,41%, responsivitas terhadap pertanyaan dan pengaduan sebesar 15,69%, kejelasan tarif dan standar operasional prosedur (SOP) layanan sebesar 9,80%, serta profesionalisme sumber daya manusia sebesar 7,84%.

Based on the survey analysis, the key areas identified for improvement include service time standards at 37.25%, information systems and public service quality at 29.41%, responsiveness to inquiries and complaints at 15.69%, clarity of service fees and standard operating procedures (SOPs) at 9.80%, and human resource professionalism at 7.84%.

Hasil tersebut menjadi masukan penting bagi BPDP dalam memperkuat ketepatan waktu layanan, konsistensi prosedur, transparansi informasi, serta efektivitas kanal pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Survei Kepuasan Pengguna Layanan ini juga menjadi landasan bagi BPDP untuk terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan ke depan diarahkan pada peningkatan efektivitas sistem informasi, percepatan standar waktu pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, penyempurnaan sosialisasi prosedur layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Melalui langkah-langkah tersebut, BPDP diharapkan mampu menghadirkan layanan yang semakin cepat, akurat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

These findings provide important insights for strengthening service timeliness, procedural consistency, information transparency, and the effectiveness of service channels for stakeholders. The User Satisfaction Survey also serves as a foundation for continuously enhancing service quality across the organization.

Future improvement initiatives will focus on enhancing the effectiveness of information systems, accelerating service delivery standards, strengthening complaint management mechanisms, improving the dissemination of service procedures, and enhancing human resource competencies. Through these efforts, services are expected to become faster, more accurate, transparent, and increasingly adaptive to stakeholder needs.



## 5.8 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil Pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029 juga diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan nasional. Implementasi PUG dan Inklusi sosial pada Kementerian Keuangan ditujukan untuk mendorong perwujudan kesetaraan dalam pembangunan nasional melalui pengelolaan APBN yang responsif gender dan inklusi. BPDP sebagai salah satu BLU dibawah Kementerian Keuangan mendapat 2 (dua) *mandatory* kegiatan PUG yaitu (i) upaya peningkatan penerima Beasiswa Sawit dari Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui diseminasi program Beasiswa Sawit dan (ii) diseminasi hasil *Grant* Riset Sawit: Pengaruh Stress Peran, Emosi Negatif, dan Kecerdasan Emosi dalam Meminimalisir Penyimpangan Kerja Pada Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit.

## 5.8 Gender Mainstreaming

In accordance with Presidential Regulation Number 12 of 2025 concerning the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), efforts to enhance gender equality are implemented through the strategies of Gender Mainstreaming (GM) and Social Inclusion by providing equal opportunities for women and men, youth, children, persons with disabilities, the elderly, indigenous communities, and other vulnerable groups. These opportunities are intended to improve access to resources, encourage active and meaningful participation in expressing aspirations and needs, and involve all groups in decision-making processes so they may benefit from development outcomes. The 2025–2029 RPJMN also mandates all ministries and government institutions to strengthen the governance and institutionalization of Gender Mainstreaming in national development. The implementation of Gender Mainstreaming and Social Inclusion within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia aims to promote equality in national development through gender-responsive and inclusive state budget management. As one of the Public Service Agencies under the Ministry of Finance, BPDP was assigned two mandatory Gender Mainstreaming activities, namely:

- Efforts to Increase Palm Oil Scholarship Recipients from 3T Regions through the Dissemination of the Palm Oil Scholarship Program.
- Dissemination of Palm Oil Research Grant Results: The Influence of Role Stress, Negative Emotions, and Emotional Intelligence in Minimizing Workplace Deviance among Oil Palm Plantation Workers.

### Upaya Peningkatan Penerima Beasiswa Sawit dari Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui Diseminasi Program Beasiswa Sawit

Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 28 Oktober 2025. Meskipun NTT bukan merupakan wilayah sentra perkebunan kelapa sawit, daerah ini tetap menjadi perhatian strategis BPDP, selain karena termasuk dalam kategori Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), juga karena berperan sebagai salah satu daerah penyumbang tenaga kerja bagi sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua. Melalui program Pengembangan SDM Perkebunan, BPDP hingga tahun 2025 sudah menyalurkan Beasiswa Sawit kepada 9.265 mahasiswa. Beasiswa ini terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk anak petani, karyawan, pelaku usaha, dan ASN yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Tujuan program Beasiswa Sawit adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapa sawit dan mencetak profesional yang siap kerja. Kegiatan Sosialisasi Beasiswa Sawit ini bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang Beasiswa Sawit di Daerah 3T dengan harapan di masa yang akan datang terjadi peningkatan peserta penerima beasiswa dari Daerah 3T khususnya dari NTT.

Kegiatan dihadiri oleh 150 siswa dari sekolah lingkup Manggarai Barat dan 50 Guru perwakilan sekolah dari Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Melalui program Beasiswa Sawit, BPDP berkomitmen memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak pekerja sawit dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk NTT untuk menempuh pendidikan tinggi dengan dukungan penuh mulai dari biaya transportasi, uang buku, hingga kebutuhan selama masa belajar. Diharapkan program ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja sawit di seluruh Indonesia. Salah satu indikator tercapainya tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah peningkatan hasil *post-test* sebesar 93,72 persen dibandingkan hasil *pre-test* sebesar 62,80 persen yang diisi oleh siswa dan guru yang hadir. Selain itu, penyebaran informasi program Beasiswa Sawit dilakukan dengan publikasi melalui sepuluh media nasional dan lokal.

### Increasing Palm Oil Scholarship Recipients from 3T Regions through the Palm Oil Scholarship Program Dissemination

This activity was held at the Office of the Regent of West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, on 28 October 2025. Although East Nusa Tenggara is not a major oil palm plantation area, the region remains a strategic focus for BPDP due to its status as a 3T Region (Frontier, Outermost, and Underdeveloped Area) and its contribution as a source of labor for the palm oil plantation sector, particularly in Kalimantan and Papua. Through the Plantation Human Resources Development Program, BPDP had distributed Palm Oil Scholarships to 9,265 students as of 2025. The scholarship program is open to various groups, including the children of farmers, employees, business actors, and civil servants working in the oil palm plantation sector. The program aims to improve the quality of human resources in the palm oil industry and develop work-ready professionals.

The Palm Oil Scholarship dissemination activity aimed to expand public awareness of the scholarship program in 3T Regions, with the expectation of increasing the number of scholarship recipients from these areas, particularly from East Nusa Tenggara, in the future. The activity was attended by 150 students from schools across West Manggarai and 50 teacher representatives from West Manggarai and East Manggarai Regency. Through the Palm Oil Scholarship Program, BPDP is committed to providing broader access to higher education for the children of palm oil workers from various regions in Indonesia, including East Nusa Tenggara, through comprehensive support covering transportation costs, book allowances, and living expenses during the study period. The program is expected to contribute to improving the welfare of palm oil worker families across Indonesia.

One indicator of the activity's effectiveness was the increase in post-test results to 93.72%, compared to pre-test results of 62.80% among participating students and teachers. In addition, information on the Palm Oil Scholarship Program was disseminated through publications in ten national and local media outlets.

### **Diseminasi Hasil Grant Riset Sawit: Pengaruh Stress Peran, Emosi Negatif, dan Kecerdasan Emosi dalam Meminimalisir Penyimpangan Kerja pada Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait pentingnya aspek kesehatan mental dan kesehatan reproduksi pekerja dalam lingkungan industri kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip inklusi sosial dan kesetaraan gender. Kegiatan ini dihadiri peserta dari:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- c. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI);
- f. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
- g. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI);
- h. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI);
- i. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI);
- j. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI);
- k. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN);
- l. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI);
- m. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO);
- n. Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR);
- o. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (APKASINDO Perjuangan);
- p. Asosiasi Sawitku Masa Depan (SAMADE);
- q. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
- r. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI).

### **Dissemination of Palm Oil Research Grant Results: The Influence of Role Stress, Negative Emotions, and Emotional Intelligence in Minimizing Workplace Deviance among Oil Palm Plantation Workers**

This activity aimed to provide information and enhance understanding among oil palm plantation companies regarding the importance of workers' mental and reproductive health within the palm oil industry, as part of efforts to promote social inclusion and gender equality principles. The activity was attended by participants from:

- a. Bureau of Planning and Finance, Secretariat General, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
- b. Secretariat of the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
- c. Directorate General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia
- d. Deputy for Gender Equality, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia
- e. Jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia
- f. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- g. Dewan Minyak Sawit Indonesia
- h. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
- i. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
- j. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia
- k. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia
- l. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia
- m. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
- n. Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia
- o. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan
- p. Asosiasi Sawitku Masa Depan
- q. Serikat Petani Kelapa Sawit
- r. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia

Melalui kegiatan ini, BPDP menghadirkan dua dosen dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai peneliti dari Grant Riset Sawit, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI dan *Head of Human Capital* Wilmar Internasional. Riset yang disampaikan dalam diseminasi ini bertujuan untuk menganalisis risiko status gizi dan kesehatan reproduksi pekerja perkebunan kelapa sawit sebagai faktor penting yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya risiko paparan pestisida, masalah gizi, serta rendahnya pengetahuan kesehatan pada pekerja sawit yang berpotensi menurunkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Simpulan dan saran hasil riset antara lain:

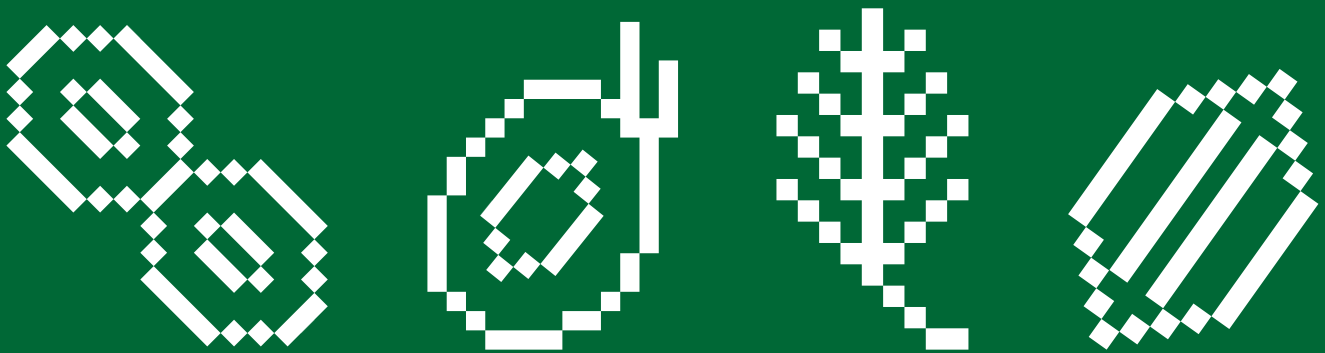
- a. Penyimpangan kerja merupakan reaksi emosi negatif atas stresor kerja.
- b. Individu yang cerdas emosional sekalipun tidak berdaya untuk meregulasi emosi atau melakukan mekanisme koping atas stresor kerja.
- c. Intervensi dan pendampingan psikologis perlu untuk dipertimbangkan guna menjaga SDM Industri sawit yang sehat secara mental dan produktif berkelanjutan.
- d. Rekomendasi edukasi kepada karyawan kantor dan kebun serta pengawas.
- e. Materi edukasi tentang APD untuk meningkatkan kedisiplinan penggunaan APD dan kesehatan kerja serta asupan zat gizi makro dan mikro yang seimbang (membuatkan media *booklet*).
- f. Rekomendasi pelatihan sistem manajemen K3 dan pengelolaan gizi tenaga kerja di tingkat manajerial

Through this activity, BPDP invited two lecturers from Universitas Lambung Mangkurat as researchers under the Palm Oil Research Grant program, along with the Head of Human Capital Development of GAPKI and the Head of Human Capital of Wilmar International. The research presented during the dissemination session aimed to analyze the nutritional and reproductive health risks faced by oil palm plantation workers, as these factors are considered critical determinants of workforce productivity and welfare. The study was conducted in response to the high exposure risks to pesticides, nutritional challenges, and limited health awareness among plantation workers, which may adversely affect productivity and economic well-being. The research concluded with several key findings and recommendations, including:

- a. Workplace misconduct can result from negative emotional responses to work-related stress.
- b. Even emotionally intelligent individuals may face difficulties in managing emotions and coping with workplace stressors.
- c. Psychological support and intervention are important to maintain a mentally healthy and productive palm oil workforce.
- d. Educational programs are recommended for office and plantation employees, including supervisors.
- e. Educational materials on PPE usage, workplace health, and balanced nutrition intake are recommended, including the development of booklet media.
- f. Managerial training on Occupational Health and Safety (OHS) systems and workforce nutrition management is recommended.

# Laporan Keuangan

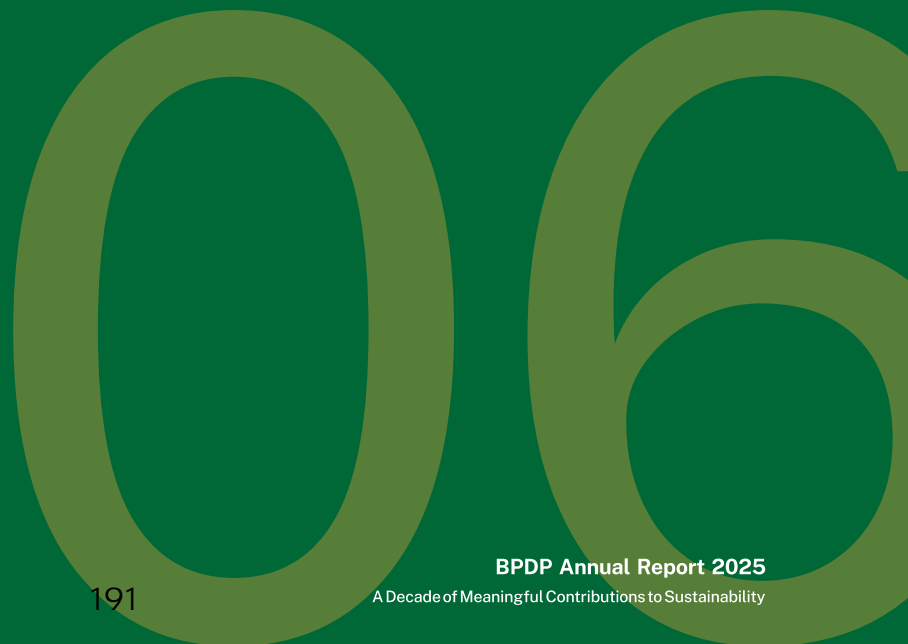
Laporan Keuangan BPDP Tahun 2025 telah diaudit oleh auditor external guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan penggunaan dana BPDP.



## Financial Statements

BPDP's 2025 Financial Statements have been audited by a Public Accounting Firm as part of the institution's commitment to ensuring accountability, transparency, and prudent management of BPDP funds.

# 06



## 6.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp33.237.094.153.758,00 atau mencapai 132,16 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp25.148.875.848.000,00. Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp49.822.564.405.090,00 atau mencapai 89,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp55.392.103.313.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp49.757.823.256.051,00 atau 90,00 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp64.741.149.039,00 atau 60,62 persen dari anggarannya.

## 6.1 Budget Realization Report

The Budget Realization Report presents a comparison between the budget and its realization, covering Revenue and Expenditure (LRA) for the period 1 January to 31 December 2025.

Actual State Revenue, in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP), amounted to IDR 33,237,094,153,758.00 or 132.16% of the estimated LRA revenue of IDR 25,148,875,848,000.00.

Actual State Expenditure amounted to IDR 49,822,564,405,090.00 or 89.95% of the total budget allocation of IDR 55,392,103,313,000.00. The total expenditure consists of Goods Expenditure of IDR 49,757,823,256,051.00 or 90.00% of its budget, and Capital Expenditure of IDR 64,741,149,039.00 or 60.62% of its budget.

Laporan Realisasi Anggaran (Rp Miliar)





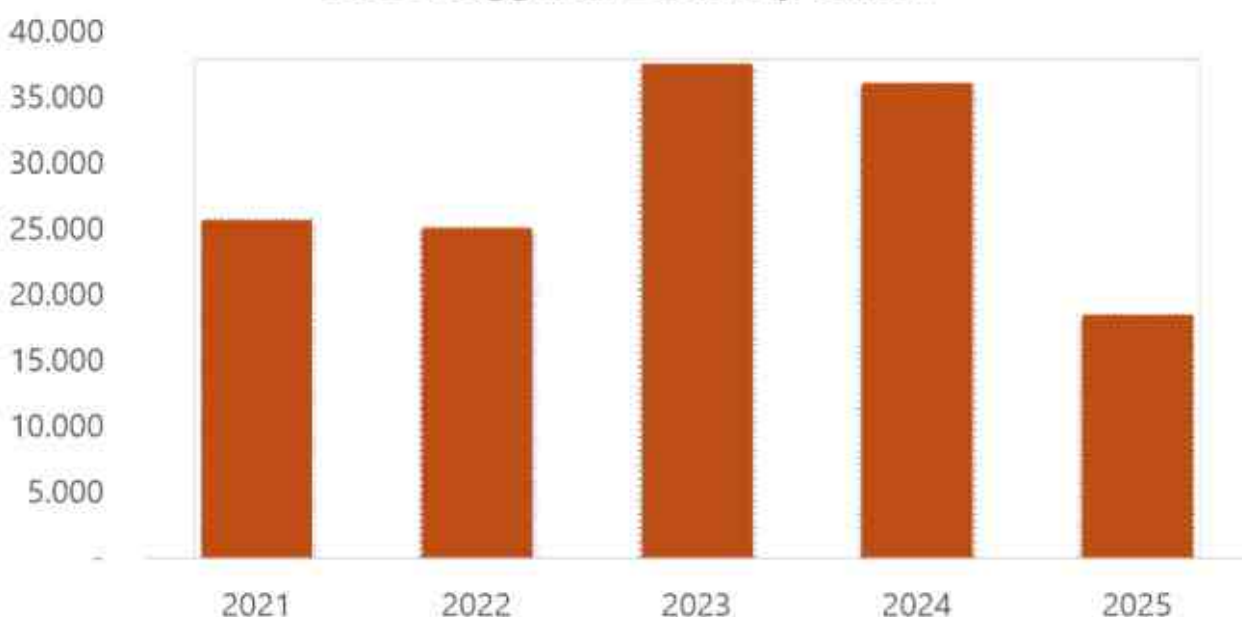
## 6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada 1 Januari 2025 sebesar Rp36.127.929.909.763,00 dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar (Rp27.539.703.221.455,00). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah sebesar Rp10.954.232.970.123,00 dengan terdapat Penyesuaian atas SILPA/SIKPA sebesar (Rp1.030.201.031.120,00) berupa setoran penerimaan negara yang berasal dari pungutan ekspor atas kelapa sawit sebesar 4% dari total realisasi pendapatan atas pungutan ekspor kelapa sawit 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sehingga jumlah SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp9.924.031.939.003,00. Tidak terdapat Koreksi dan penyesuaian pada pos Lain-lain sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp18.512.258.627.311,00.

## 6.2 Statement of Changes in Budget Surplus Balance

The Statement of Changes in Budget Surplus Balance presents the increase or decrease in the Budget Surplus Balance (SAL) for the fiscal year 2025. The opening SAL as of 1 January 2025 amounted to IDR 36,127,929,909,763.00, with the utilization of SAL recorded at IDR (27,539,703,221,455.00). The Budget Financing Surplus/Deficit (SiLPA/SiKPA) amounted to IDR 10,954,232,970,123.00, with adjustments to SiLPA/SiKPA of IDR (1,030,201,031,120.00), representing state revenue deposits derived from a 4% export levy on palm oil, based on the realization of 2024 palm oil export levy revenue in accordance with Minister of Finance Regulation Number 91 of 2023 concerning the Management of Palm Oil Plantation Funds Revenue. Thus, the adjusted SiLPA/SiKPA amounted to IDR 9,924,031,939,003.00. There were no additional corrections or adjustments in other items, resulting in an ending Budget Surplus Balance as of 31 December 2025 of IDR 18,512,258,627,311.00.

### Saldo Anggaran Lebih (Rp Miliar)



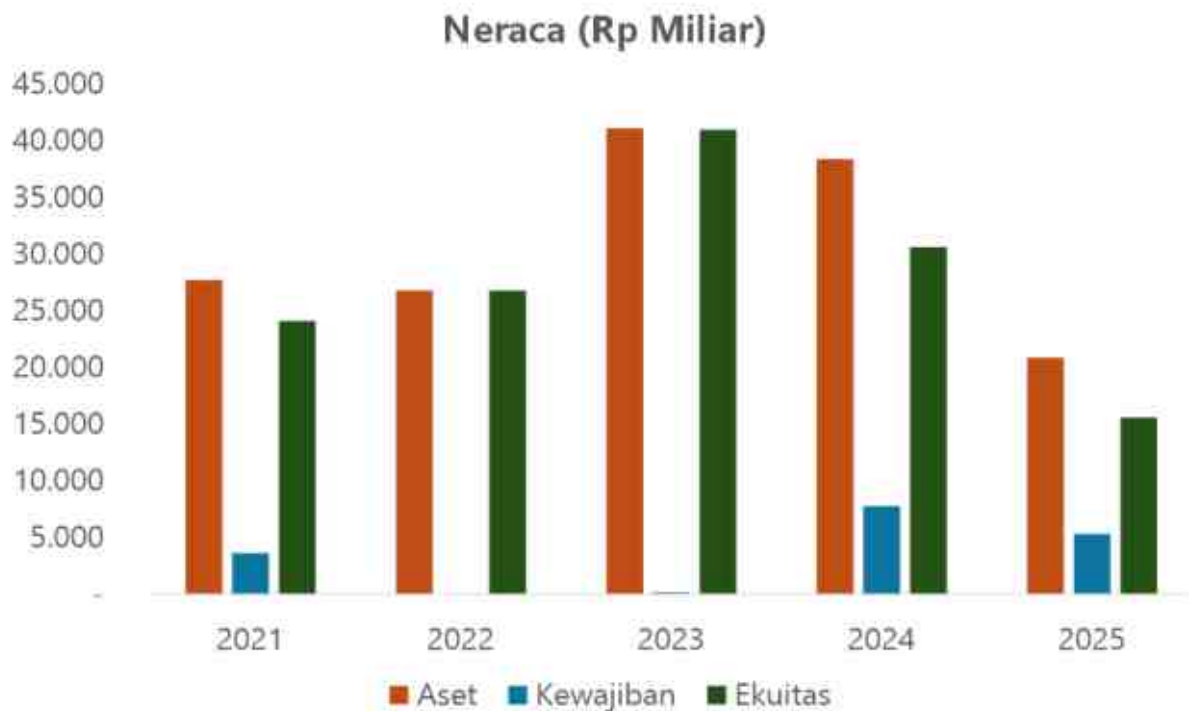


### 6.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.868.939.614.388,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.910.787.578.458,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp76.661.985.165,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.881.490.050.765,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.293.038.021.932,00 dan Rp15.575.901.592.456,00.

### 6.3 Statement of Financial Position (Balance Sheet)

The Statement of Financial Position (Balance Sheet) presents the financial position of the entity, including assets, liabilities, and equity as of 31 December 2025. Total Assets as of 31 December 2025 amounted to IDR 20,868,939,614,388.00, consisting of Current Assets of IDR 18,910,787,578,458.00, Net Fixed Assets of IDR 76,661,985,165.00, and Other Net Assets of IDR 1,881,490,050,765.00. Total Liabilities and Equity amounted to IDR 5,293,038,021,932.00 and IDR 15,575,901,592,456.00, respectively.





## 6.4 Laporan Operasional

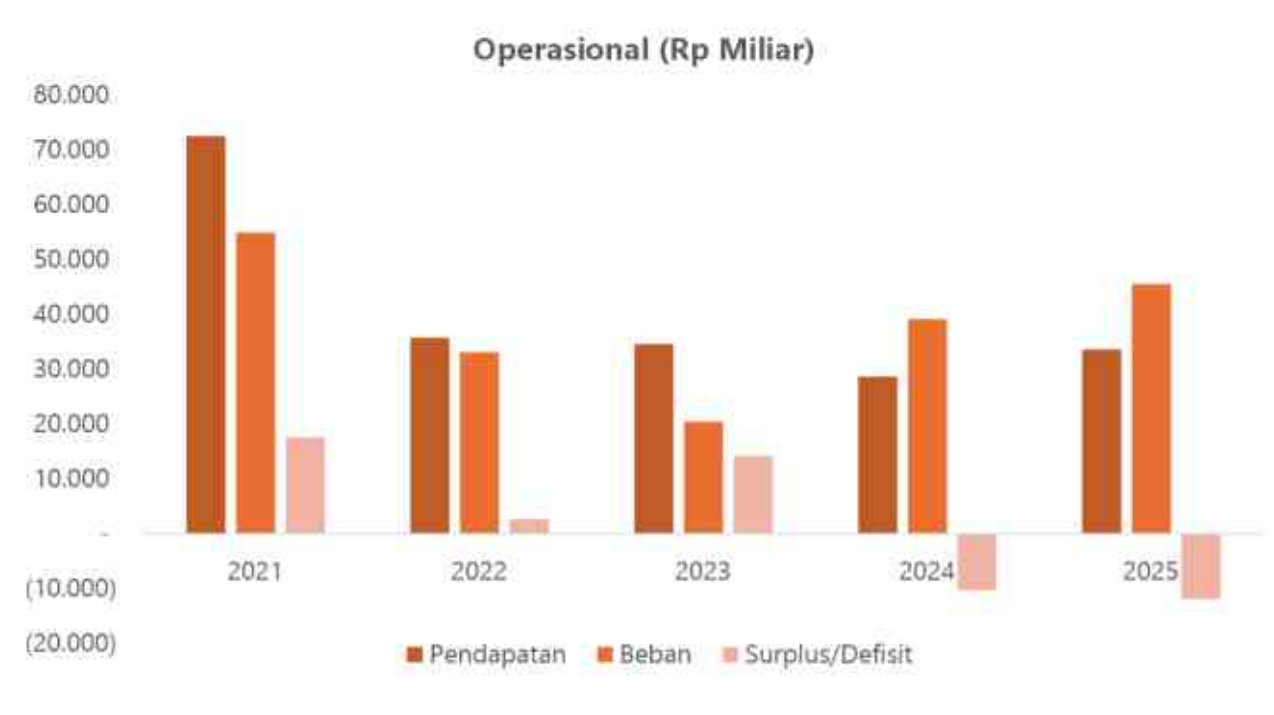
Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.525.065.602.620,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp45.541.662.809.654,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.016.597.207.034,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing adalah sebesar Rp93.876.574.443,00 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp11.922.720.632.591,00).

## 6.4 Statement of Operations

The Statement of Operations presents the components of revenue, expenses, operating surplus/deficit, non-operating surplus/deficit, extraordinary items, and the overall surplus/deficit for fair presentation.

For the period ended 31 December 2025, LO Revenue amounted to IDR 33,525,065,602,620.00, while total operating expenses amounted to IDR 45,541,662,809,654.00, resulting in an Operating Deficit of IDR (12,016,597,207,034.00). Non-Operating Surplus amounted to IDR 93,876,574,443.00, while there were no extraordinary items. Accordingly, the entity recorded a Net Deficit of IDR (11,922,720,632,591.00).





## 6.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar (Rp16.520.729.102.293,00); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp64.741.149.039,00); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp1.030.201.031.120,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp578.592.564,00. Saldo Awal Kas sebesar Rp36128.765.271.276,00 terdapat Koreksi Saldo Kas sebesar Rp0 sehingga saldo Akhir Kas menjadi sebesar Rp18.513.672.581.388,00, terjadi Penurunan Kas sebesar (Rp17.615.092.689.888,00).

## 6.5 Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flows presents information on the sources, uses, and changes in cash and cash equivalents for the period 1 January to 31 December 2025, as well as the ending cash balance as of 31 December 2025. Cash inflows and outflows are classified into operating, investing, financing, and transitory activities.

Net Cash Flow from Operating Activities amounted to IDR (16,520,729,102,293.00). Net Cash Flow from Investing Activities amounted to IDR (64,741,149,039.00). Net Cash Flow from Financing Activities amounted to IDR (1,030,201,031,120.00), while Net Cash Flow from Transitory Activities amounted to IDR 578,592,564.00. The opening cash balance was IDR 36,128,765,271,276.00, with no cash balance adjustments, resulting in an ending cash balance of IDR 18,513,672,581,388.00. This reflects a decrease in cash of IDR (17,615,092,689,888.00).



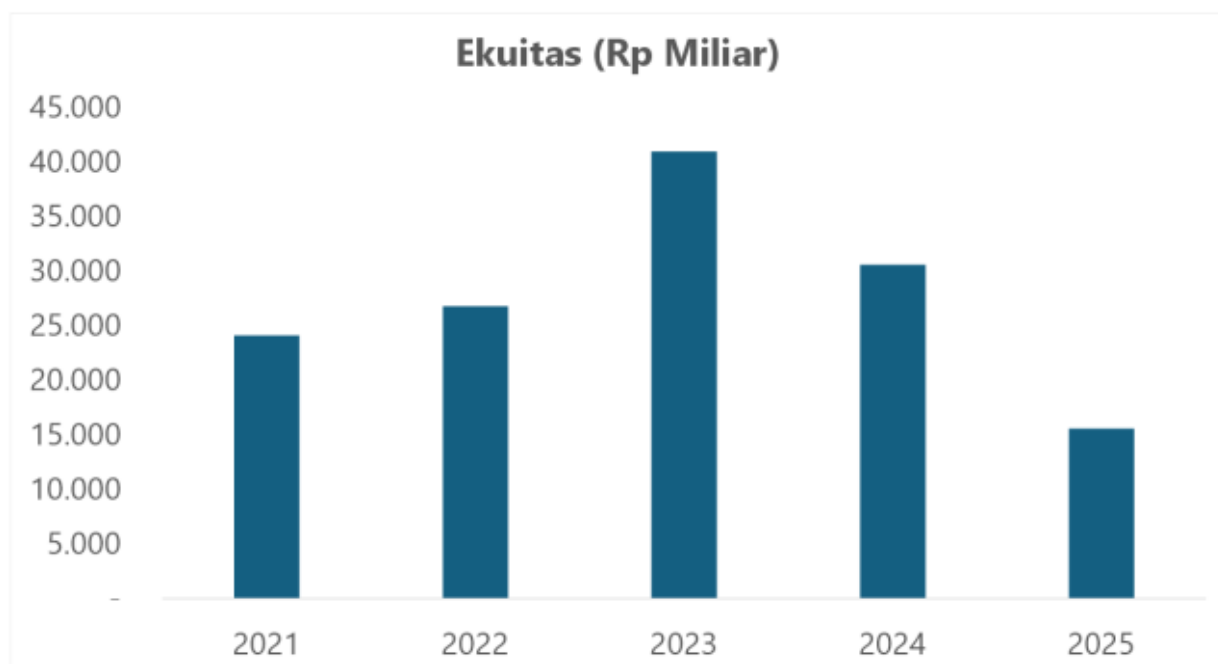


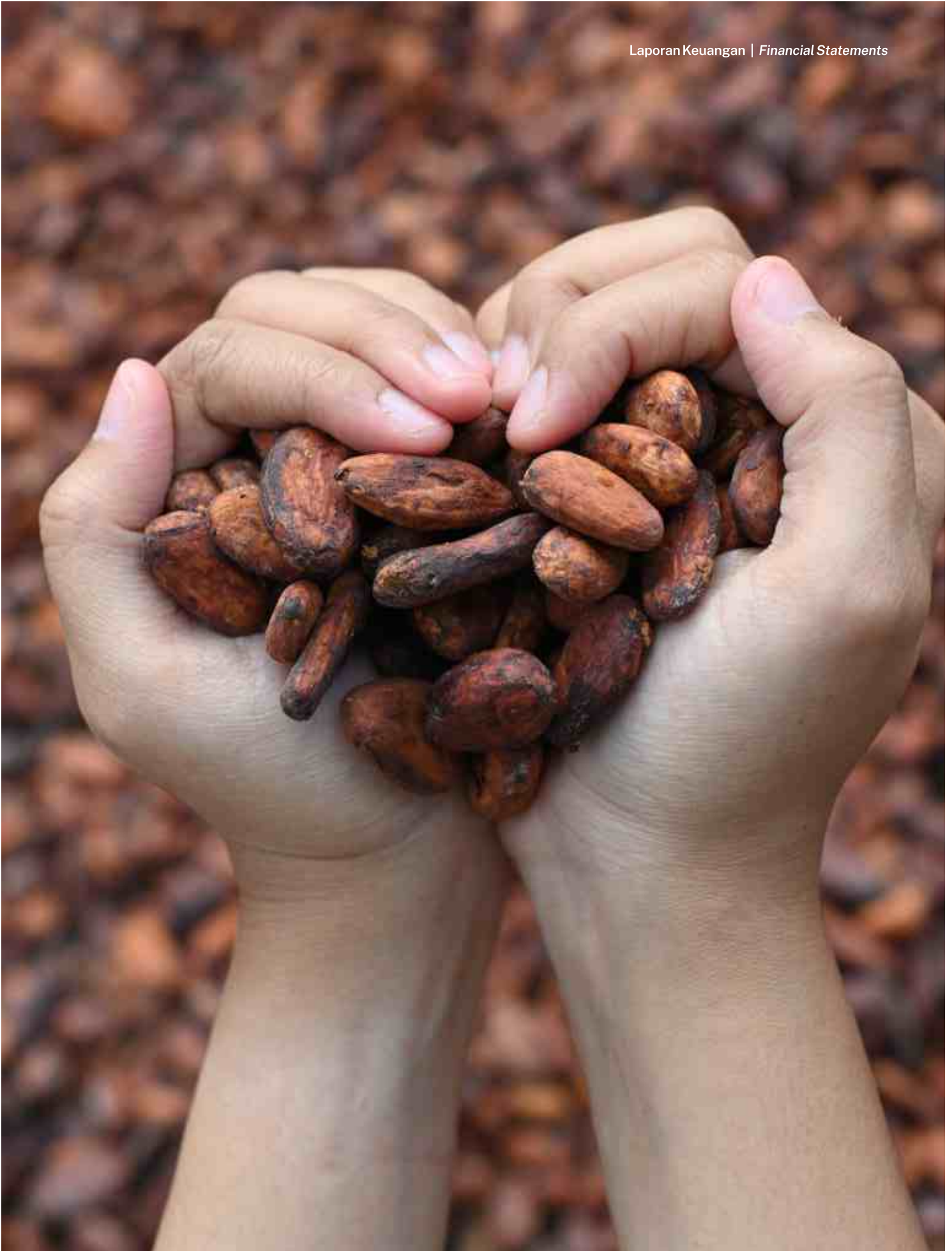
## 6.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp30.617.199.219.462,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp11.922.720.632.591,00). Terdapat Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar (Rp2.088.378.900.795,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.273.615.193,00. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp10.350.482.527.537,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp15.575.901.592.456,00.

## 6.6 Statement of Changes in Equity

The Statement of Changes in Equity presents the increase or decrease in equity during the reporting period compared to the previous year. Equity as of 1 January 2025 amounted to IDR 30,617,199,219,462.00, reduced by the Net Deficit for the period of IDR (11,922,720,632,591.00). There were adjustments that increased or decreased equity amounting to IDR (2,088,378,900,795.00), as well as inter-entity transactions totaling IDR 1,273,615,193.00. Overall, equity decreased by IDR 10,350,482,527,537.00, resulting in an ending equity balance as of 31 December 2025 of IDR 15,575,901,592,456.00.





## 6.7 Catatan atas Laporan Keuangan

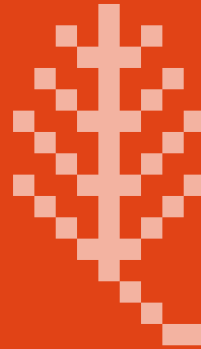
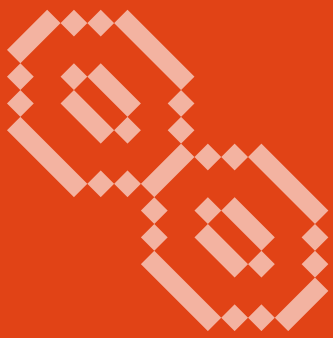
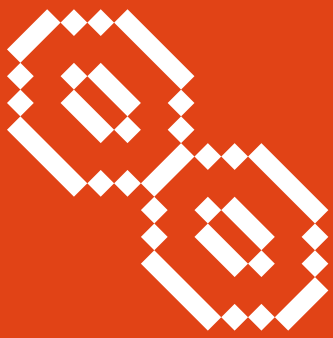
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas periode Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## 6.7 Notes to the Financial Statements

Notes to the Financial Statements (CALK) provide detailed explanations, breakdowns, and analysis of accounts presented in the Budget Realization Report, Statement of Changes in Budget Surplus Balance, Statement of Financial Position, Statement of Operations, Statement of Cash Flows, and Statement of Changes in Equity. CALK also includes information required and recommended by Government Accounting Standards, as well as other disclosures necessary for fair presentation of the financial statements. The Budget Realization Report and Statement of Cash Flows for the period ended 31 December 2025 are prepared and presented on a cash basis. Meanwhile, the Statement of Financial Position, Statement of Operations, Statement of Changes in Budget Surplus Balance, and Statement of Changes in Equity for the year 2025 are prepared and presented on an accrual basis.

Uraian Kegiatan   Activity Description	2021	2022	2023	2024	2025
Biodiesel   Biodiesel	51.951.617.007.640	34.735.911.799.651	18.501.217.993.134	29.382.827.271.376	47.173.220.717.675
Penelitian & Pengembangan   Research & Development	55.772.500.942	118.230.320.911	122.066.211.676	114.970.281.798	115.293.210.869
Promosi & Kemitraan Sawit   Palm Oil Promotion & Partnership	83.496.874.043	120.778.281.350	187.938.927.434	143.443.077.219	78.592.279.721
Peremajaan Sawit   Palm Oil Replanting	1.341.787.655.325	1.053.640.756.406	1.715.643.219.297	1.295.525.985.288	1.475.265.932.207
Pengembangan SDM Sawit   Palm Oil Human Resources Development	64.559.840.897	96.372.252.516	149.750.436.022	314.355.314.454	524.480.206.783
Sarana dan Prasarana Sawit   Palm Oil Facilities and Infrastructure	8.982.839.634	34.962.716.375	67.990.676.497	126.230.771.909	297.565.342.763
<b>Jumlah   Total</b>	<b>53.506.216.718.481</b>	<b>36.159.896.127.209</b>	<b>20.744.607.464.060</b>	<b>31.377.352.702.044</b>	<b>49.664.417.690.018</b>







Gedung Surachman Tjokrodisurjo  
Jl. Medan Merdeka Timur 16  
Jakarta Pusat 10110  
+62-21-84283099  
+62-21-84283090

 [bpdp.or.id](https://bpdp.or.id) |  [bpdp.id](https://www.instagram.com/bpdp.id)



**Satu Dekade**

# Kontribusi Nyata, untuk Keberlanjutan

A Decade of Meaningful Contributions  
to Sustainability

ANNUAL REPORT 2025